



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok tahun 2025-2045, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJPD terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
 - e. BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERUBAHAN RPJPD

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak

dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan secara teknis kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.
- (5) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-9-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA
TENGAH (3-273/2024)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom-up. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh stakeholders.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJPD Kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di Kabupaten Banjarnegara. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.
- Pasal 7
Cukup Jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Dokumen RPJPD merupakan rangkuman cita-cita masyarakat daerah, sehingga proses penyusunannya harus dilakukan melalui tahapan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, untuk memanfaatkan dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan daerah di masa depan tentu dimulai dari perencanaan pembangunan yang baik hari ini, sehingga implikasinya jika dibuat tanpa perencanaan yang baik maka cita-cita pembangunan yang salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai.

RPJPD disusun menjadi dokumen induk perencanaan pembangunan di daerah selama jangka waktu perencanaan 20 tahun. RPJPD dilaksanakan melalui 4 tahap RPJMD yang masing-masing memuat 5 tahun perencanaan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMD menjadi dasar penyusunan dokumen Rencana Strategis masing-masing perangkat daerah selama 5 tahun, dan juga akan menjadi dasar penyusunan RKPD pada periode kerja satu tahun. Selain menjalankan amanat pasal 18 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan rancangan awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, kepentingan penyusunan RPJPD 2025-2045 juga sesuai dengan agenda pemerintah pusat yang menjadwalkan Pilkada serentak pada tahun 2024, sehingga berdasarkan kebijakan yang telah dibuat, pemerintah daerah perlu menyiapkan dokumen RPJPD 2025-2045 untuk digunakan sebagai dasar penyusunan visi dan misi calon kepala daerah dalam RPJMD.

Mengingat pentingnya dokumen RPJPD pada sistem perencanaan pembangunan daerah maka terdapat konsekuensi jika daerah tidak menyusun dokumen RPJPD, diantaranya daerah akan mengalami kesulitan dalam menetapkan visi jangka panjang dan strategi pembangunan, yang tentunya berdampak pada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya pada daerah tersebut. Selain itu, tanpa visi jangka panjang yang terencana dengan baik, daerah dapat kehilangan peluang untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Untuk menjaga kualitas dokumen RPJPD, maka proses penyusunan RPJPD juga harus mengikuti tahapan yang telah ditetapkan pada kebijakan yang berlaku, diantaranya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah yang menjadi pemimpin bagi masyarakat (*Top-down*), dan juga melibatkan masyarakat atau publik secara umum (*bottom-up*), melalui penjaringan isu yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat, antara lain melalui forum konsultasi publik atau musrenbang (Permendagri 86 tahun 2017). Untuk itu telah dilaksanakan *kick-off meeting* sebagai penanda mulainya penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 pada tanggal 4 Oktober 2023, *focus group discussion* antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat pada tanggal 11 Oktober 2023, pembahasan dengan Perangkat Daerah pada tanggal 20 Oktober 2023, forum konsultasi publik pada tanggal 26 Oktober 2023, konsultasi Gubernur pada tanggal 24 Januari 2024, hingga pelaksanaan musrenbang rancangan RPJPD pada tanggal 28 Maret 2024. Guna menjaga keselarasan antara RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RPJPD, RPJPD juga disusun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tanggal 17 April 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

RPJPD juga harus disusun dengan memperhatikan keberlanjutan (*sustainable*), karena pembangunan yang dilakukan bukan hanya untuk generasi hari ini saja, namun harus memperhatikan keberlanjutan untuk generasi mendatang, sehingga penyusunannya harus memperhatikan kajian dokumen perencanaan lainnya, seperti dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), selain menjaga keberlanjutan, juga menjaga konsistensi dan sinkronisasi dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya. Dengan memperhatikan dokumen RTRW dan KLHS dalam penyusunan RPJPD juga dapat memberikan peluang untuk dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan masalah tata ruang dan lingkungan hidup yang berpotensi muncul selama 20 tahun mendatang, karena kajian yang dilakukan pada dokumen RTRW dan KLHS juga dilakukan melalui metode ilmiah dan kaidah-kaidah akademis. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, maka Kabupaten Banjarnegara memiliki kewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045, yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 302);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

C. Hubungan Antar Dokumen

Mengingat pentingnya dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan, maka perlu memperhatikan hubungan atau keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya.

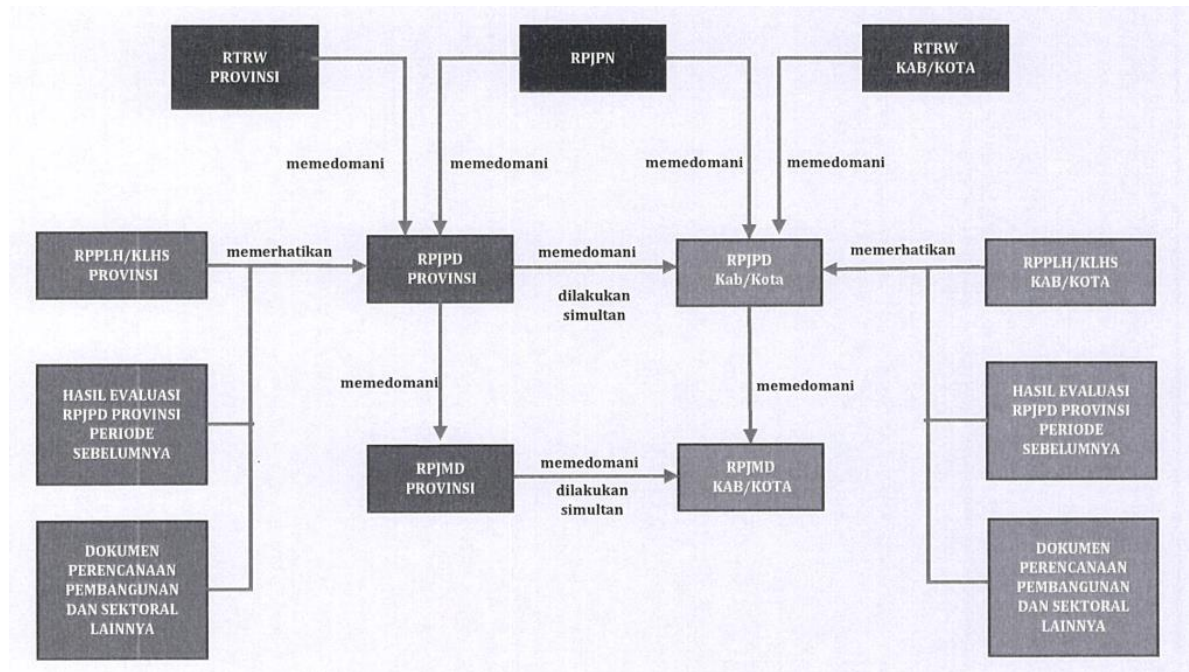
Hubungan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045, bahwa penyusunan RPJPD harus berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW, kemudian pelaksanaan rentang waktu RPJPD harus sesuai dengan rentang waktu RPJPN.

Hubungan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah 2025-2045. Daerah yang merupakan wilayah Provinsi Jawa Tengah, dalam penyusunan RPJPD harus mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan kondisi di Daerah.

Hubungan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RTRW Tahun 2023-2043. Bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan RTRW, agar pembangunan yang dilakukan dapat menjangkau seluruh wilayah sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Hubungan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJMD. RPJPD akan dilaksanakan melalui 4 tahapan RPJMD, sehingga RPJMD disusun dengan memedomani RPJPD. Dalam penyusunan RPJMD harus dilakukan penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan.

Hubungan RPJPD Tahun 2025-2045 dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis wajib diintegrasikan dalam penyusunan atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPMD Provinsi Provinsi Jawa Tengah, dan RPJMD, termasuk memaduserasikan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup dengan kondisi lingkungan hidup di Provinsi/Daerah. Dalam hal ini hasil dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses perumusan permasalahan dan isu strategis jangka Panjang daerah, visi dan misi pembangunan jangka Panjang, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.



Pembangunan dan Sektoral Lainnya

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan dokumen pedoman pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan.

2. Tujuan

Tujuan dari dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah: sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini secara ringkas menjelaskan mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya untuk memahami permasalahan daerah dan isu-isu strategis yang akan dipecahkan hingga akhir masa periode pembangunan jangka panjang disertai isu-isu pembangunan terkini beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi (nasional) dan provinsi Jawa Tengah.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis secara terukur dan spesifik yang akan dicapai selama pada akhir periode pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan sasaran pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok tersebut merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode RPJPD.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kaidah pelaksanaan dan pembiayaan pembangunan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara.

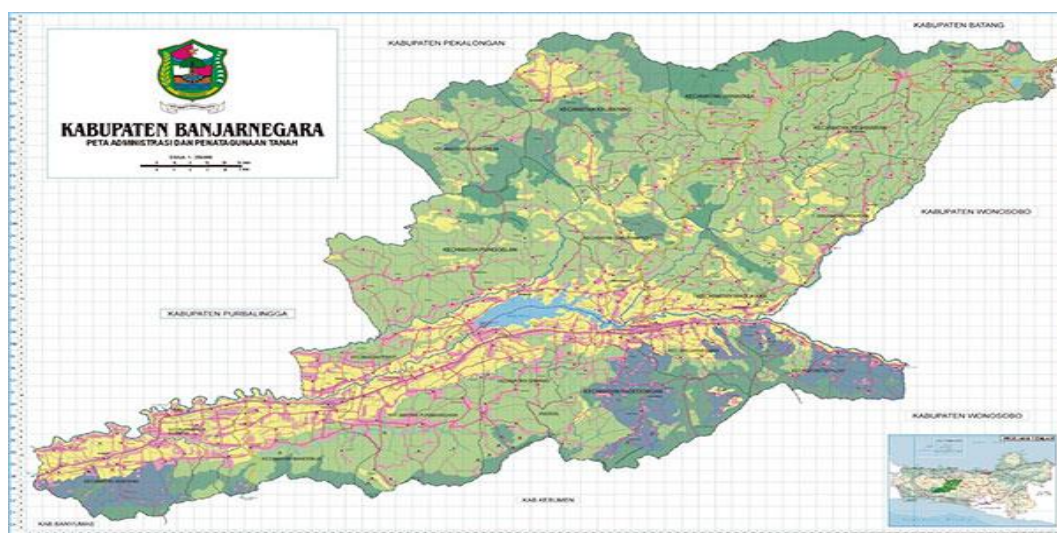
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A.Aspek Geografi

Luas Kabupaten Banjarnegara sebesar 1.144.896 km² atau sekitar 3,29 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa tengah (3,25 juta Ha). Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah bagian barat yang membujur dari barat ke timur. Kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara 20% wilayah kecamatan berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut sangat cocok untuk pengembangan berbagai jenis tanaman seperti kopi, carica, kentang, kubis, dan wortel. Selain itu komoditas pertanian lain seperti salak, ketela pohon, perikanan gurami serta peternakan domba/kambing. Sedangkan di sektor pariwisata juga terdapat obyek wisata unggulan berskala nasional yaitu Dieng serta wisata air arung jeram Sungai Serayu.

Kabupaten Banjarnegara berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga



Gambar Peta Kabupaten Banjarnegara

Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri atas 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 266 Desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara. Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten Banjarnegara menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kecamatan Ke Dalam
Desa/Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)	RW	RT
1	Susukan	15	5.265, 67	78	350
2	Purwareja Klampok	8	2.186,67	61	234
3	Mandiraja	16	5.261, 58	72	386
4	Purwanegara	13	7.386,53	75	396
5	Bawang	18	5.520, 64	115	405
6	Banjarnegara	13	2.624,20	84	318
7	Pagedongan	9	8055, 24	60	266
8	Sigaluh	15	3.955,95	45	195
9	Madukara	20	4.820, 15	74	246
10	Banjarmangu	17	4.635,61	60	279
11	Wanadadi	11	2.827, 41	43	190
12	Rakit	11	3.244,62	51	277
13	Punggelan	17	10.284, 01	101	427
14	Karangkobor	13	3.906,94	48	181
15	Pagentan	16	4.618, 98	61	238
16	Pejawaran	17	5.224,97	71	257
17	Batur	8	4.717, 1	42	176
18	Wanayasa	17	8.201,13	69	271
19	Kalibening	16	8.377,56	80	234
20	Pandanarum	8	5.856,05	45	133
TOTAL		278	106.971,00	1.335	5459

Secara astronomi terletak antara 7°12'–7°31' Lintang Selatan dan 109°20'10"–109°45'50" Bujur Timur. Ibu kota Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Banjarnegara Kota. Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100-500 mdpl. Kabupaten Banjarnegara juga di kenal sebagai Kota Dawet Ayu. Kabupaten ini merupakan sebuah dataran tinggi dengan ketinggian tempat pada masing-masing wilayah umumnya tidak sama yaitu antara 40-2.300 meter dpl dengan rincian kurang dari 100 meter (9,82%), antara 100-500 meter (28,74%) dan lebih dari 1000 (24,40%). Menurut kemiringan tanahnya maka 24,61% dari luas wilayah mempunyai kemiringan 0-15% dan 45,04 dari luas wilayah mempunyai kemiringan antara 15-40% sedangkan yang 30,35% dari luas wilayahnya mempunyai kemiringan lebih dari 40%. Sehingga Kawasan ini menjadi salah satu daya tarik tempat wisata di Jawa Tengah, Karena tempat yang sejuk cenderung dingin dan keelokan panoramanya yang sangat terkenal dari jaman dulu.

Topografi Kabupaten Banjarnegara berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian antara 100-500 mdpl.

dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.

Geologi Kabupaten Banjarnegara memiliki jenis tanah, struktur, dan gerakan tanah yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanah alluvial: terdapat di Kecamatan Batur, Karangobar, Purwareja Klampok dan Wanadadi.
- b. Tanah latosol: terdapat di Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran dan Pagentan.
- c. Tanah andosol: terdapat di Kecamatan Kalibening, Wanayasa, Pejawaran dan Batur.
- d. Tanah grumol: terdapat di Kecamatan Purwanegara, Mandiraja, Kalibening, Karangobar, Pagentan dan Banjarnegara.
- e. Tanah organosol: terdapat di Kecamatan Batur.
- f. Tanah litosol: terdapat di Kecamatan Banjarnegara dan Punggelan.
- g. Formasi endapan: Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi pegunungan Serayu Selatan. Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion yang terdiri dari sekis kristalin, sabak, serpil hitam, filit, kwarsit, dan batu gemping.
- h. Formasi batuan:
 - Batuan grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden
 - Batuan metasedimen tersingkap di daerah Kalitengah hingga daerah Pegunungan Duwur.
 - Batuan filit dan sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng selatan pegunungan Serayu Selatan.

Hidrologi wilayah Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam wilayah aliran Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu, dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah prenia (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu. Adapun jumlah mata air dan sungai yang mengalir di daerah resapan Kabupaten Banjarnegara antara lain:

- a. Kecamatan Rakit: memiliki 42 mata air yang dialiri oleh Sungai Serayu dan Pekacangan.
- b. Kecamatan Punggelan: memiliki 6 mata air yang dialiri oleh Sungai Pekacangan, Kedawung, Pandanaran, Wujil, Cacaban, dan Gintung.
- c. Kecamatan Wanadadi: memiliki 4 mata air yang dialiri oleh Sungai Serayu dan Pekacangan.
- d. Banjarmangu: memiliki 9 mata air yang dialiri Pekacangan, Serayu, Merawu, Kandangwangi, dan Lumajang.
- e. Madukara: memiliki 20 mata air yang dialiri Serayu, Merawu, Langkrang, dan Bangbang.
- f. Pagentan: memiliki 9 mata air yang dialiri Merawu, Bojong, dan Jawar.

g. Pejawaran: memiliki 13 mata air yang dialiri oleh sungai Bojong, Penaraban, Putih, dan Dalak.

Klimatologi wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya lebih banyak dari bulan kering. Curah hujan pada bulan Desember 2022 sebanyak 20,68mm per tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Januari sebanyak 26,94mm dengan 24 hari hujan. Suhu udara selama tahun 2022 berkisar diantara 23,3-25,1°C dengan tingkat kelembaban udara 79,50-89,20% dan kecepatan angin rata-rata 2,30 m/detik. Sepanjang tahun, suhunya biasanya bervariasi dari 21°C hingga 31°C dan jarang di bawah 19°C atau di atas 33°C. Berikut rincian banyaknya curah hujan serta hari hujan.

Suhu udara di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2023 berkisar antara 21,9°C-29,3°C sampai dengan 18,7°C -30,2 °C sedangkan kelembaban udara berkisar antara 72,2%-87,1% sampai dengan 61,0%-91,0%.

Tabel Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015-2023

Tahun	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)
2015	21,9-29,3	72,2-87,1
2016	21,4-28,2	79,2-88,4
2017	20,8-27,2	81,3-88,2
2018	20,3-27,5	76,9-87,7
2019	22,3-27,3	74,7-85,7
2020	24,1-27,7	78,8-87,0
2021	22,2-25,0	79,7-88,2
2022	16,5-30,4	51,0-98,0
2023	18,7-30,2	61,0-91,0

Berdasarkan kondisi klimatologi berupa trend curah hujan, jumlah hari hujan dan suhu rata-rata wilayah, Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam kondisi kesesuaian lahan untuk aktivitas terbangun. Hal ini mendukung pengembangan wilyah dengan aktivitas utama jasa perdagangan dan pariwisata, rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Banjarnegara tidak melebihi angka 200 mm yang menunjukkan bahwa secara teoritis tidak ada bulan basah di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini merupakan faktor pendukung aktivitas kegiatan yang ada di wilayah tersebut secara optimal. Namun masih terdapa beberapa resiko seperti tanah longsor karena terdapat lereng serta tebing, jika terjadi curah hujan yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari sisi penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara menurut jenisnya, pada tahun 2023 dibagi menjadi 3 yaitu lahan sawah, bukan lahan sawah, dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah di Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas sebesar 12.645,53 Ha atau 11,82 persen dari wilayah keseluruhan Kabupaten Banjarnegara, sementara lahan bukan sawah memiliki luas sekitar 71.702,63 Ha atau 67,02 persen dari total luas Banjarnegara, kemudian lahan bukan pertanian memiliki luas sebesar 22.623,54 Ha atau sekitar 21,14 persen dari total luas Banjarnegara. Rincian

penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel Penggunaan Lahan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2019-2023

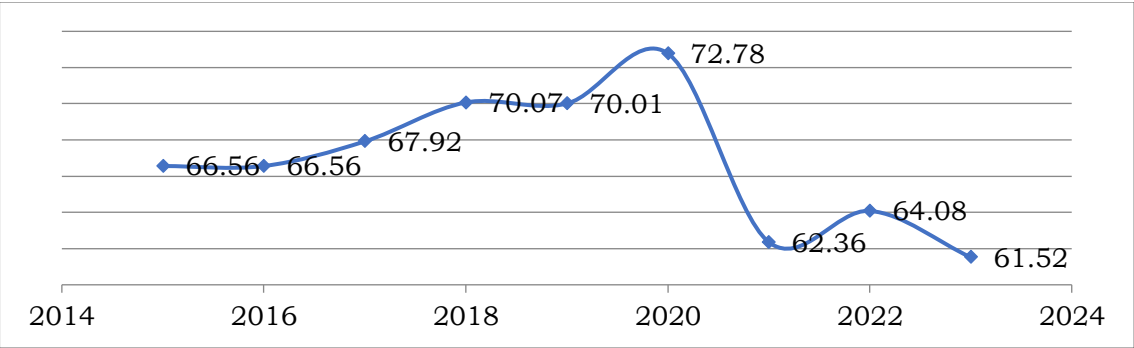
Penggunaan Lahan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
I. Lahan Sawah	14.054	14.049	13.292	12.939,63	12.645,53
a. Lahan Irigasi	11.046	11.101	10.982	10.639,07	10.502,89
b. Lahan Tadah Hujan	2.942	2.883	2.245	2.238,87	2.088,94
c. Lahan Pasang Surut	66	65	65	61,7	53,70
II. Bukan Lahan Sawah	74.508	72.140	75.616	74.520,92	71.702,63
a. Tegal/Kebun	45.899	42.820	46.296	46.175,03	43.144,89
b. Perkebunan	2.799	3.089	3.089	3.088,92	3.083,42
c. Hutan Rakyat	6.609	7.363	7.363	6.066,55	6.062,25
d. Lainnya	19.189	18.857	18.857	19.179,42	19.401,07
e. Lahan Yang Tidak Diusahakan	11	11	11	11	11
III. Lahan Bukan Pertanian	18.410	20.783	18.064	19.511,15	22.623,54
Jumlah (I+II+III)	106.972	106.972	106.972	106.972	106.972

Lahan Sawah terdiri dari lahan irigasi, lahan tadah hujan, dan lahan pasang surut. Luas penggunaan lahan terbesar di lahan sawah yaitu lahan irigasi dengan luas 10.502,89 ha (83,06%). Sedangkan bukan lahan sawah terdiri dari tegal/kebun, perkebunan, hutan rakyat, lainnya, dan lahan yang tidak diusahakan dengan luas terbesar pada lahan untuk tegal/kebun seluas 43.144,89 ha (60,17%). Lahan bukan pertanian terdiri dari bangunan/pekarangan, hutan negara, rawa-rawa tidak ditanami padi, dan lainnya dengan luas 22.623,54 ha.

B. Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup

Gambaran Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 10 tahun terakhir dapat dikatakan dalam kondisi yang kurang baik, secara data menunjukkan terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup, yang diantaranya dipengaruhi oleh sedimentasi pada dataran tinggi Dieng, budi daya tanaman yang cenderung mengabaikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, kerusakan yang ditimbulkan akibat galian C, serta kerusakan lingkungan lainnya yang berpengaruh terhadap IKLH. Menjadi tugas penting bagi Pemerintah daerah secara khusus 20 tahun kedepan untuk fokus memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Dengan semakin mengemukanya isu perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan sehingga berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati perlu diambil langkah-langkah pencegahan dan rehabilitasi agar kerusakan yang terjadi tidak menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara signifikan. Selain hal tersebut, yang patut menjadi perhatian adalah kondisi penanganan sampah yang masih belum optimal. Area cakupan pelayanan persampahan masih terbatas

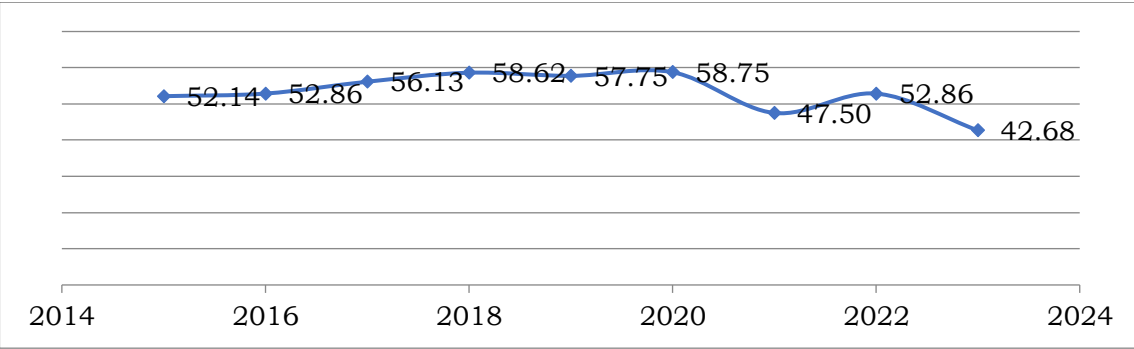
sehingga diperlukan peningkatan cakupan pelayanan dan pengolahan sampah terpadu. Selain pengembangan TPA Winong, dibutuhkan pembangunan TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) maupun TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*) untuk meningkatkan cakupan area pelayanan persampahan.



Gambar Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2023

Terjadi perbedaan/konversi nilai IKLH tahun 2023 dikarenakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki metode/sistem perhitungan IKLH yang baru. Pada sistem yg baru ini, komponen penilaian IKA, IKU, dan IKL mengalami perubahan dan penambahan parameter. Rumus perhitungan masing-masing parameter juga mengalami perubahan nilai koefisien, sehingga terjadi kenaikan nilai IKLH dari 61,52 menjadi 75,56. Nilai IKLH tahun 2023 yang telah dikonversi digunakan sebagai baseline perhitungan proyeksi target nilai IKLH 2025-2045 yang selaras dengan RPJPD.

Selain IKLH dapat dilihat gambaran kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat melalui Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Air Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2015-2023 kondisinya relatif kurang stabil, indeks ini mengindikasikan bahwa kualitas air di Kabupaten Banjarnegara tidak selalu baik, atau sewaktu-waktu memiliki masalah yang dapat mempengaruhi akan kebutuhan air pada masyarakat, indeks kualitas air adalah salah satu prioritas yang harus dijaga oleh pemerintah daerah, karena air merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan.



Gambar Indeks Kualitas Air Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2023

Secara agregat, daya dukung air di Kabupaten Banjarnegara surplus sebesar 736.626.991,13 m3/tahun, namun kondisi tersebut tidak terdistribusi secara merata di semua wilayah Kabupaten Banjarnegara. Secara keseluruhan, seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dalam kondisi daya dukung air surplus (+), namun

terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami defisit (-) lebih dari 20% dari luas wilayah kecamatannya, antara lain Kecamatan Mandiraja (1256,04 Ha atau 23,09% dari total luas wilayah kecamatan), Purwareja Klampok (584,67 Ha atau 24,68% dari total luas wilayah kecamatan), dan Kecamatan Susukan (1.101,36 Ha atau 20,71% dari total luas wilayah kecamatan). Sedangkan kecamatan yang paling rendah mengalami defisit adalah Kecamatan Batur, yaitu 0,91% dari luas total Kecamatan Batur.

Daya dukung air pada tahun eksisting (2022) di Kabupaten Banjarnegara dalam keadaan surplus sebesar 736.626.991,13 m3/tahun. Pertumbuhan penduduk yang terus terjadi menyebabkan kebutuhan akan air semakin besar setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk juga membawa konsekuensi peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman dan lahan terbangun sehingga akan berpengaruh pada ketersediaan air di masa yang akan datang. Proyeksi dan skenario dibutuhkan untuk dapat mengantisipasi kondisi daya dukung air di masa depan. Perhitungan proyeksi daya dukung air ini didasarkan pada pola ruang dan proyeksi kecenderungan jasa lingkungan pengatur air di Kabupaten Banjarnegara. Adapun hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air di masa depan secara terperinci tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel Daya Dukung Air di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2045

Nama Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)	Selisih (m3/tahun)	Daya Dukung Air	Belum Terlampau (%)	Terlampau (%)
Banjarmangu	71.371.205,78	39.221.116,40	32.150.089,38	Surplus	90,43	9,57
Banjarnegara	45.005.516,77	18.008.275,67	26.997.241,10	Surplus	93,71	6,29
Batur	66.483.828,69	26.139.839,89	40.343.988,80	Surplus	99,14	0,86
Bawang	73.082.152,42	43.371.474,23	29.710.678,19	Surplus	86,87	13,13
Kalibening	124.966.878,82	53.215.406,48	71.751.472,34	Surplus	91,29	8,71
Karangobar	46.417.692,85	23.567.496,00	22.850.196,86	Surplus	95,30	4,70
Madukara	52.779.702,05	24.880.615,46	27.899.086,60	Surplus	95,10	4,90
Mandiraja	65.409.222,79	46.074.440,32	19.334.782,47	Surplus	72,21	27,79
Pagedongan	100.707.833,77	35.230.530,30	65.477.303,48	Surplus	98,85	1,15
Pagentan	58.427.527,10	37.071.213,20	21.356.313,89	Surplus	95,70	4,30
Pandanarum	71.100.299,79	34.293.527,18	36.806.772,61	Surplus	90,46	9,54
Pejawaran	60.908.074,46	38.529.934,14	22.378.140,31	Surplus	97,90	2,10
Punggelan	120.077.963,67	71.969.794,86	48.108.168,81	Surplus	96,31	3,69
Purwanegara	90.829.800,49	51.183.617,56	39.646.182,93	Surplus	88,21	11,79
Purwareja Klampok	22.638.670,87	16.448.576,36	6.190.094,51	Surplus	72,06	27,94
Rakit	28.243.153,09	28.213.103,48	30.049,62	Surplus	81,63	18,37
Sigaluh	48.025.624,57	19.130.559,52	28.895.065,05	Surplus	96,91	3,09
Susukan	55.868.807,70	38.441.665,58	17.427.142,12	Surplus	76,44	23,56
Wanadadi	30.173.498,20	21.115.139,95	9.058.358,26	Surplus	82,93	17,07
Wanayasa	108.261.537,14	39.094.963,88	69.166.573,26	Surplus	97,81	2,19
Total	1.340.778.991,03	705.201.290,43	635.577.700,60	Surplus	91,21	8,79

Berdasarkan hasil proyeksi daya dukung air di Kabupaten Banjarnegara, pada tahun 2045 diperkirakan status daya dukung air masih dalam keadaan belum terlampaui atau surplus dengan ketersediaan air permukaan sebesar 1.340.778.991,03 m3/tahun, sedangkan untuk kebutuhan air (domestik dan pertanian) sebesar 705.201.290,43 m3/tahun. Kondisi ini memberikan informasi bahwa ketersediaan air di Kabupaten Banjarnegara masih sangat mencukupi dan sangat mampu memenuhi kebutuhan air yang ada pada tahun 2045. Jika dilihat per kecamatan, keseluruhan wilayah kecamatan (20

kecamatan) yang ada di Kabupaten Banjarnegara masih memiliki status daya dukung air yang belum terlampaui (surplus). Hanya saja ada satu kecamatan yang memiliki selisih antara kebutuhan dan ketersediaan air yang cukup tipis, seperti yang ada di Kecamatan Rakit.

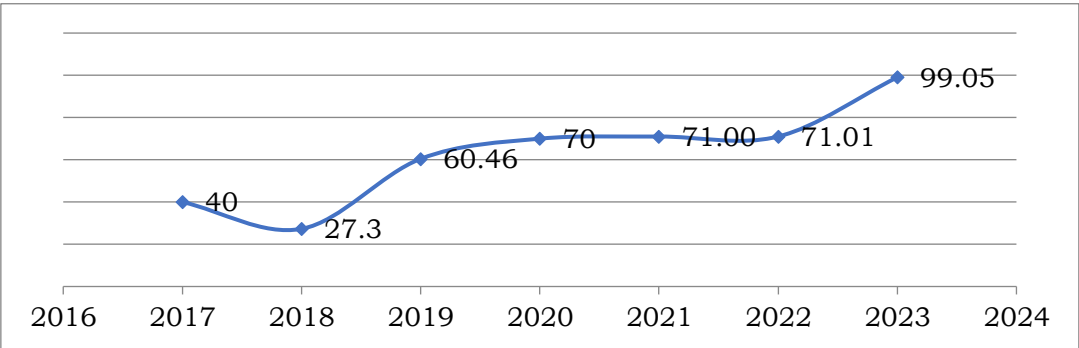
Wilayah-wilayah yang memiliki kondisi daya dukung air terlampaui banyak tersebar di sekitar jalan lintas provinsi Wonosobo-Banyumas. Hal ini dikarenakan konsentrasi permukiman yang tersebar mengikuti jalan, dan juga banyak terdapat sawah dikarenakan topografinya yang relatif landai. Kedua hal ini menyebabkan tingkat kebutuhan air menjadi tinggi, sedangkan ketersediaan airnya terbatas. Pada bagian utara Kabupaten Banjarnegara masih didominasi oleh wilayah dengan status daya dukung air yang belum terlampaui. Hal ini dikarenakan wilayah utara yang berupa perbukitan (perbukitan dieng) dan jarang diusahakan sebagai lahan pertanian sehingga kebutuhan airnya lebih rendah dibandingkan di daerah barat. Selain itu juga daerah ini masih memiliki JLH pengatur air yang baik dan berdampak pada ketersediaan air yang relatif lebih besar dibandingkan daerah barat.

Tabel 2.5 Skenario Daya Dukung Air di Kabupaten Banjarnegara

Uraian (m ³ /tahun)	2022	2029	2045
<i>Business As Usual (BAU)</i>			
Ketersediaan Air WS (Wilayah Sungai)	1.430.208.276,07	1.340.778.991,03	1.340.778.991,03
Kebutuhan Air Total (Domestik+Pertanian)	693.581.285	697.416.736,82	705.201.290,43
Selisih	736.626.991	643.362.254,21	635.577.700,60
Daya Dukung Air WS	2,06	1,92	1,90
Skenario 1 Mempertahankan JLH Pengatur Tata Air			
Ketersediaan Air WS (Wilayah Sungai)	1.430.208.276,07	1.430.208.276,07	1.430.208.276,07
Kebutuhan Air Total (Domestik+Pertanian)	693.581.285	697.416.736,82	705.201.290,43
Selisih	736.626.991	732.791.539,25	725.006.985,64
Daya Dukung Air Skenario 1	2,06	2,05	2,03
Skenario 2 Mempertahankan JLH Pengatur Tata Air dan Penghematan Air Untuk Pertanian			
Ketersediaan Air WS (Wilayah Sungai)	1.430.208.276,07	1.430.208.276,07	1.430.208.276,07
Kebutuhan Air Total (Domestik+Pertanian)	693.581.285	655.858.825,97	644.813.197,27
Selisih	736.626.991	774.349.450,10	785.395.078,80
Daya Dukung Skenario 2	2,06	2,18	2,22

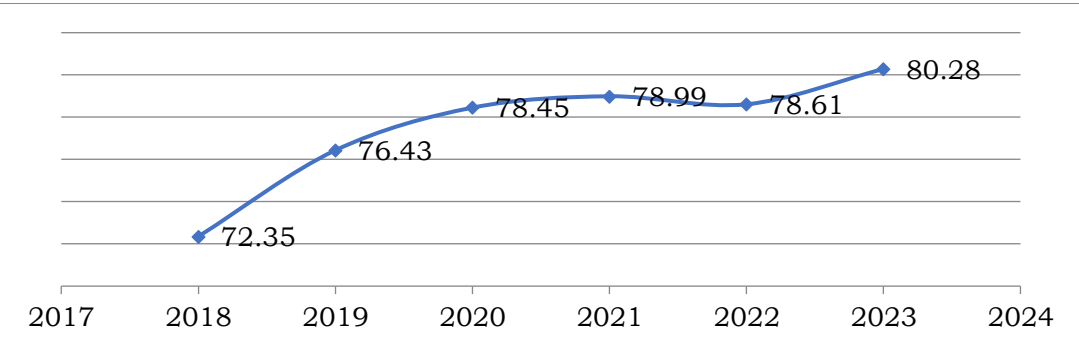
Kualitas lingkungan hidup dapat juga dilihat melalui Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW, Manfaat rencana tata ruang wilayah diantaranya, yaitu: Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota, dan mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya. Jika dilihat persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten Banjarnegara selama 2017-2022 capaiannya cenderung meningkat, ini menunjukkan ketaatan terhadap RTRW secara perlahan mengalami peningkatan, meski belum selalu maksimal, persentase ini menunjukkan adanya perubahan cara pandang dalam memanfaatkan dokumen RTRW dalam pemanfaatan ruang. Capaian ini pada tahun yang akan mendatang tentunya harus ditingkatkan agar seluruh

pembangunan yang dilakukan daerah sinkron dan sejalan dengan RTRW yang telah ditetapkan.



Gambar Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2023

Indeks Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

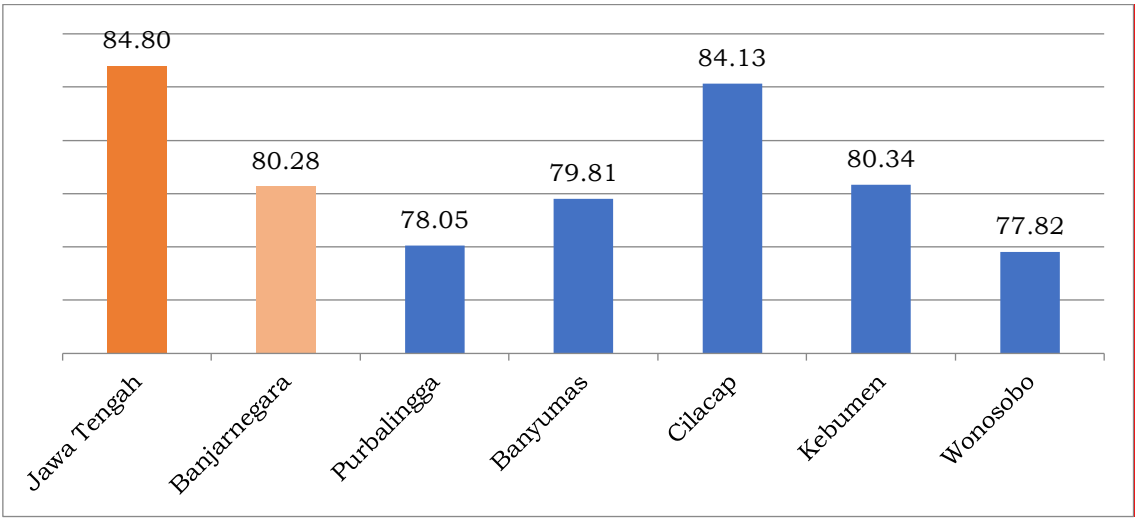


Gambar Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

Indeks ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2018 -2023 cenderung mengalami kenaikan, jika pada tahun 2018 berada di angka 72,35 pada tahun berikutnya konsisten mengalami kenaikan sampai pada tahun 2021 di angka 78,99, namun pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi 78,61 namun pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi menjadi 80,28. Capaian ini mengindikasikan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Banjarnegara masih dapat dikelola dengan baik, namun penurunan yang terjadi, bisa menjadi peringatan bagi Pemerintah Daerah agar dapat memprediksi

masalah pangan yang mungkin terjadi di masa depan. Secara keseluruhan di Kabupaten Banjarnegara, total selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan pangan menunjukkan kondisi surplus, namun kondisi tersebut tidak terdistribusi secara merata di semua wilayah Kabupaten Banjarnegara. Terdapat beberapa lokasi yang tetap mengalami defisit. Rata-rata semua kecamatan di Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah dengan kondisi surplus dengan persentase lebih dari 70%, namun terdapat kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami defisit lebih dari 50% dari luas wilayah kecamatannya, yaitu Kecamatan Mandiraja (2.780,60 Ha atau 51,11%) dan Purwareja Klampok (1.206,14 Ha atau 50,92%). Sedangkan kecamatan yang paling rendah mengalami defisit adalah Kecamatan Wanayasa, yaitu 10,21% atau 924,27 Ha dari luas total Kecamatan Wanayasa.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Ketahanan Pangan dengan wilayah sekitarnya pada tahun 2023, maka Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara berada pada posisi diatas kabupaten Purbalingga, kabupaten Wonosobo dan kabupaten Banyumas namun masih dibawah kabupaten Cilacap dan kabupaten Kebumen. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan capaian indeks ketahanan pangan, karena indeks ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara juga masih berada di bawah indeks ketahanan pangan provinsi Jawa Tengah.



Gambar Posisi Relatif Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya, dan Jawa Tengah

Terkait perubahan iklim, sebagian besar wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki kelas Jasa lingkungan pengatur iklim sedang, yaitu seluas 81.390,16 ha atau 71,11% dari luas total Kabupaten Banjarnegara. Hal ini disebabkan oleh adanya mayoritas penutupan lahan di Kabupaten Banjarnegara berupa pertanian lahan kering dan sawah, sehingga secara nilai atau skor terhadap Jasa lingkungan pengatur iklim menunjukkan kelas sedang. Secara umum, indikasi perubahan iklim ditunjukkan dengan kenaikan curah hujan pada bulan basah dan penurunan pada bulan kering. Selain itu, kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang

dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut. Secara umum, kerentanan terhadap adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Banjarnegara ada pada kerentanan sedang. Kecuali Kecamatan Purwareja Klampok, Karangobar, Pagentan, dan Batur yang memiliki kerentanan rendah terhadap adaptasi perubahan iklim.

Selain berdampak pada ketersediaan air dan kebutuhan air di masa depan, pertumbuhan penduduk juga berdampak pada ketersediaan dan kebutuhan pangan di masa yang akan datang. Proyeksi dibutuhkan untuk memberikan gambaran ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Banjarnegara sehingga upaya intervensi dapat dilakukan dari sekarang. Proyeksi kebutuhan pangan didasari pada proyeksi penduduk yang kemudian dihitung kebutuhan tahunannya. Adapun hasil dari proyeksi daya dukung pangan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Daya Dukung Pangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2045

Nama Kecamatan	Ketersediaan Pangan (ton/tahun)	Kebutuhan Pangan (ton/tahun)	Selisih (ton/tahun)	Daya Dukung Pangan	Belum Terlampaui (%)	Terlampaui (%)
Banjarmangu	4.681,43	4.712,01	- 30,58	Defisit	72,76%	27,24%
Banjarnegara	2.703,42	5.430,68	- 2.727,26	Defisit	50,52%	49,48%
Batur	3.974,52	3.236,82	737,70	Surplus	79,23%	20,77%
Bawang	4.952,60	6.485,03	- 1.532,43	Defisit	62,19%	37,81%
Kalibening	6.904,19	4.464,96	2.439,23	Surplus	84,25%	15,75%
Karangobar	2.773,96	3.038,04	- 264,08	Defisit	71,46%	28,54%
Madukara	3.528,50	4.434,90	- 906,40	Defisit	64,35%	35,65%
Mandiraja	4.387,04	6.666,71	- 2.279,67	Defisit	56,04%	43,96%
Pagedongan	6.115,53	4.194,15	1.921,38	Surplus	81,40%	18,60%
Pagentan	3.709,76	3.155,65	554,10	Surplus	78,33%	21,67%
Pandanarum	4.002,73	2.604,50	1.398,23	Surplus	84,43%	15,57%
Pejawaran	3.618,18	2.951,29	666,89	Surplus	75,91%	24,09%
Punggelan	8.466,70	7.702,13	- 764,58	Defisit	77,62%	22,38%
Purwanegara	6.261,28	7.491,95	- 1.230,67	Defisit	66,41%	33,59%
Purwareja Klampok	1.574,58	4.002,51	- 2.427,93	Defisit	34,35%	65,65%
Rakit	2.296,60	4.020,26	- 1.723,66	Defisit	47,38%	52,62%
Sigaluh	2.756,03	3.134,17	- 378,14	Defisit	69,23%	30,77%
Susukan	3.803,43	5.930,53	- 2.127,10	Defisit	53,07%	46,93%
Wanadadi	2.196,61	2.507,98	- 311,37	Defisit	66,90%	33,10%
Wanayasa	6.088,99	4.550,30	1.538,69	Surplus	82,96%	17,04%
Total	84.796,10	90.714,57	- 5.918,47	Defisit	71,19%	28,81%

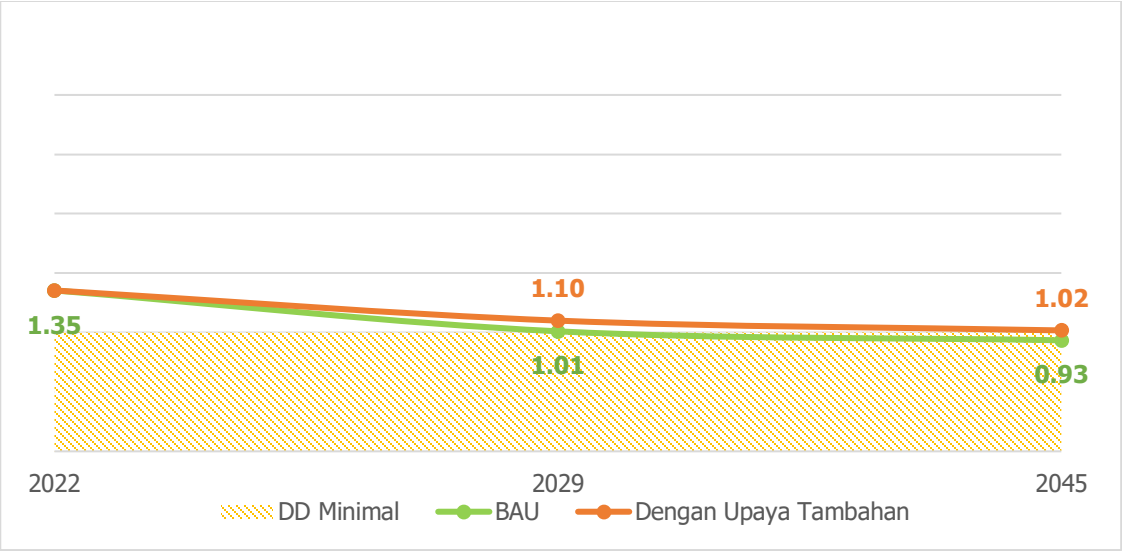
Berdasarkan tabel di atas, ketersediaan pangan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2045 sebesar 84.796,10 ton/tahun, sedangkan kebutuhan pangan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2045 sebesar 90.714,57 ton/tahun. Kondisi ini menyebabkan masih adanya selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan sebesar - 5.918,47 ton/tahun yang mana ini memberikan gambaran bahwa pada tahun 2045 Kabupaten Banjarnegara secara keseluruhan dalam keadaan defisit pangan. Akan tetapi walaupun secara keseluruhan status daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2045 terlampaui, secara luasan 71,19% wilayah Kabupaten Banjarnegara masih dalam keadaan belum terlampaui (surplus),

sedangkan hanya 28,81% wilayah yang memiliki status sudah terlampaui (defisit). Sedangkan jika dilihat per kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, terdapat 12 kecamatan yang memiliki status daya dukung pangan terlampaui (defisit). Hal ini terjadi dikarenakan jumlah ketersediaan pangan di kecamatan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk sehingga terjadi defisit pangan. Sedangkan 8 kecamatan lainnya masih memiliki status daya dukung pangan yang belum terlampaui (surplus) disebabkan ketersediaan pangannya yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.

Jika dilihat secara spasial, wilayah-wilayah yang memiliki status daya dukung pangan terlampaui berada di sekitar jalan raya Wonosobo-Banyumas yang mana jika dilihat pada kondisi jasa lingkungan hidup penyedia pangan relatif sangat tinggi. Defisit yang terjadi di kecamatan-kecamatan ini dikarenakan jumlah penduduk yang besar relatif besar dibandingkan dengan wilayah lainnya, dan produksi pangannya terbatas sehingga ketersediaannya tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk wilayahnya sendiri. Skenario untuk mempertahankan daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu dengan menggunakan pendekatan *business as usual* (BAU), ataupun dengan meningkatkan produktivitas lahan dan indeks penanaman padi di Kabupaten Banjarnegara. Berikut merupakan grafik pergerakan daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 dan 2045.

Tabel Skenario Daya Dukung Pangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2045

Uraian (ton/tahun)	2022	2029	2045
<i>Business As Usual</i> (BAU)			
Ketersediaan Pangan	104.652,20	84.796,10	84.796,10
Kebutuhan Pangan	77.268,82	83.921,10	90.714,57
Selisih	27.383,38	875,00	-5.918,47
Daya Dukung Pangan	1,35	1,01	0,93
Skenario Meningkatkan produktivitas lahan			
Ketersediaan Pangan	104.652,20	92.341,57	92.341,52
Kebutuhan Pangan	77.268,82	83.921,10	90.714,57
Selisih	27.383,38	8.420,46	1.626,95
Daya Dukung Pangan Skenario 1	1,35	1,02	1,10



Gambar Skenario Daya Dukung Pangan di Kabupaten Banjarnegara

Tabel dan diagram di atas merupakan hasil proyeksi perbandingan daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 dan 2045. Skenario dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan business as usual (BAU) yang mana diproyeksikan daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara turun menjadi 0,93. Sedangkan skenario selanjutnya yaitu dengan meningkatkan produktivitas lahan sehingga dapat menghasilkan padi dengan rata-rata 70 ton/ha serta meningkatkan indeks penanaman menjadi 3 kali dalam 1 tahun. Untuk mempertahankan atau meningkatkan daya dukung pangan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2045 dapat dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya adalah.

1. Pengendalian untuk memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - Penetapan dan perlindungan terhadap tata ruang terhadap LP2B sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Banjarnegara dan mempertahankan dan/atau meningkatkan indeks penanaman yang ada saat ini.
 - Revitalisasi untuk mengoptimalkan jaringan irigasi pada lahan sawah irigasi dan pembukaan jaringan baru pada lahan sawah tadah hujan atau pertanian lahan kering
2. Peningkatan tingkat rendeman dari Gabah Kering Panen menjadi Gabah Kering Giling
 - Pengaturan ketersediaan air yang tepat pada saat usia tanaman memasuki masa pengisian bulir
 - Pemberian unsur hara yang tepat dengan memberikan material organik yang lebih besar
 - Pengendalian hama dan penyakit untuk memastikan bulir padi tidak terganggu
 - Penggunaan varietas padi yang unggul agar hasil panen maksimal
 - Pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sesuai ciri fisiologisnya dan selanjutnya dilakukan pengeringan yang efektif
 - Penerapan metode penanaman padi yang efektif
3. Penurunan tingkat penyusutan saat penggilingan

- Memastikan tingkat GKG memiliki rendeman yang baik
- Perbaikan teknik pengolahan dalam penggilingan Gabah Kering Giling menjadi beras
- Efisiensi dalam pewadahan.

C. Wilayah Rawan Bencana

Jenis bencana alam di Kabupaten Banjarnegara yang rawan terjadi yaitu longsor, gas beracun, kekeringan, dan banjir. Daerah-daerah rawan bencana dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan longsor. Mayoritas wilayah di Kabupaten Banjarnegara merupakan kawasan/daerah rawan bencana longsor. Dari 20 kecamatan, yang daerahnya tidak termasuk kategori rawan longsor, yaitu Kecamatan Rakit, Wanadadi, Purwareja Klampok dan Banjarnegara.
- 2) Kawasan rawan gas beracun, meliputi:
 - Kecamatan Batur
 - Kecamatan Wanayasa
 - Kecamatan Pejawaran
- 3) Kawasan terdampak cuaca ekstrim, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel Kawasan Rawan Terdampak Cuaca Ekstrem

Kecamatan	Kelas Komponen Risiko			Kelas Risiko
	Bahaya	Kerentanan	Kapasitas	
Susukan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Purwareja Klampok	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Mandiraja	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Purwanegara	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Bawang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Banjarnegara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Sigaluh	Rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi
Madukara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Banjarmangu	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Wanadadi	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Rakit	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi
Punggelan	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
Karangkobar	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Pagentan	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah
Pejawaran	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Batur	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Wanayasa	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Kalibening	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Pandanarum			Sedang	
Pagedongan	Rendah	Sedang	Sedang	Rendah
Kab. Banjarnegara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

4) Kawasan termasuk rawan banjir, selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel Kawasan Rawan Banjir

Kecamatan	Kelas Komponen Risiko			Kelas Risiko
	Bahaya	Kerentanan	Kapasitas	
Susukan	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Purwareja Klampok	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Mandiraja	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Purwanegara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Bawang	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
Banjarnegara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Sigaluh	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Madukara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang
Banjarmangu	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Wanadadi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Rakit	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Punggelan	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
Karangkobar	-	-	Sedang	-
Pagentan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
Pejawaran	-	-	Sedang	-
Batur	-	-	Sedang	-
Wanayasa	Tinggi	Rendah	Sedang	Sedang
Kalibening	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
Pandanarum	-	-	Sedang	-
Pagedongan	Sedang	Rendah	Sedang	Sedang
Kab. Banjarnegara	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

Dalam Indeks Risiko Bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu. Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3)

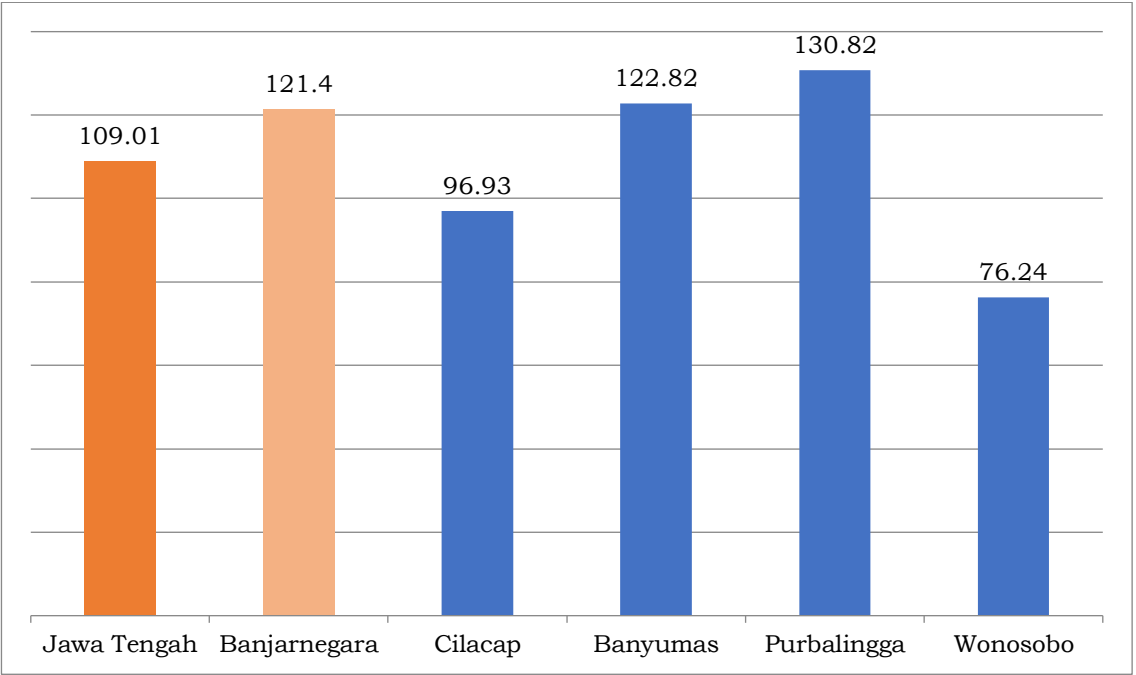
Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Indeks Resiko Bencana Kabupaten Banjarnegara selama 3 tahun terakhir secara kelas resiko mengalami penurunan, dari sebelumnya tinggi menjadi sedang selam 3 tahun berturut-turut, penurunan indeks resiko bencana adalah sebuah capaian yang baik, mengingat secara geografis Kabupaten Banjarnegara juga berada di daerah yang rawan terjadi bencana, tantangannya indeks resiko bencana tersebut harus bisa ditekan pada level yang rendah.

Tabel Indeks Resiko Bencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

Banjarnegara	2018	2019	2020	2021	2022	2023
IRB	150	150	127,36	127,36	61,54	121,4
Kelas Resiko	tinggi	tinggi	sedang	sedang	sedang	sedang
Peringkat	234	221	349	328	422	323

Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Resiko Bencana dengan wilayah sekitarnya pada tahun 2023, maka IRB Kabupaten Banjarnegara dengan IRB 121,4 berada pada posisi dibawah Kabupaten Purbalingga (130,82) dan Kabupaten Banyumas (122,82), namun masih diatas Kabupaten Cilacap (96,93) dan Kabupaten Wonosobo (76,24. Sedangkan IRB tertinggi di kawasan sekitarnya adalah Kabupaten Purbalingga dengan IRB (130,82). Dibandingkan dengan IRB Jawa Tengah, IRB Kabupaten Banjarnegara masih berada di atas Provinsi Jawa Tengah (109,01).



Gambar Posisi Relatif IRB Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Sekitarnya, dan Provinsi Jawa Tengah

D. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data tahun 2023 sebanyak 1.061.258 jiwa, terdiri dari 539.745 jiwa laki-laki dan 521.513 jiwa perempuan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa komposisi jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Data penduduk Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2023

Penduduk	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	510.671	516.192	521.256	524.380	529.443	530.054	539.745
Perempuan	491.727	494.853	501.247	505.348	510.565	512.264	521.513
Total	1.002.398	1.011.045	1.022.503	1.029.728	1.040.008	1.042.318	1.061.258

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 sejumlah 1.061.258 jiwa, yang berarti mengalami laju pertumbuhan sebesar 1,82% dari jumlah penduduk tahun 2022 yang sejumlah 1.042.318 jiwa. Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Banjarnegara lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan, terlihat dari jumlah penduduk laki-laki sejumlah 539.745 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sejumlah 521.513 jiwa, sehingga *sex ratio* penduduk Kabupaten Banjarnegara nilainya lebih besar dari 100 yaitu sebesar 103,50%. Tabel berikut ini menyajikan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio (%)
	L	P	Total	
Susukan	32.943	32.364	65.307	101,79
Purwareja Klampok	24.641	24.419	49.060	100,91
Mandiraja	41.730	40.835	82.565	102,19
Purwanegara	43.297	42.632	85.929	101,56
Bawang	33.344	32.685	66.029	102,02
Banjarnegara	35.673	35.373	71.046	100,85
Sigaluh	16.560	16.262	32.822	101,83
Madukara	23.940	23.071	47.011	103,77
Banjarmangu	24.303	23.176	47.479	104,86
Wanadadi	17.867	17.509	35.376	102,04
Rakit	28.498	27.910	56.408	102,11
Punggelan	47.023	44.789	91.812	104,99
Karangobar	17.008	15.909	32.917	106,91
Pagentan	20.488	19.526	40.014	104,93
Pejawaran	23.990	22.324	46.314	107,46
Batur	21.980	20.702	42.682	106,17
Wanayasa	26.773	25.098	51.871	106,67
Kalibening	24.796	23.742	48.538	104,44
Pandanarum	12.133	11.558	23.691	104,97
Pagedongan	22.758	21.629	44.387	105,22
Jumlah	539.745	521.513	1.061.258	103,50

Kecamatan Banjarnegara, Purwareja Klampok dan Rakit adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten

Banjarnegara dengan jumlah kepadatan penduduk 2.708 jiwa per km², 2.243 jiwa per km² dan 1.738 jiwa per km². Sementara itu kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Kalibening, Pagedongan dan Pandanarum yakni sebesar 579 jiwa per km², 551 jiwa per km² dan 405 jiwa per km². Secara umum tingkat kepadatan penduduk sebesar 992 jiwa/km², yang berarti bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, rata-rata dihuni oleh sekitar 992 jiwa. Berikut ditampilkan jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan.

Tabel Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2023

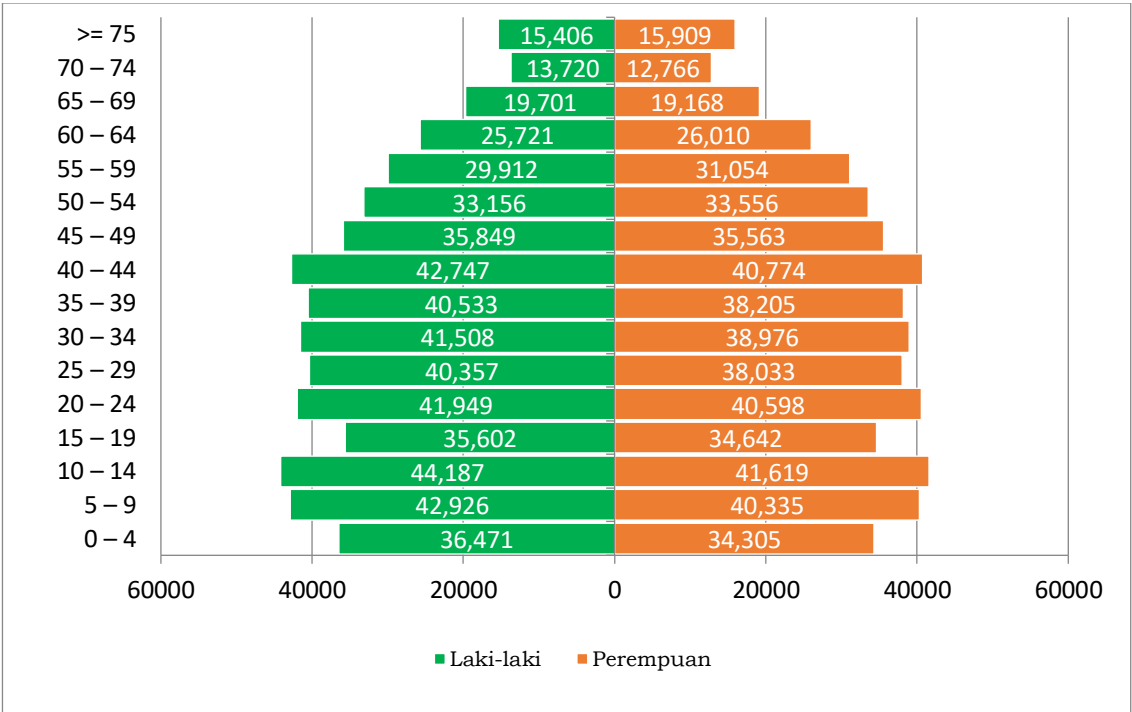
Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Susukan	52,66	65.307	1.240
Purwareja Klampok	21,87	49.060	2.243
Mandiraja	52,62	82.565	1.569
Purwanegara	73,87	85.929	1.163
Bawang	55,21	66.029	1.196
Banjarnegara	26,24	71.046	2.708
Sigaluh	39,56	32.822	830
Madukara	48,20	47.011	975
Banjarmangu	46,36	47.479	1.024
Wanadadi	28,27	35.376	1.251
Rakit	32,45	56.408	1.738
Punggelan	102,84	91.812	893
Karangkobar	39,07	32.917	843
Pagentan	46,19	40.014	866
Pejawaran	52,25	46.314	886
Batur	47,17	42.682	905
Wanayasa	82,01	51.871	632
Kalibening	83,78	48.538	579
Pandanarum	58,56	23.691	405
Pagedongan	80,55	44.387	551
Jumlah	1.069,73	1.061.258	992

Struktur Usia Penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 terlihat lebih ramping. Jumlah penduduk paling tinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebesar 85.806 jiwa (8,08%), sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk terendah ada pada kisaran usia 70-74 yaitu sebesar 26.486 jiwa (2,49%). Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2023

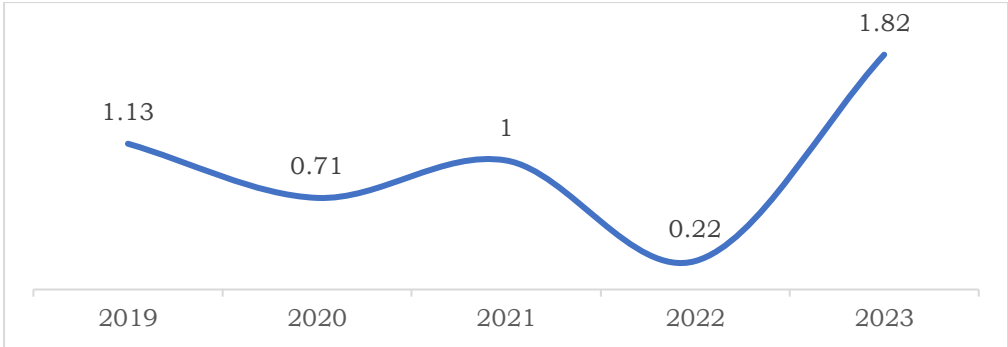
Kelompok Usia (tahun)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Total (jiwa)
	L	P	
0 – 4	36,471	34,305	70,776
5 – 9	42,926	40,335	83,261
10 – 14	44,187	41,619	85,806
15 – 19	35,602	34,642	70,244
20 – 24	41,949	40,598	82,547
25 – 29	40,357	38,033	78,390
30 – 34	41,508	38,976	80,484
35 – 39	40,533	38,205	78,738
40 – 44	42,747	40,774	83,521
45 – 49	35,849	35,563	71,412
50 – 54	33,156	33,556	66,712
55 – 59	29,912	31,054	60,966
60 – 64	25,721	26,010	51,731
65 – 69	19,701	19,168	38,869
70 – 74	13,720	12,766	26,486
>= 75	15,406	15,909	31,315
Jumlah	539,745	521,513	1,061,258

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjarnegara saat ini (semester 1 tahun 2023) sebesar 46,43% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur kependudukan di Kabupaten Banjarnegara mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini menuju pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai tenaga kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.



Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023

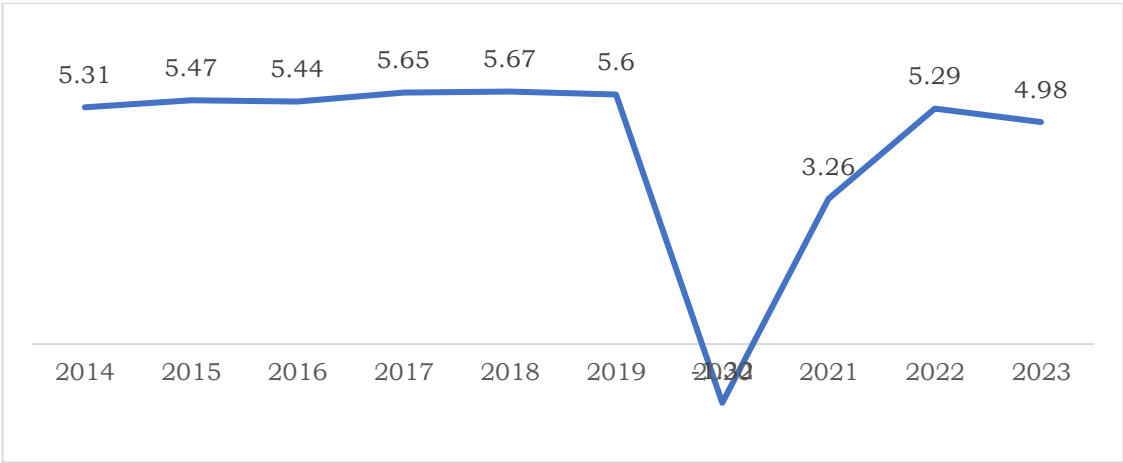
Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Peningkatan jumlah penduduk tidak serta merta dapat menjadi sebuah pertanda baik jika tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan. Jika dilihat laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara selama 10 tahun terakhir kondisinya cenderung mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan, hingga tahun 2023 pertumbuhan penduduk mencapai 1,82%.



Gambar Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

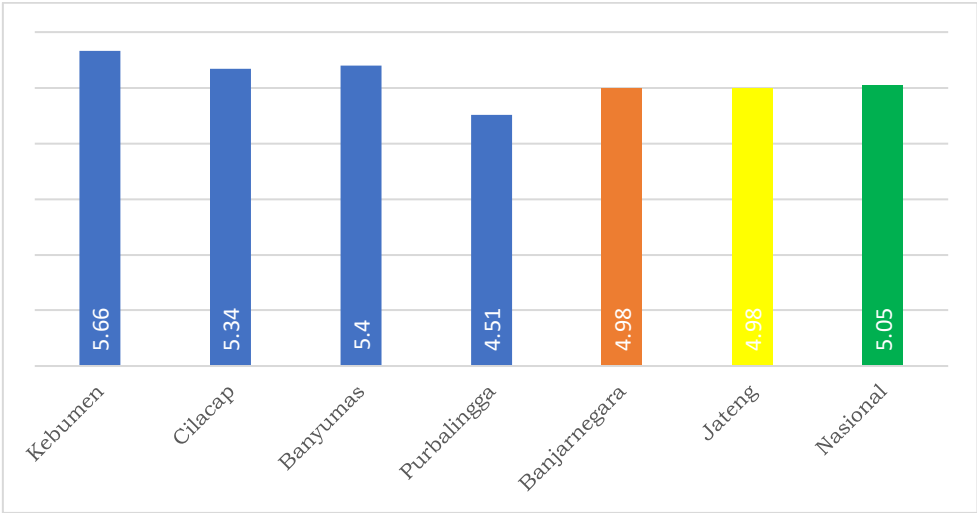
E. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui Pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara sempat mengalami penurunan yang begitu rendah pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak dari pandemi covid-19, namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara dapat tumbuh kembali pada tahun 2022.



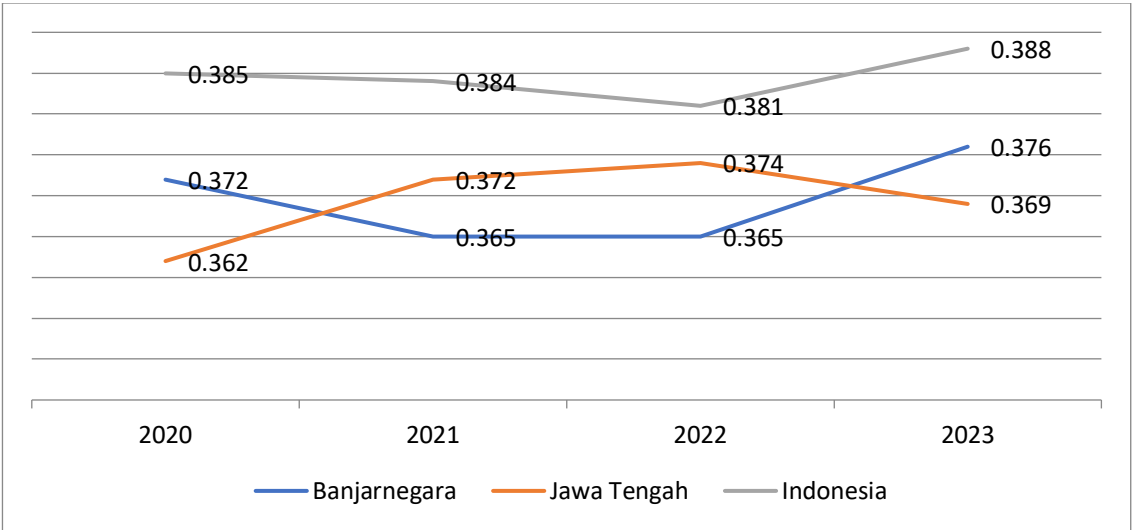
Gambar Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 – 2023

Meskipun pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan, namun capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang juga 5,05 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi terhadap Kabupaten/Kota sekitarnya Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga merupakan Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah.



Gambar Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Kawasan sekitarnya dan perbandingan dengan Jawa Tengah dan Nasional

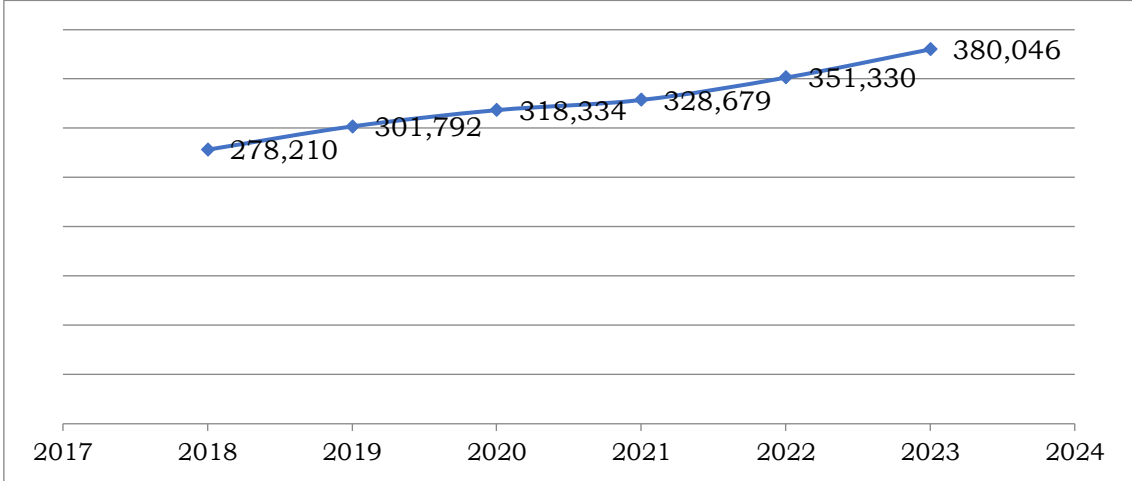
Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat melalui Indeks Gini (*gini ratio*), gini ratio merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Jika semakin tinggi indeks gini maka semakin tinggi ketimpangan pada suatu daerah, indeks gini Kabupaten Banjarnegara pada empat tahun terakhir cenderung menunjukkan fluktuatif, jika pada tahun 2020 Kabupaten Banjarnegara memiliki nilai indeks gini sebesar 0,372, maka pada tahun 2021-2022 menurun menjadi 0,365 namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,376, capaian ini juga masih lebih rendah dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,369 namun lebih tinggi dari capaian nasional sebesar 0,388.



Gambar Gini Ratio Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Pengukuran kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

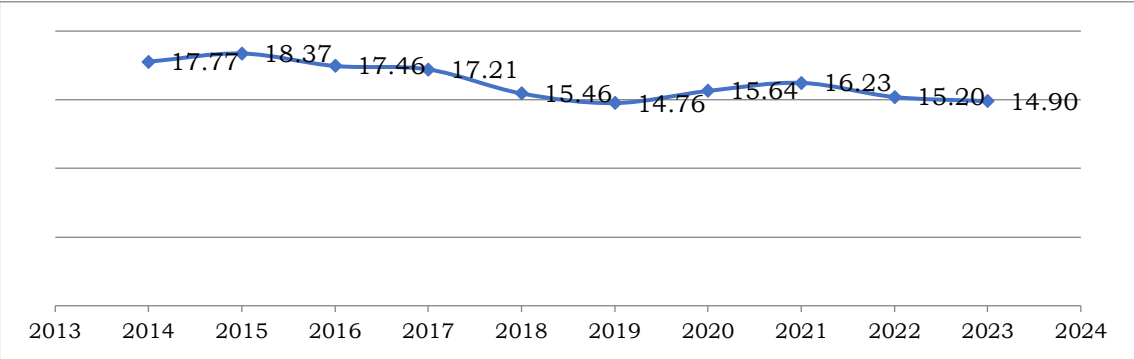
Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.



Gambar Garis Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara selama 10 tahun terakhir (2014-2023) dapat dikatakan mengalami penurunan, pada tahun 2014 persentase penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara tercatat sebesar 17,77%, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 14.90%. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin

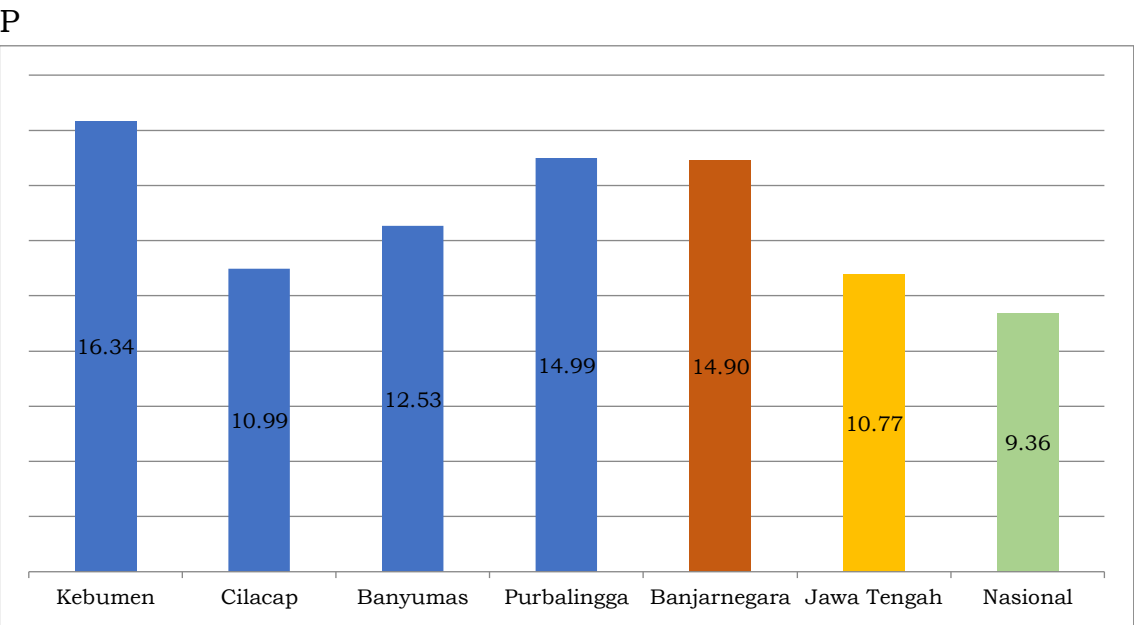
sebesar 14,76% (terendah selama 10 tahun), namun akibat adanya pandemi, kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya. Secara keseluruhan kurun 10 tahun terakhir terjadi penurunan kemiskinan sebesar 2,87%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 - 2023

Pada tahun 2023 persentase kemiskinan Kabupaten Banjarnegara merupakan tertinggi ketiga di kawasan Barlingmascakeb, setelah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga. Secara keseluruhan persentase penduduk miskin Kabupaten di Kawasan Barlingmascakeb berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

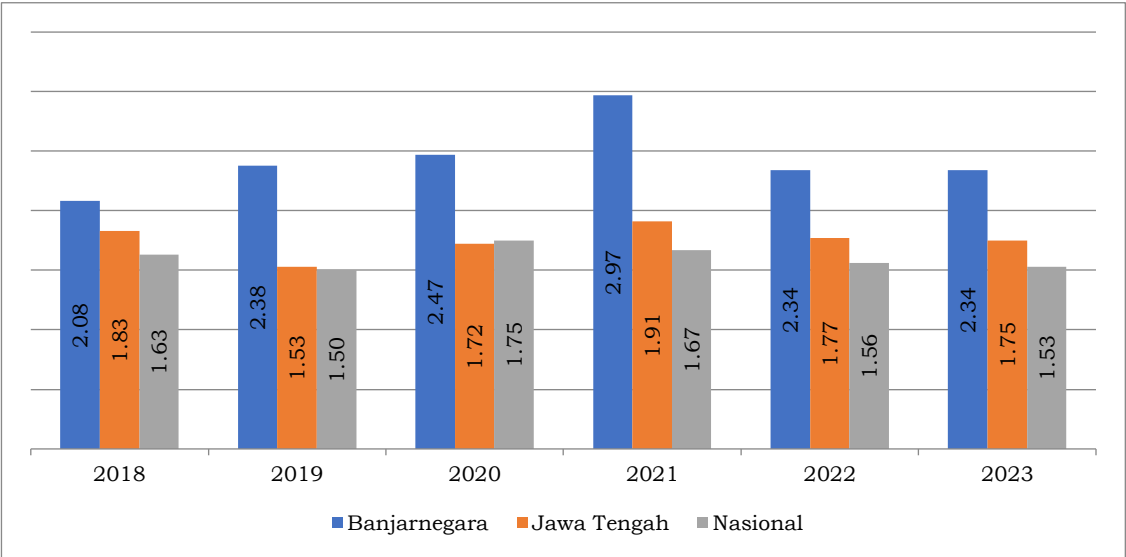
Gambar Persentase Jumlah Penduduk Miskin Di Kawasan Barlingmascakeb Tahun 2023



ersoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di mana semakin kecil angka indeks berarti rata-rata ketimpangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan juga semakin menyempit. Indeks Keparah

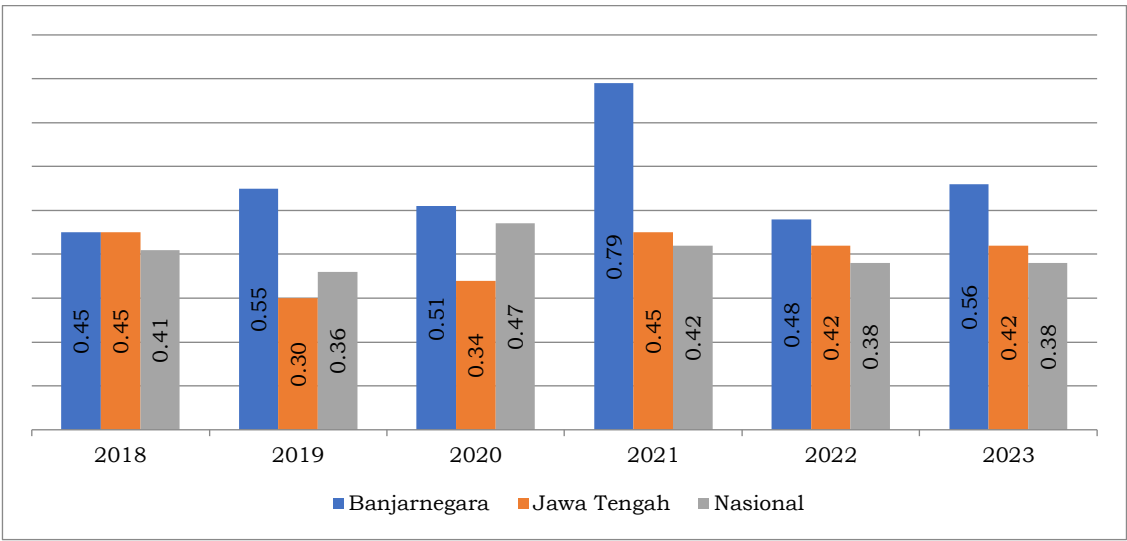
(P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama kurun waktu tahun 2018-2023 Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Banjarnegara cenderung fluktuatif (naik-turun). Pada tahun 2018 indeks kedalaman sebesar 2,08 kemudian naik lagi menjadi 2,38 tahun 2019 dan naik lagi menjadi 2,47 pada tahun 2020 kemudian naik lagi menjadi 2,97 pada tahun 2021 namun turun menjadi 2,34 pada tahun 2022-2023. Hal ini menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan tidak menentu terkadang kecil terkadang besar. Berdasarkan data statistik BPS Provinsi Jawa Tengah, posisi relatif indeks kedalaman (P1) Kabupaten Banjarnegara masih berada diatas indeks kedalaman provinsi (1,75) maupun nasional (1,53) dan termasuk kategori indeks kedalaman tinggi. Berikut ini disajikan perkembangan indeks kedalaman Kabupaten Banjarnegara disandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional kurun waktu 6 tahun dari 2018-2023 sebagai berikut:



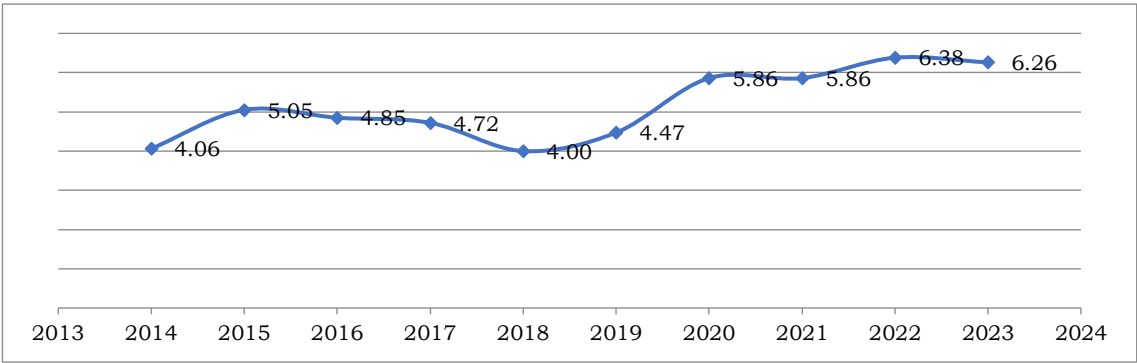
Gambar Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Sedangkan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2018-2023 juga mempunyai trend fluktuatif (naik-turun). Tahun 2018 indeks keparahan sebesar 0,45 kemudian naik menjadi 0,55 tahun 2019 namun turun menjadi 0,51 pada tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 0,79 tahun 2021 kemudian turun lagi menjadi 0,48 pada tahun 2022 kemudian naik lagi menjadi 0,56 pada tahun 2023. Berdasarkan data statistik BPS Provinsi Jawa Tengah, posisi relatif indeks keparahan (P2) Kabupaten Banjarnegara masih berada diatas indeks keparahan provinsi (0,42) maupun nasional (0,38) dan termasuk kategori indeks keparahan tinggi. Berikut ini disajikan perkembangan indeks keparahan Kabupaten Banjarnegara disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kurun waktu 6 tahun dari 2018-2023 sebagai berikut:



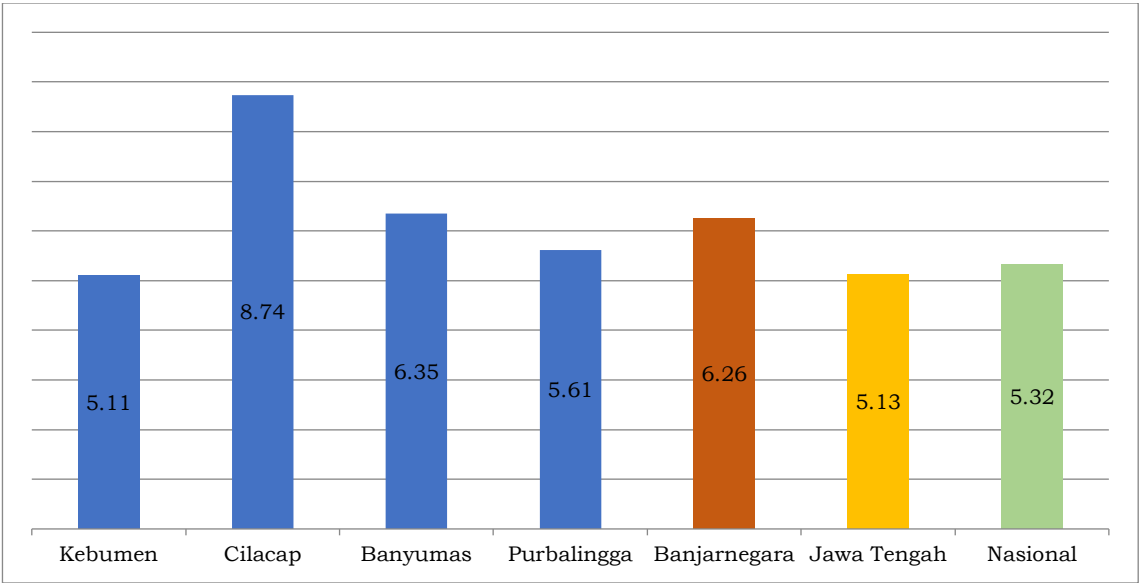
Gambar Indeks Keparahkan Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Tingkat pengangguran Terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Banjarnegara selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2014 berada diangka 4,06, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 6,26. Terjadi peningkatan sebesar 2,20 selama 10 tahun terakhir. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



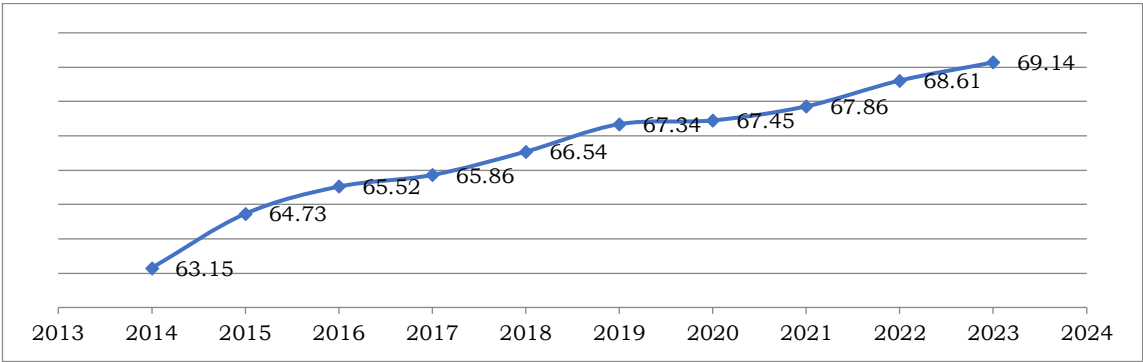
Gambar Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Jika dilihat posisi relatif dengan kawasan sekitarnya (Barlingmascakeb), Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 berada pada posisi tertinggi ketiga dengan 6,26%, setelah Kabupaten Cilacap dengan angka TPT sebesar 8,74% dan Kabupaten Banyumas dengan angka TPT sebesar 6,35%. Perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



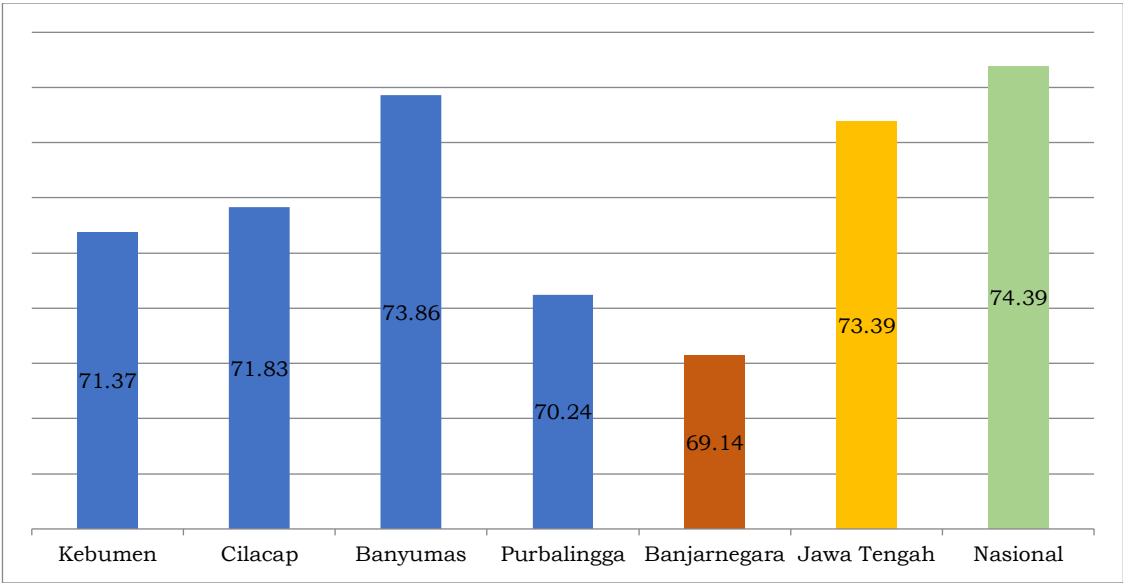
Gambar Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Sekitarnya, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2014-2023 mengalami trend kenaikan, dari posisi awal pada 2014 sebesar 63.15 dan pada tahun 2023 berada di angka 69,14, terjadi kenaikan 5,09 poin selama 10 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Capaian IPM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 - 2023

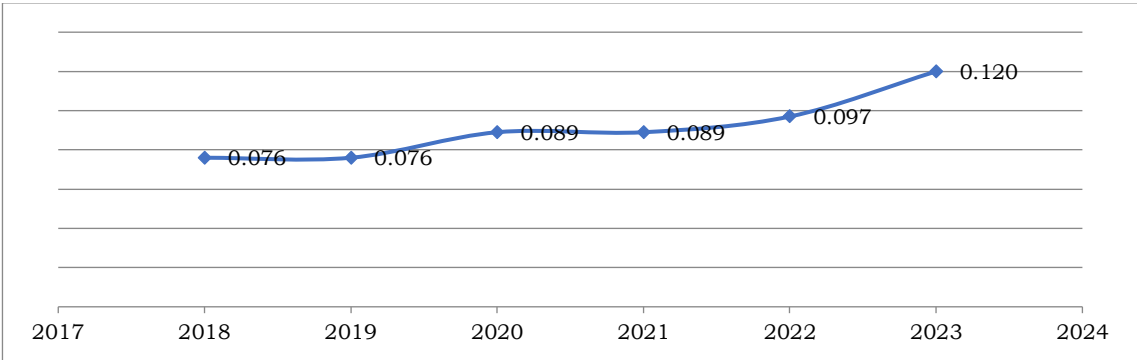
Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Banjarnegara dengan kawasan sekitarnya (Barlingmascakeb), Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 berada pada posisi terendah dengan 69,14 dibawah Kabupaten Banyumas (73,86), Kabupaten Cilacap (71,83), Kabupaten Kebumen 71,37 dan Kabupaten Purbalingga (70,24). Perbandingan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Perbandingan IPM Banjarnegara Dengan Kabupaten Sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

F. Kesejahteraan Sosial Budaya

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indeks keluarga sehat kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 2018-2023 cenderung mengalami kenaikan, pada tahun 2018 dan 2019 capaiannya sebesar 0,076, kemudian pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan menjadi 0,089, dan pada tahun 2023 menjadi 0,120. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

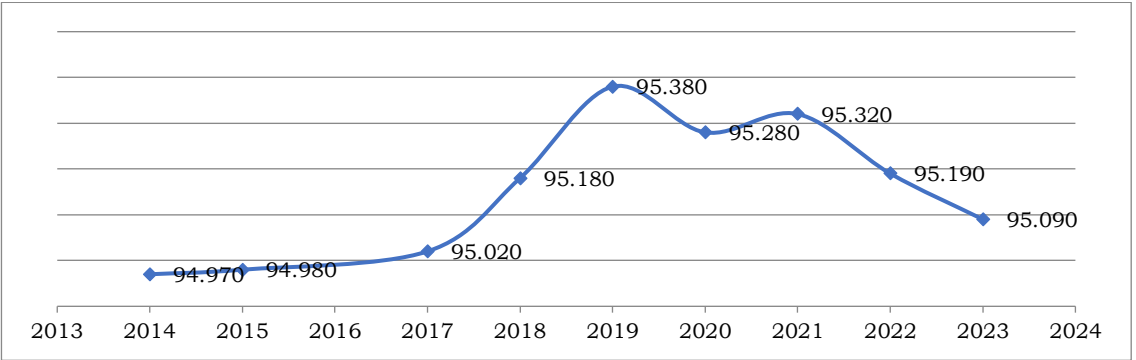


Gambar Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan. IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi

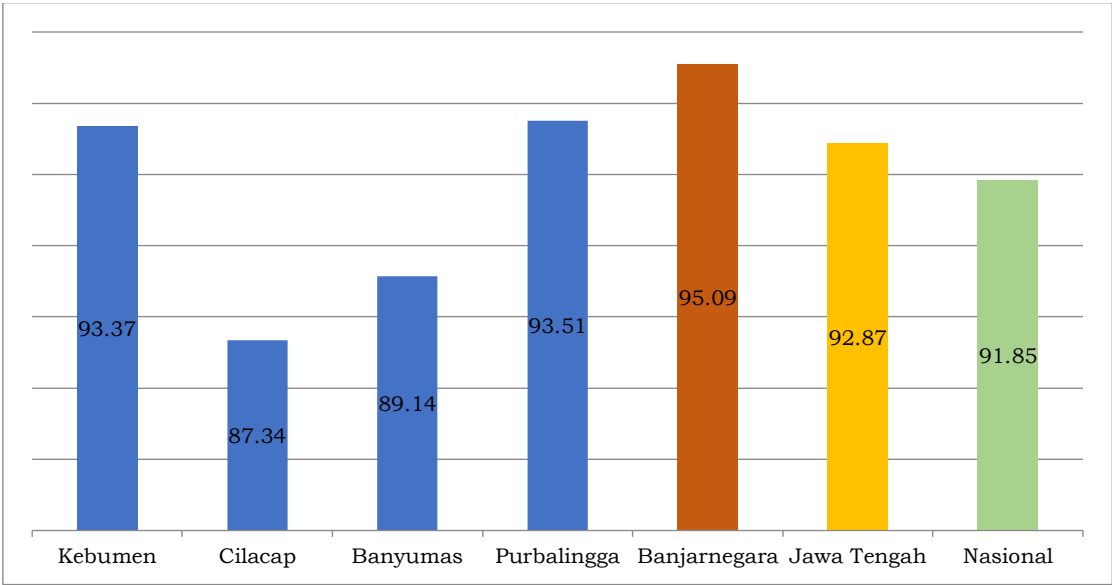
pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Capaian IPG Kabupaten Banjarnegara dalam 10 tahun cenderung mengalami peningkatan, ini artinya kesenjangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan kondisinya semakin kecil, meskipun capaian idealnya adalah di angka 100, namun capaian IPG Banjarnegara dapat dikatakan membaik. Kedepan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara masih memiliki tugas untuk menaikkan indeks Pembangunan Gender agar tidak terjadi ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan.



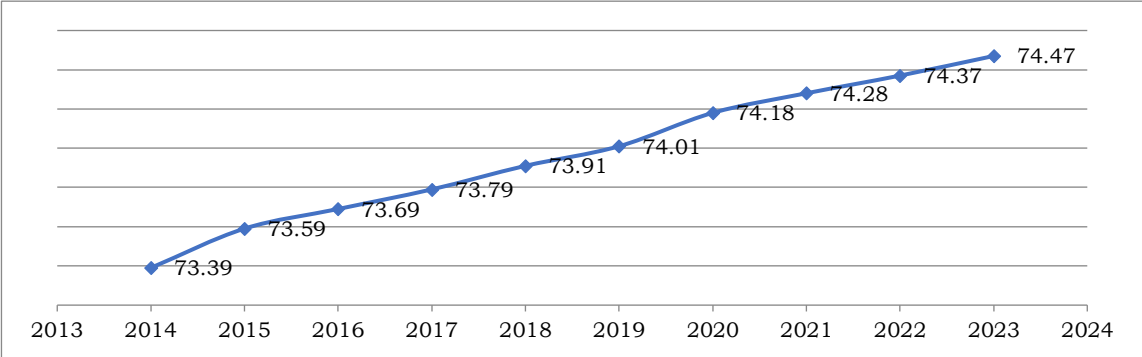
Gambar Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Sementara itu jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya (Barlingmascakeb) pada tahun 2023, IPG Kabupaten Banjarnegara merupakan tertinggi dibanding Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Kebumen, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kabupaten Banjarnegara lebih baik daripada kabupaten sekitarnya. Demikian pula jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, IPG Kabupaten Banjarnegara masih di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sehingga ke depan Kabupaten Banjarnegara perlu untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian IPG.



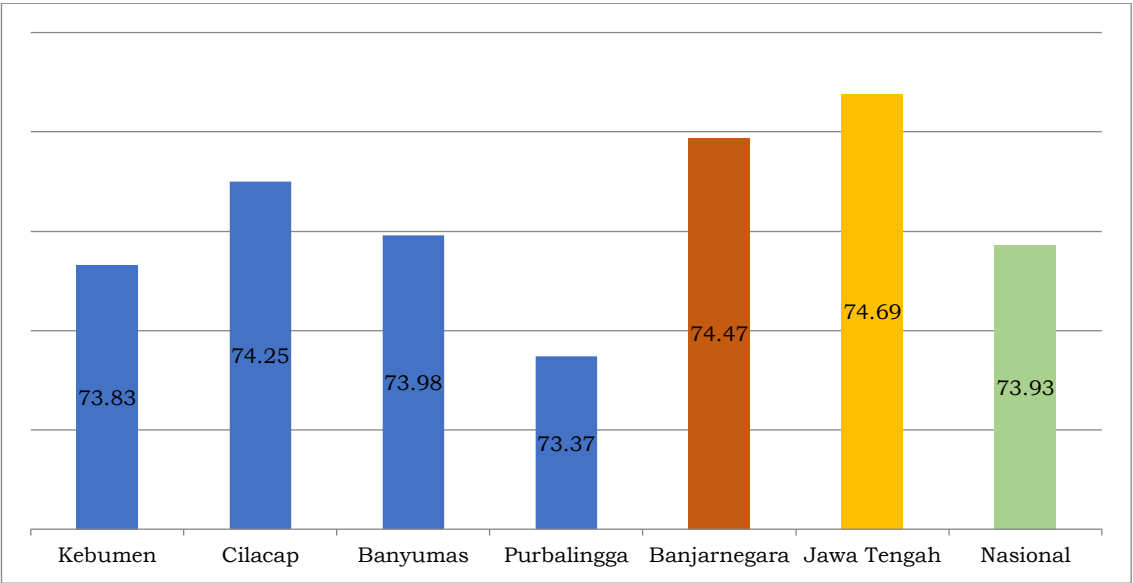
Gambar Perbandingan Indeks Pembangunan Gender Dengan Kabupaten Sekitarnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Angka Harapan Hidup saat lahir sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka harapan hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu tahun 2014-2023 capaiannya cenderung meningkat ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk terus membaik, namun dimasa yang akan datang secara khusus untuk periode perencanaan 20 tahun ke depan, pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, mengingat tantangan yang semakin beragam yang muncul pada saat ini.



Gambar Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Jika dibandingkan dengan kawasan sekitar (Barlingmascakeb), capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara merupakan yang tertinggi dari Kabupaten sekitarnya yaitu Cilacap di angka 74,25, Banyumas 73,98, Kebumen 73,83, Purbalingga 73,37, namun capaian tersebut masih di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah 74.69 dan Nasional 73,93. Selengkapanya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

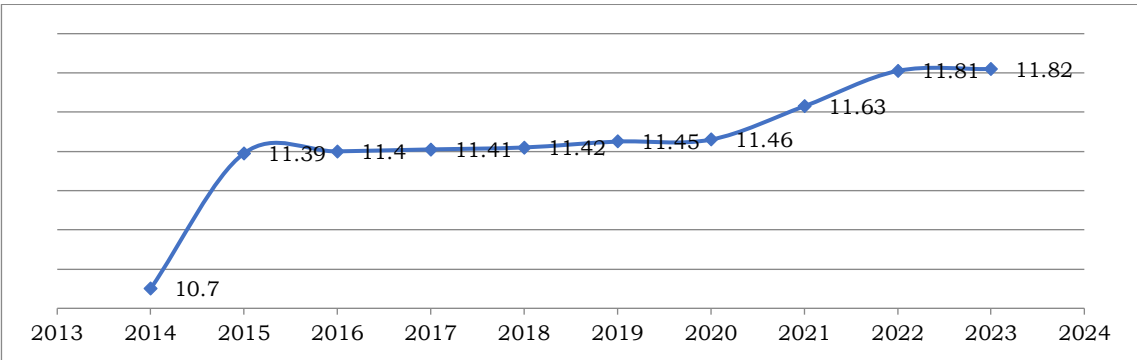


Gambar Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Nasional, Dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2023

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan

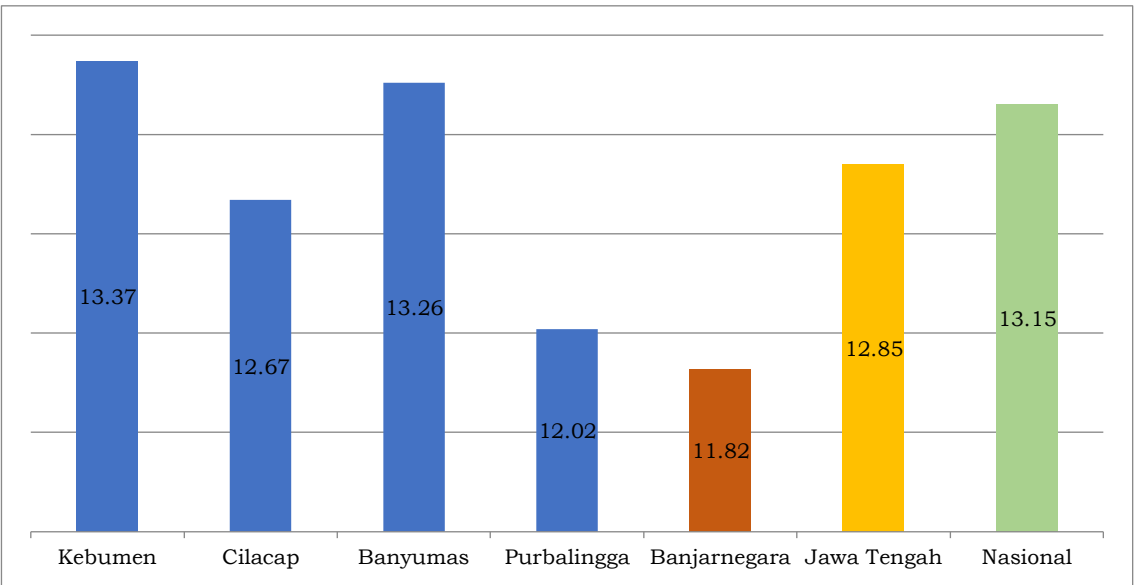
untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Capaian Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2014-2023 mengalami peningkatan yang signifikan, jika pada tahun 2014 angka HLS Kabupaten Banjarnegara berada pada 10,7 tahun (terendah selama 10 tahun terakhir) maka pada tahun 2023 capaian HLS di angka 11,82 tahun (tertinggi selama 10 tahun terakhir).



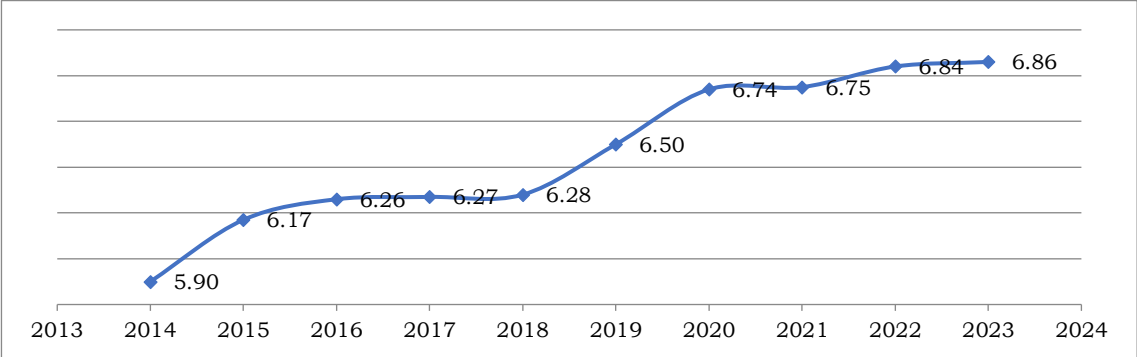
Gambar Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Jika dibandingkan dengan kawasan sekitarnya (Barlingmascakeb), Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, maka capaian HLS Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 dengan capaian 11,82 tahun berada pada posisi terendah, di bawah Kabupaten Kebumen 13,37 tahun, Banyumas 13,26 tahun, Cilacap 12,67 tahun, dan Purbalingga 12,02 tahun. Capaian Kabupaten Banjarnegara tersebut juga berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (12.85) dan Nasional (13.15). Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



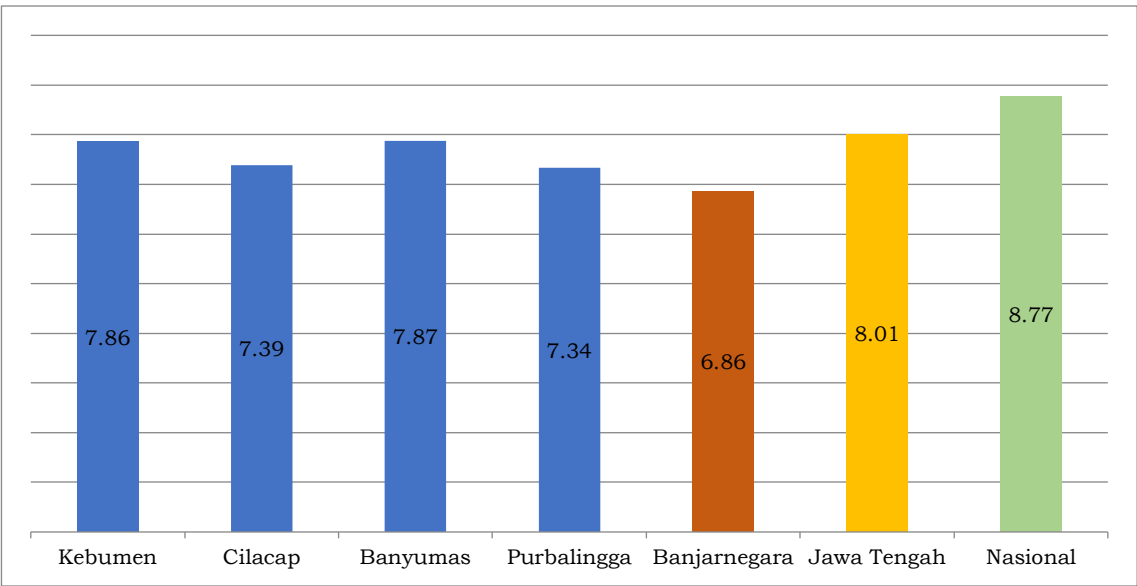
Gambar Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Dengan Daerah Sekitarnya, Jawa Tengah, Dan Nasional Tahun 2023

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2014-2023 mengalami peningkatan yang signifikan, jika pada tahun 2014 angka RLS Kabupaten Banjarnegara berada pada 5,90 tahun (terendah selama 10 tahun terakhir) maka pada tahun 2023 capaian HLS di angka 6,86 tahun (tertinggi selama 10 tahun terakhir). Secara umum terjadi peningkatan sebesar 0,96 tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



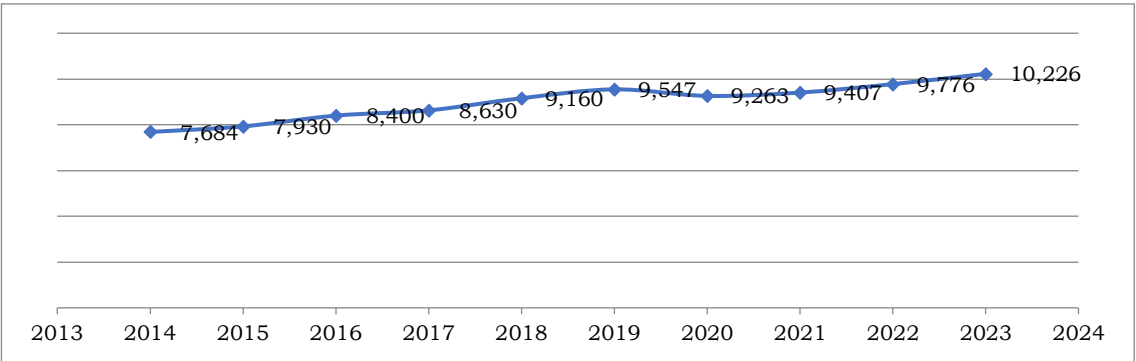
Gambar Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Jika dibandingkan dengan kawasan sekitarnya (Barlingmascakeb), Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, maka capaian RLS Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 dengan capaian 6,86 tahun berada pada posisi terendah, di bawah Kabupaten Kebumen 7,86 tahun, Banyumas 7,87 tahun, Cilacap 7,39 tahun, dan Purbalingga 7,34 tahun. Capaian Kabupaten Banjarnegara tersebut juga berada di bawah Provinsi Jawa Tengah 8,01 tahun dan Nasional 8,77 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



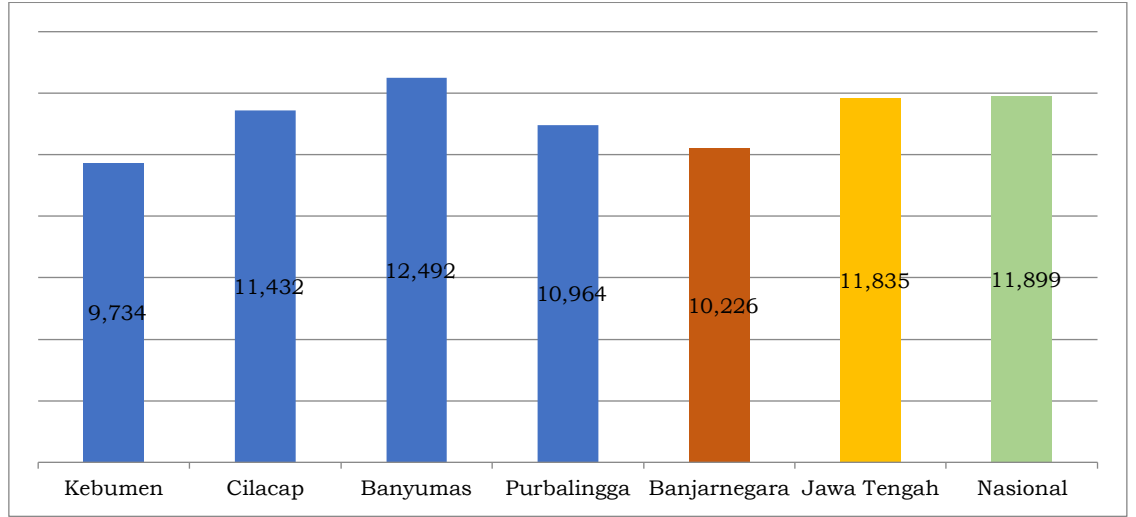
Gambar Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Sekitarnya, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023

Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kondisi Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Banjarnegara selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, jika pada tahun 2014 pengeluaran per kapita sebesar 7.684, maka pada tahun 2023 menjadi 10.226, secara keseluruhan terjadi peningkatan sebesar 2.542 selama 10 tahun. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

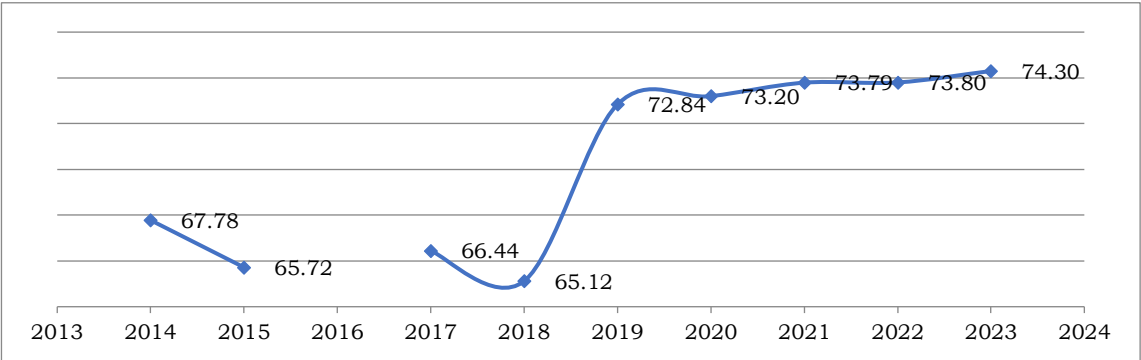
Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, pengeluaran per kapita Kabupaten Banjarnegara berada di posisi ke 4, setelah Kabupaten Banyumas dengan pengeluaran per kapita 12.492, Kabupaten Cilacap 11.432, Kabupaten Purbalingga 10.964, dan berada di atas Kabupaten Kebumen 9.734. Pengeluaran perkapita Kabupaten Banjarnegara juga masih dibawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.835 dan Nasional sebesar 11.899. selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Sekitarnya, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023

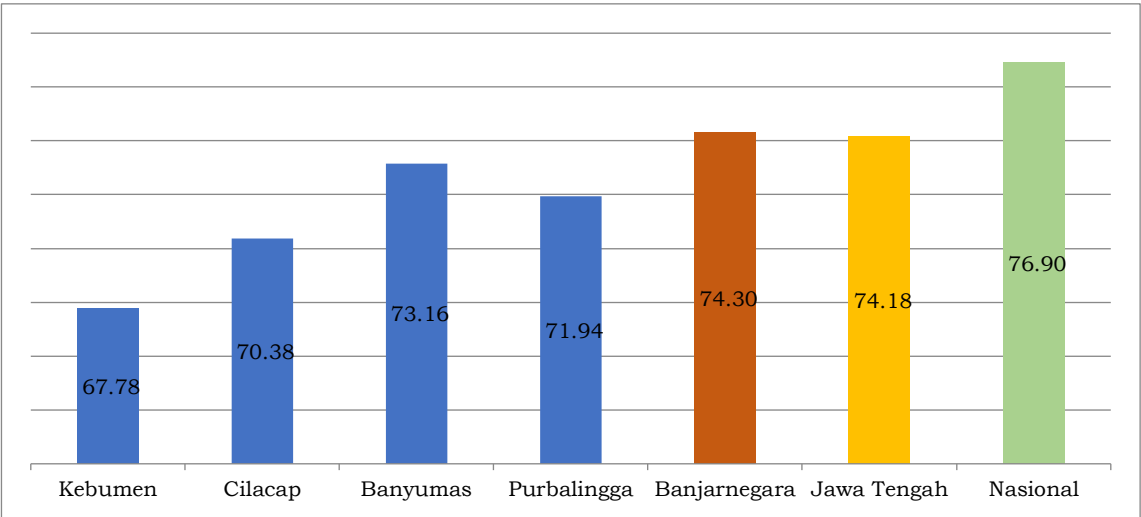
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan

perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Kondisi Indeks Pemberdayaan Gender IDG) Kabupaten Banjarnegara selama 10 tahun terakhir juga terbilang meningkat, dimana pada tahun 2014 capaian IDG sebesar 67,78 meningkat pada tahun 2023 menjadi 74,30, atau terjadi peningkatan sebesar 6,52 dalam kurun 10 tahun terakhir. Capaian IDG selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

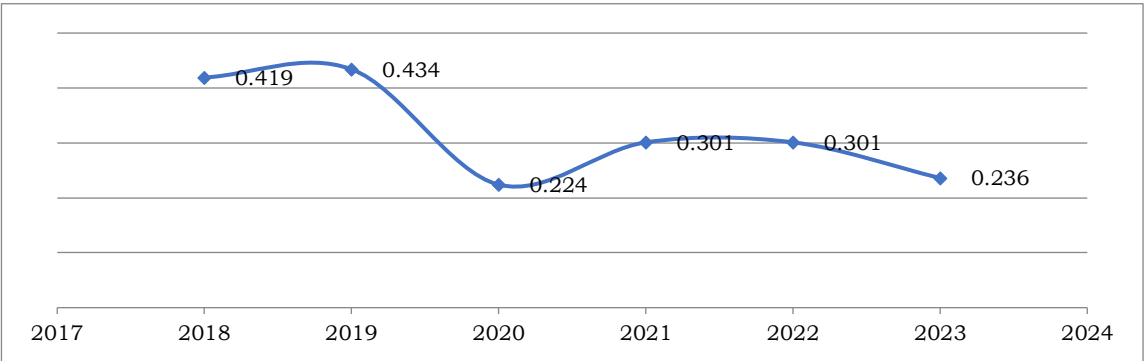
Sementara itu jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya (Barlingmascakeb) maka IDG Kabupaten Banjarnegara merupakan tertinggi diantara IDG Kabupaten lainnya, capaian IDG Kabupaten Banjarnegara juga berada di atas IDG Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,18, namun masih berada di bawah IDG Nasional sebesar 76,90, capaian selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender dengan Kabupaten Sekitarnya, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023

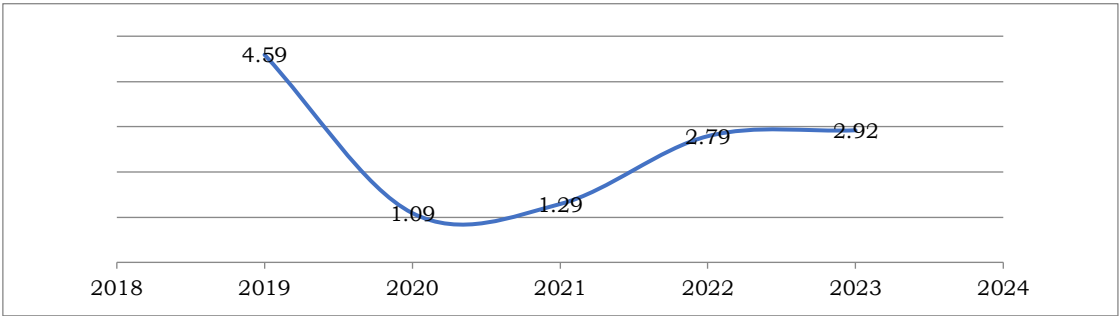
Indeks Ketimpangan Gender ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara selama rentang tahun 2018-2023 cenderung menurun, jika dilihat pada tahun 2018 capaiannya sebesar 0,419 maka

pada tahun 2023 capaiannya menurun menjadi 0,236. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

Indikator Pemanfaatan Perpustakaan (IPK) merupakan indikator proxy dari pembentuk komponen Indeks Pembangunan Kebudayaan pada dimensi budaya literasi. Indikator ini menggambarkan sejauhmana perpustakaan dimanfaatkan oleh penduduk. Indikator Pemanfaatan Perpustakaan di Kabupaten Banjarnegara kurun waktu 2019-2023 cenderung mengalami fluktuasi, capaian ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan bagi penduduk di Kabupaten Banjarnegara pada beberapa tahun terakhir mulai diperhatikan.



Gambar Indikator Pemanfaatan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

G. Daya Saing Ekonomi Daerah

PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). PDRB ADHB Kabupaten Banjarnegara selama rentang waktu tahun 2014-2023 kecenderungannya mengalami peningkatan, artinya bahwa kondisi ekonomi di Kabupaten Banjarnegara selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dilihat berdasarkan sektor, maka sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi paling tinggi, selanjutnya diikuti oleh industri pengolahan, kemudian perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor pendidikan. Demikian juga dengan PDRB ADHK memiliki kondisi yang sama dengan PDRB ADHB yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jika dilihat melalui tren peningkatan setiap tahunnya sudah cukup baik, namun pada beberapa sektor masih perlu dilakukan usaha secara intensif untuk meningkatkan pertumbuhannya, mengingat masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal di Kabupaten Banjarnegara, secara khusus pada periode 20 tahun mendatang, dimana masalah sudah semakin kompleks, diperlukan usaha-usaha kreatif untuk meningkatkan pertumbuhan dari masing-masing sektor yang ada.

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Kategori	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.723.851,56	5.132.035,05	5.437.913,00	5.601.474,02	5.931.266,92	6.305.575,79	6.633.209,89	6.820.726,72	7.390.017,41	7.782.905,46
B	Pertambangan dan Penggalian	860.797,01	1.005.113,99	1.074.928,07	1.147.174,93	1.259.727,22	1.269.251,85	1.299.990,77	1.369.122,36	1.321.381,44	1.387.692,38
C	Industri Pengolahan	1.965.168,00	2.245.661,11	2.479.960,05	2.766.723,78	3.023.574,63	3.281.804,29	3.289.309,43	3.552.554,81	3.931.621,07	4.460.446,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.063,37	4.730,70	5.693,00	5.997,73	6.511,04	6.952,98	7.051,80	7.407,60	7.728,40	8.361,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.199,03	6.519,23	6.960,63	7.327,34	7.674,80	8.190,53	8.808,15	9.413,40	9.662,32	10.194,52
F	Konstruksi	951.920,73	1.045.709,68	1.135.212,82	1.283.751,43	1.427.921,54	1.558.780,99	1.561.730,71	1.740.833,57	1.894.945,72	2.136.679,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.110.844,78	2.296.077,98	2.579.842,83	2.771.925,80	3.006.736,09	3.272.612,16	3.139.231,32	3.388.299,65	3.675.468,69	3.979.383,53
H	Transportasi dan Pergudangan	521.429,18	597.012,48	630.022,10	683.792,97	737.074,28	802.578,18	590.362,98	628.890,34	1.097.318,97	1.276.777,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	259.592,22	289.751,49	331.425,89	351.164,39	385.943,66	427.976,87	405.064,10	437.511,24	522.297,91	586.161,54
J	Informasi dan Komunikasi	353.997,81	386.386,31	417.274,56	496.808,13	555.607,83	628.685,72	701.396,75	744.064,30	763.134,05	850.272,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	404.916,12	447.370,90	501.883,80	548.813,67	593.478,93	618.392,92	631.068,10	672.127,18	734.153,11	767.435,36
L	Real Estate	221.454,95	244.125,39	264.302,59	288.532,83	312.478,91	332.041,26	332.017,81	342.573,82	363.855,93	392.728,97

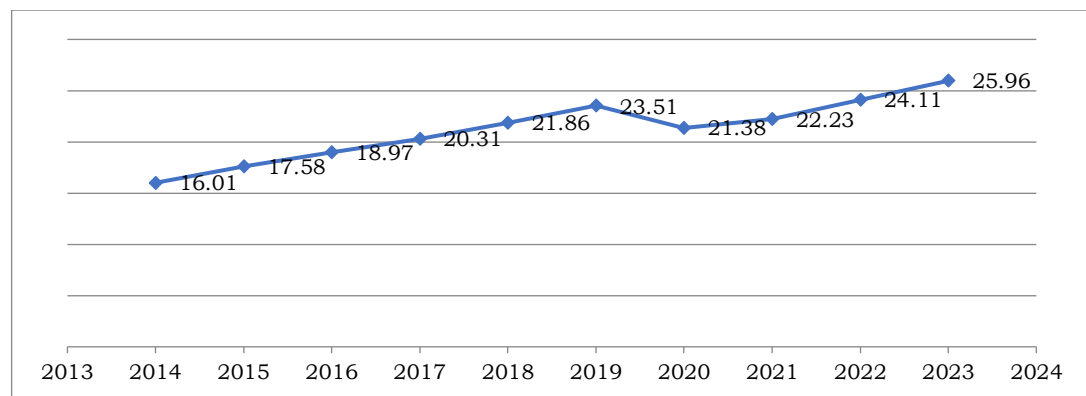
M,N	Jasa Perusahaan	51.325,44	58.532,28	63.437,61	70.732,40	78.353,32	90.183,31	85.739,38	89.601,75	98.987,49	110.081.41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	539.262,77	593.023,93	654.470,21	679.361,10	718.146,47	735.090,04	732.617,71	720.393,47	756.447,11	808.563.41
P	Jasa Pendidikan	883.758,08	966.723,02	1.069.440,60	1.187.851,62	1.315.588,62	1.457.260,31	1.480.564,68	1.497.093,93	1.534.556,89	1.650.475.71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177.605,81	198.491,67	216.787,90	242.737,82	268.837,01	293.633,78	320.317,35	323.720,35	335.191,37	362.209.63
R,S,T,U	Jasa lainnya	306.770,34	330.543,19	371.910,68	411.428,44	454.114,42	510.466,28	475.858,04	483.552,81	559.713,86	620.457.48
PDRB		14.342.957,21	15.847.808,40	17.241.466,35	18.545.598,40	20.083.035,69	21.599.477,26	21.694.338,97	22.827.887,30	24.996.481,74	27.190.827.81

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Kategori	Sektor	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.607.984,37	3.766.631,01	3.874.029,02	3.972.652,45	4.118.607,41	4.264.176,29	4.389.953,93	4.433.505,82	4.604.681,52	4.631.971.42
B	Pertambangan dan Penggalan	684.668,81	703.894,76	722.764,98	741.872,35	765.986,89	790.944,77	793.909,86	825.800,49	774.016,77	790.591.03
C	Industri Pengolahan	1.515.401,07	1.615.611,57	1.730.628,54	1.847.971,20	1.966.571,95	2.104.761,28	2.068.493,89	2.162.883,06	2.264.052,86	2.437.787.16
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3.947,19	4.337,34	4.612,69	4.850,17	5.108,55	5.433,41	5.550,55	5.857,97	6.081,01	6.513.68
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.884,21	5.982,50	6.204,31	6.523,78	6.835,96	7.133,53	7.292,20	7.703,93	7.794,62	8.137.60
F	Konstruksi	782.108,32	824.214,38	881.432,42	954.457,45	1.012.812,31	1.066.573,51	1.064.512,98	1.145.232,64	1.165.934,87	1.262.843.21
G	Perdagangan Besar dan	1.894.755,61	1.991.600,53	2.137.016,91	2.291.386,59	2.430.271,16	2.579.708,91	2.455.384,83	2.604.988,41	2.711.053,51	2.845.967.03

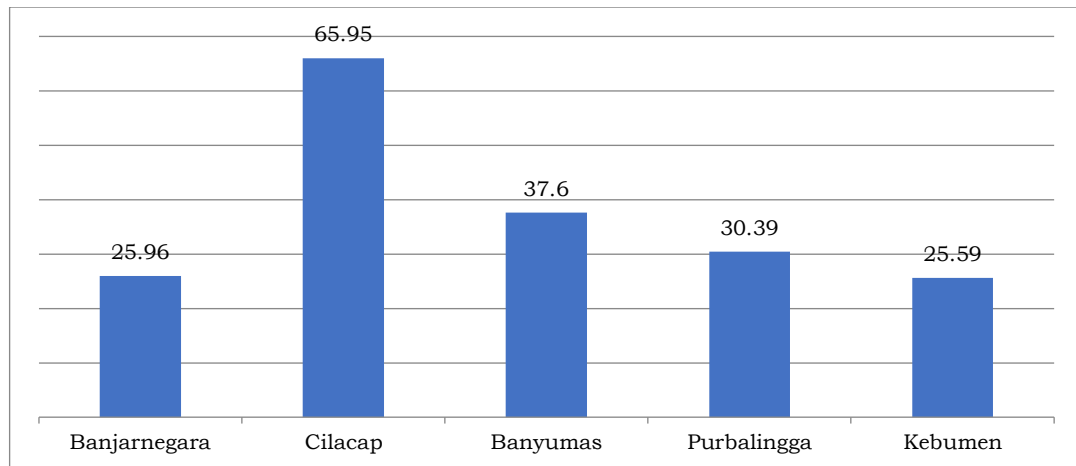
H	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
	Transportasi dan Pergudangan	482.858,74	521.415,65	549.888,99	586.261,70	626.653,63	670.732,58	477.709,93	492.243,16	810.935,87	874.395.34
	I										
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	228.407,80	244.768,88	264.743,49	286.187,09	311.433,82	339.823,97	318.745,54	338.014,11	387.676,16	439.153.24
	J										
	Informasi dan Komunikasi	374.989,03	414.921,46	448.052,67	515.851,36	578.668,73	642.841,16	716.460,88	759.427,64	777.491,65	864.899.13
	K										
	Jasa Keuangan dan Asuransi	326.656,09	345.503,37	370.661,40	391.798,94	406.491,83	420.078,32	429.239,83	435.228,33	437.220,78	447.461.46
	L										
	Real Estate	203.137,64	216.422,44	230.556,57	245.190,71	258.798,65	271.345,51	270.173,76	275.921,54	288.220,82	307.923.91
M,N	Jasa	43.524,49	47.264,41	49.814,92	52.725,04	57.507,70	63.507,12	59.105,08	60.926,84	64.552,51	69.102.23
	Perusahaan										
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	435.274,43	456.128,65	468.050,87	479.847,80	491.854,99	504.081,74	496.673,30	493.077,43	501.291,29	523.657.00
P	Jasa Pendidikan	629.152,47	675.462,44	724.477,39	774.645,35	838.809,95	902.906,52	897.457,01	897.860,63	913.086,45	973.407.96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	140.481,28	150.404,50	165.223,99	179.629,26	196.374,75	210.084,54	223.923,88	224.195,37	229.613,98	243.182.36
R,S,T,U	Jasa lainnya	270.614,30	281.482,47	304.725,69	331.415,41	365.361,46	402.732,50	371.297,54	373.610,54	415.401,89	446.457.86
	PDRB	11.629.845,85	12.266.046,35	12.932.884,85	13.663.266,65	14.438.149,74	15.246.865,66	15.045.884,99	15.536.477,91	16.359.106,40	17.173.451.62

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Adapun PDRB Perkapita Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2014-2023 kondisinya cenderung mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum meningkat, atau tingkat pendapatan meningkat selama 10 tahun terakhir. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.



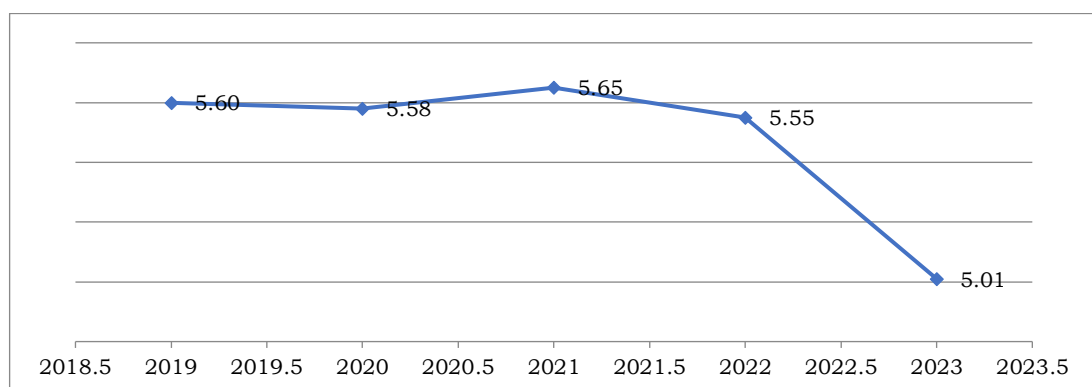
Gambar PDRB Per Kapita (dalam jutaan rupiah) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2023

Jika dilihat perbandingan PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten kawasan sekitarnya (Barlingmascakeb), maka PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara (25,96 juta) berada di posisi ke 4 setelah Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Purbalingga. PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara hanya lebih tinggi dari Kabupaten Kebumen (25,59).



Gambar Perbandingan PDRB (dalam jutaan rupiah) Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

Rasio Kewirausahaan adalah perbandingan populasi wirausaha terhadap populasi angkatan kerja. Populasi wirausaha adalah populasi wirausaha pemula ditambah populasi wirausaha mapan kemudian dibagi dengan populasi angkatan kerja. Rasio kewirausahaan Kabupaten Banjarnegara dalam 4 tahun terakhir memiliki pola kecenderungan menurun, secara makna kondisi ini menunjukkan capaian yang tidak baik. Penurunan ini menunjukkan bahwa wirausaha belum sepenuhnya diminati oleh populasi angkatan kerja, apalagi jika populasi angkatan kerja tersebut belum memiliki pekerjaan, tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk mengantisipasi lonjakan populasi angkatan kerja yang tidak bekerja. Kedepan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dapat memfasilitasi para angkatan kerja muda agar memiliki skill dan dapat berkontribusi dalam wirausaha.



Gambar Rasio Kewirausahaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

H. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari

data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 menegaskan bahwa IPLM menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perpustakaan. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Kabupaten Banjarnegara adalah sebesar 60,84, capaian selengkapnya dapat diperoleh pada tabel berikut ini.

Tabel Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2023

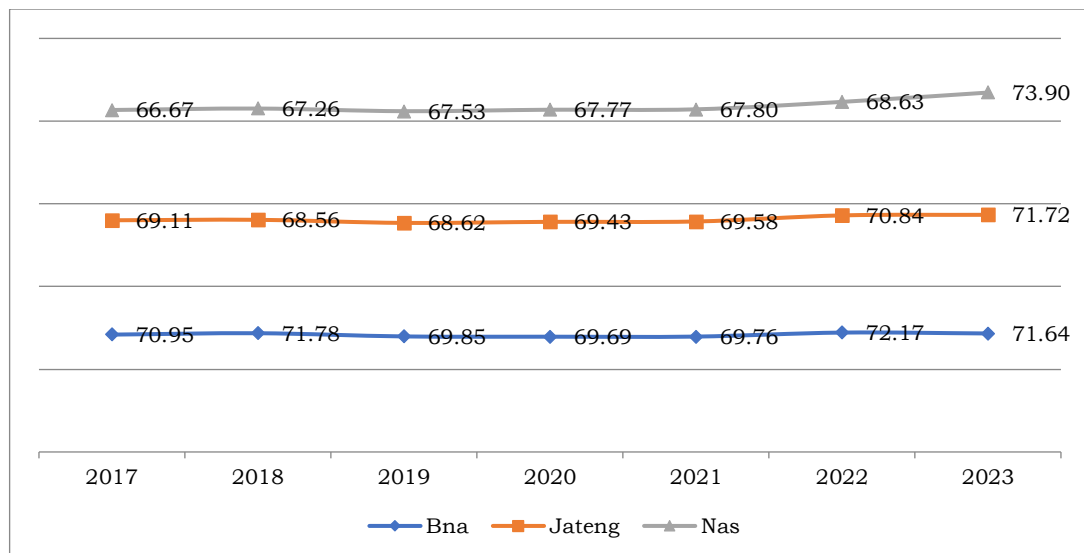
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT		60,84
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,5272
2	Pemerataan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,2979
3	Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,9555
4	Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4)	0,2254
5	Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5)	0,2530
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000
7	Jumlah Pemustaka (UPLM7)	1,0000

Indonesia kini memiliki jumlah pengguna internet setidaknya sebanyak 62,1% dari jumlah penduduk (BPS, 2021). Bahkan, jumlah masyarakat Indonesia yang mengakses internet terutama dari perangkat telepon genggam terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kemampuan masyarakat Indonesia dan kesempatan akses dalam media digital membawa pengaruh pada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi digital dengan adanya peningkatan jumlah pengguna loka pasar di Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia dan akan terus naik hingga 221 juta pengguna di tahun 2024 (Statista, 2022). Menurut UNESCO (2018), kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022). Pada indeks literasi digital yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah memiliki Indeks Literasi Digital yaitu 3,61, atau berada pada peringkat 4 secara nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Indeks Literasi Digital Provinsi Tahun 2021 dan 2022

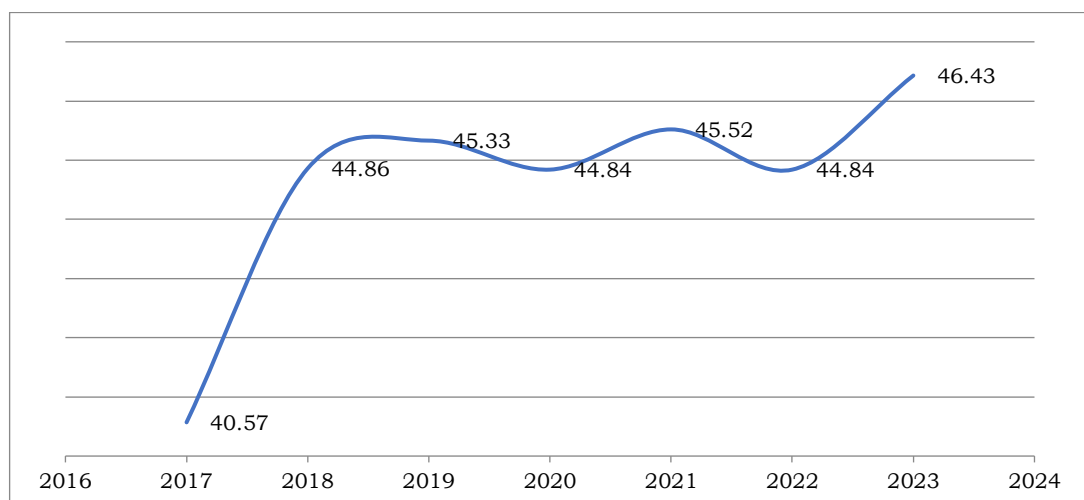
Peringkat	Tahun 2022		Tahun 2021	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,64	DI Yogyakarta	3,71
2	Kalimantan Barat	3,64	Kepulauan Riau	3,68
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Papua Barat	3,62	Sumatra Barat	3,61
5	Jawa Tengah	3,61	Gorontalo	3,61
6	Kalimantan Tengah	3,60	Papua Barat	3,61
7	Jawa Barat	3,60	Nusa Tenggara Timur	3,60
8	DKI Jakarta	3,59	Kalimantan Barat	3,58
9	Kep. Riau	3,59	Aceh	3,57
10	Jawa Timur	3,58	Kalimantan Utara	3,57
11	Sulawesi Tenggara	3,57	Sulawesi Barat	3,57
12	Papua	3,55	Kepulauan Bangka Belitung	3,57
13	Bengkulu	3,55	Jawa Timur	3,55
14	Maluku	3,54	Sulawesi Utara	3,53
15	Jambi	3,54	Lampung	3,52
	Skor Indeks 2021	3,54	Skor Indeks 2022	3,49

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Kondisi TPAK di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2017-2023 capaiannya fluktuatif, pada tahun 2017 TPAK Kabupaten Banjarnegara sebesar 70,95 persen, sedangkan capaian terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 69,69 persen, capaian tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 72,17 persen. Jika dilihat berdasarkan capaian awal pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 0,69 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah TPAK Kabupaten Banjarnegara berada di bawah TPAK Provinsi Jawa Tengah, demikian juga dengan capaian Nasional, dimana capaian TPAK Banjarnegara berada di atas nasional. Untuk melihat capaian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2023

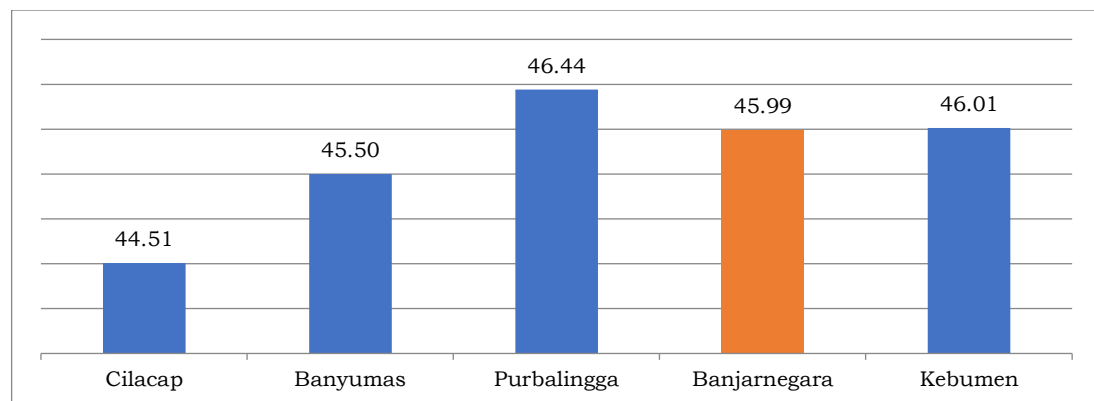
Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan penduduk usia tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk usia produktif). Rasio ketergantungan (*Dependency Ratio*) penduduk Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2017-2023 cenderung mengalami kenaikan, yang artinya jika *dependency ratio* semakin tinggi maka semakin tinggi pula beban penduduk produktif untuk menanggung usia non produktif.



Gambar Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2023

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya maka angka ketergantungan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 merupakan terendah ketiga setelah Kabupaten Cilacap sebesar

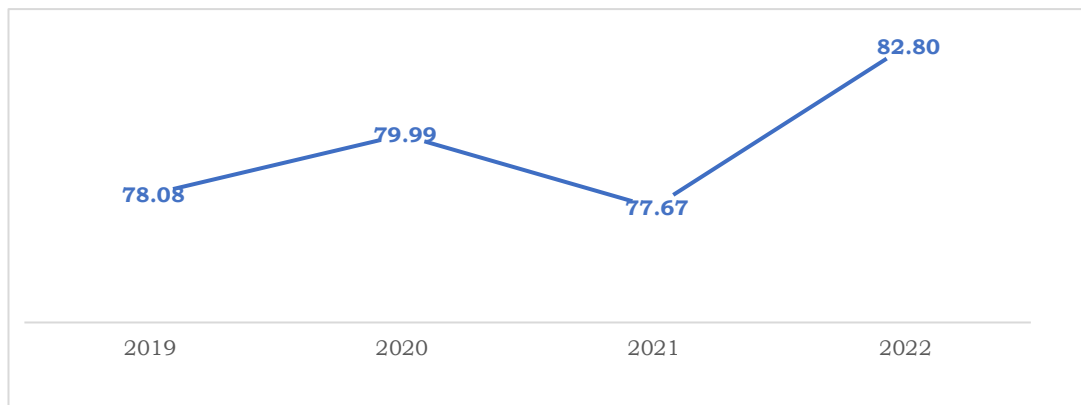
44,51 dan Kabupaten Banyumas 45,50, sedangkan angka ketergantungan tertinggi adalah Kabupaten Purbalingga dengan 46,44.



Gambar Perbandingan Angka Ketergantungan Kabupaten Banjarnegara dan sekitarnya Tahun 2023

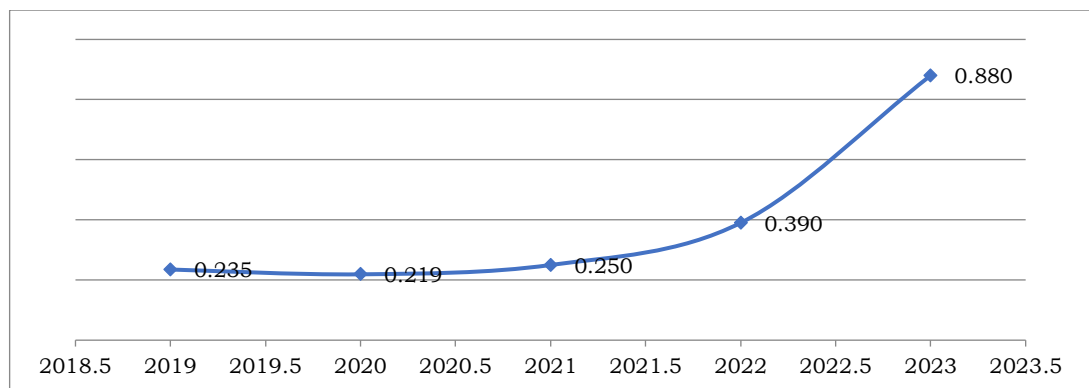
I. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur daerah merupakan komponen penting dalam mendukung daya saing daerah. Konektivitas antarwilayah dapat meningkatkan secara signifikan perekonomian daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing daerah. Sampai tahun 2023, kondisi kemantapan jalan di kabupaten Banjarnegara masih sebesar 85,34%. Sementara untuk pemenuhan sarana prasana jalan masih di angka 40,01%. Untuk infrastruktur perekonomian, kondisi pasar yang memadai masih memprihatinkan, sehingga belum dapat mengakomodir seluruh aktivitas perdagangan masyarakat. Indeks Infrastruktur merupakan salah satu komponen *city development Index* (CDI) yang menilai kinerja kabupaten/kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik. Indeks infrastruktur Kabupaten Banjarnegara sepanjang tahun 2019-2022 terbilang fluktuatif, jika pada tahun 2019 capaiannya sebesar 78,08 maka pada tahun 2020 capaiannya mengalami peningkatan menjadi 79,99, kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 77,67, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi 82,80. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Gambar Indeks Infrastruktur Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2022

Rasio Rumah layak Huni di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari tahun 2019 sebesar 0,235% meningkat menjadi 0,88% pada tahun 2023. Berikut ini disajikan perkembangan Rasio Rumah layak Huni selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 sebagai berikut:

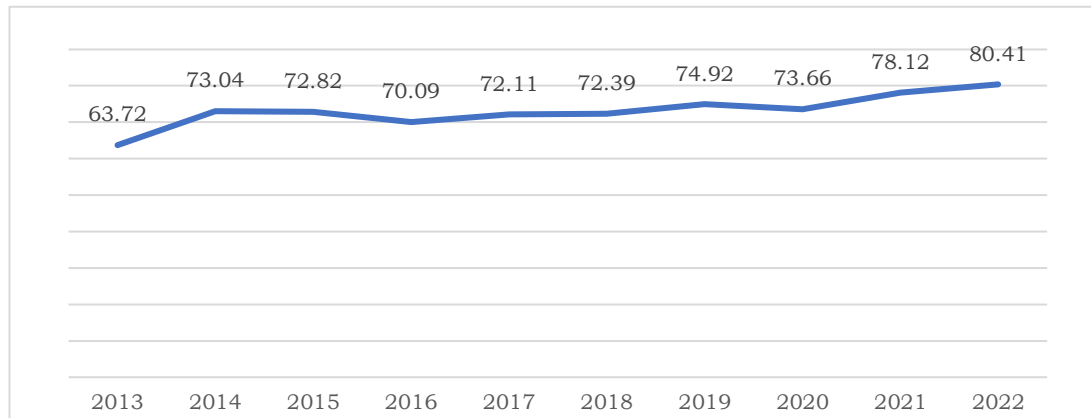


Gambar Perkembangan Rasio Rumah layak Huni di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

J. Daya Saing Iklim Investasi

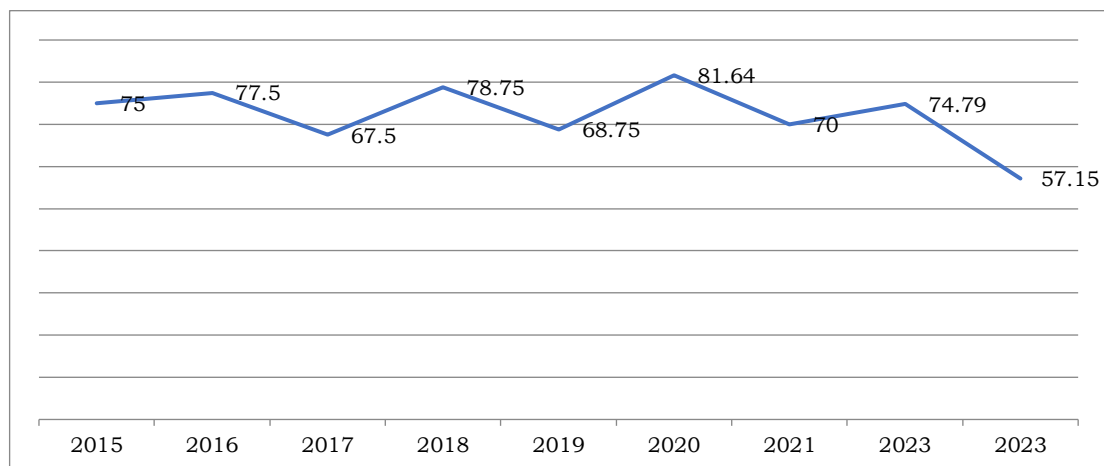
Indeks Demokrasi adalah alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Dalam kurun 10 tahun terakhir indeks demokrasi Indonesia capaiannya cenderung meningkat, meningkatnya capaian indeks demokrasi Indonesia ini mengindikasikan proses demokrasi yang berlangsung cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya, tingginya indeks demokrasi merupakan capaian yang baik dan perlu dipertahankan bahkan

ditingkatkan capaiannya, secara umum pada periode 20 tahun ke depan.



Gambar Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2013-2022

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2015-2023 memiliki kecenderungan fluktuatif, sejatinya indeks ketentraman dan ketertiban seharusnya mengalami peningkatan dan posisi yang stabil, jika terjadi fluktuasi mengindikasikan terdapat gejolak pada daerah tersebut, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 20 tahun kedepan tentunya memiliki tugas yang berat untuk memastikan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Banjarnegara tetap terjaga dengan baik, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik.

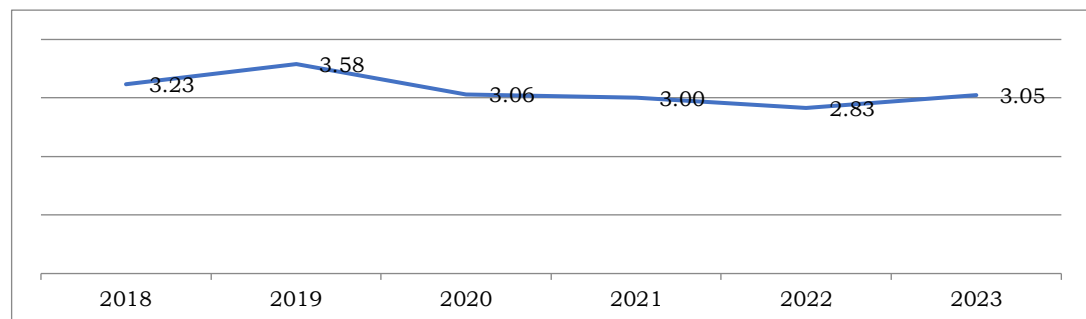


Gambar Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2023

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Kerangka pengukuran IDSD 2023 mengacu pada global competitiveness index

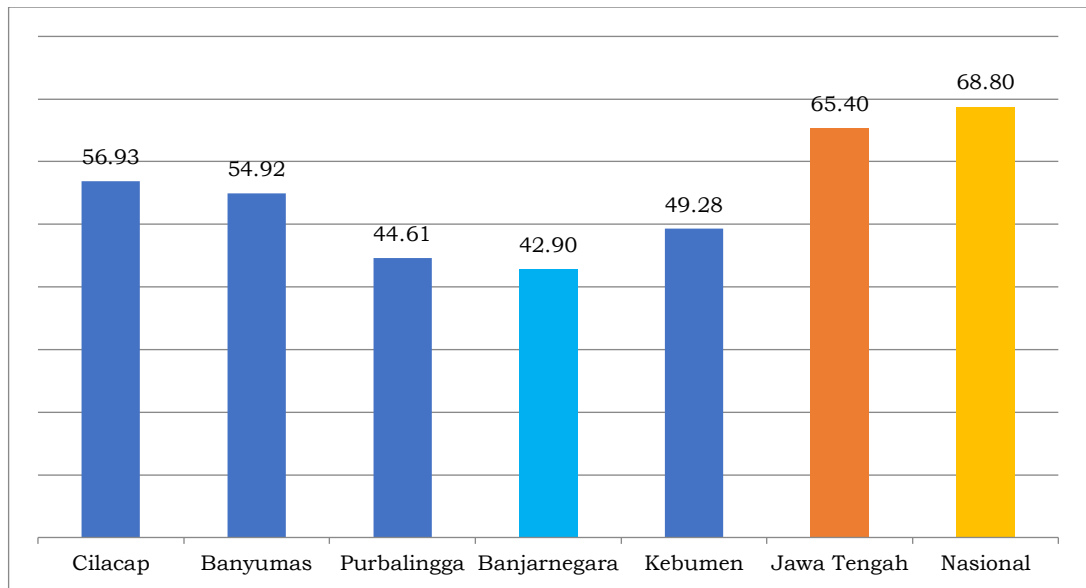
(GCI) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Tujuan pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah (BRIN, 2023).

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Banjarnegara selama 6 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, data tersebut menggambarkan kondisi yang kurang baik. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan rendahnya indeks daya saing daerah, yaitu dukungan dari 12 pilar (institusi, infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Kabupaten Banjarnegara sendiri memiliki capaian yang kurang maksimal di beberapa pilar yaitu, infrastruktur, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi yang angkanya masih jauh dari capaian Kabupaten sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah secara umum, menyebabkan angka indeksnya menurun. Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan lama sekolah dan harapan sekolah cenderung lambat sehingga belum bisa memberikan kontribusi yang optimal dalam pembentukan indeks daya saing. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berakibat pada rendahnya kapasitas inovasi.



Gambar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

Indeks daya saing Kabupaten Banjarnegara jika dibandingkan dengan Kabupaten lainnya juga menunjukkan capaian yang paling rendah, sehingga pada masa yang akan datang diperlukan usaha lebih agar daya saing di Kabupaten Banjarnegara bisa memiliki indeks yang lebih baik dan menjadi daerah yang semakin maju, mengingat tantangan pembangunan daerah yang akan dihadapi pada 20 tahun mendatang semakin berat. Sehingga untuk menaikkan skor indeks daya saing daerah ke depan (20 tahun mendatang), Kabupaten Banjarnegara harus fokus memperbaiki, infrastruktur, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi.

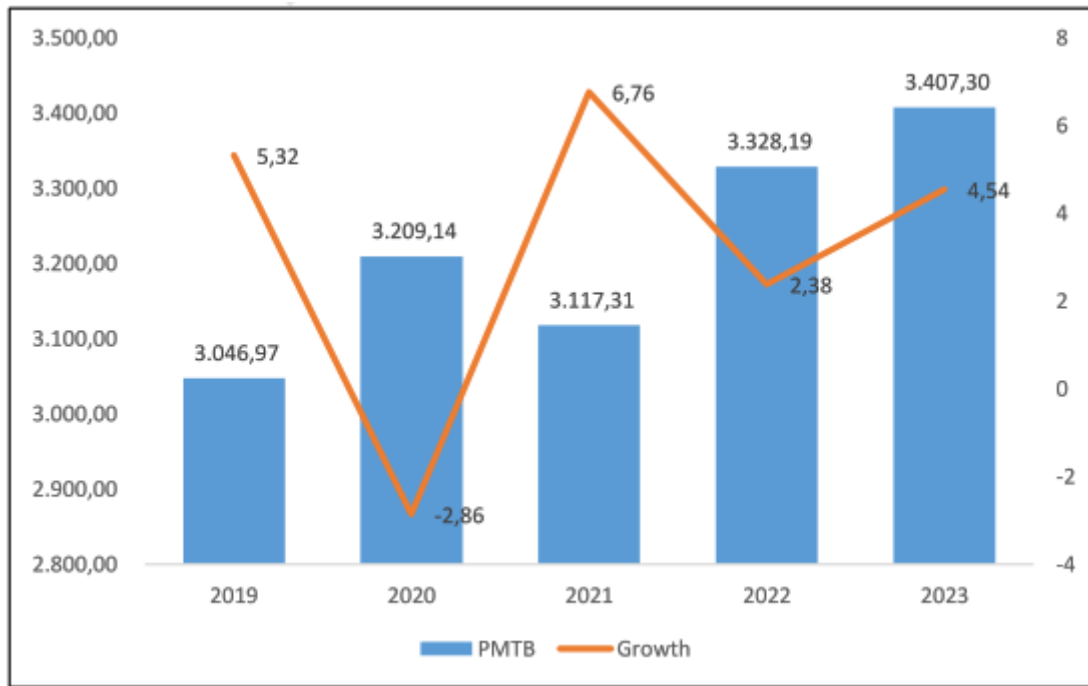


Gambar Posisi Relatif Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2023

Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 angka ICOR Banjarnegara per tahun relatif pada angka 3-4, kecuali pada tahun 2020-2021. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan di Banjarnegara relatif efisien atau aktivitas ekonomi yang berkembang di Banjarnegara cenderung bersifat *capital intensive*. Nilai ICOR pada tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengindikasikan bahwa perekonomian Banjarnegara semakin tidak efisien. Pada tahun 2019-2023 rata-rata ICOR tercatat 4,82.

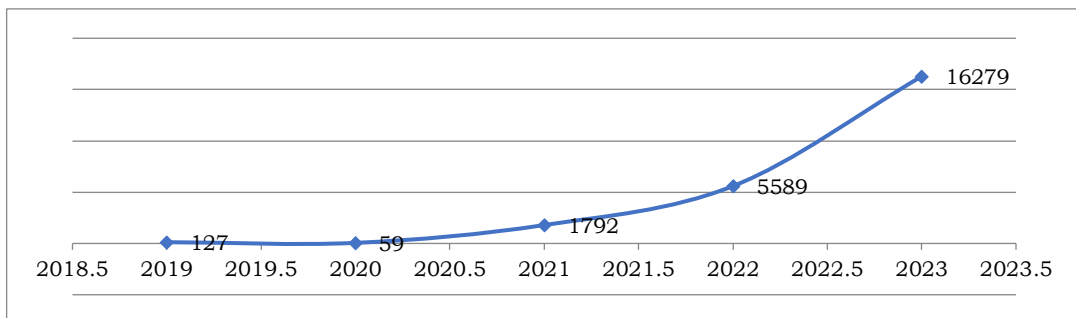
Investasi dalam kegiatan ekonomi mempunyai arti luas. Investasi selalu dikaitkan kegiatan menanam uang atau modal dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan kapasitas produksi pada masa yang akan datang.

Dalam penyusunan ICOR Banjarnegara menggunakan asumsi bahwa nilai investasi sama dengan nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Konstan yang merupakan bentuk investasi fisik secara riil.



Gambar Nilai dan Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

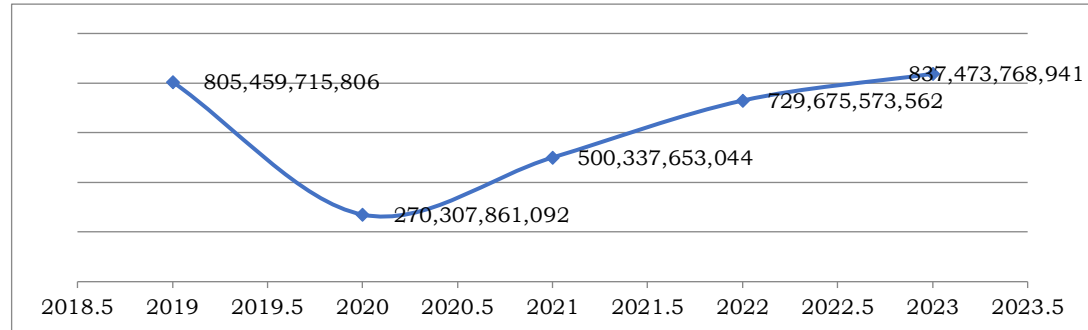
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 cenderung meningkat dari sebesar 127 investor pada tahun 2019 kemudian sempat menurun menjadi 59 investor pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1792 investor pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi 5589 investor pada tahun 2022 dan terus meningkat menjadi 16279 investor pada tahun 2023. Berikut ini disajikan perkembangan Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 sebagai berikut:



Gambar Perkembangan Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 cenderung meningkat dari sebesar Rp.805.459.715.806,- pada tahun 2019, kemudian sempat menurun menjadi 270.307.861.092,- pada tahun 2020 dan kemudian meningkat menjadi Rp.

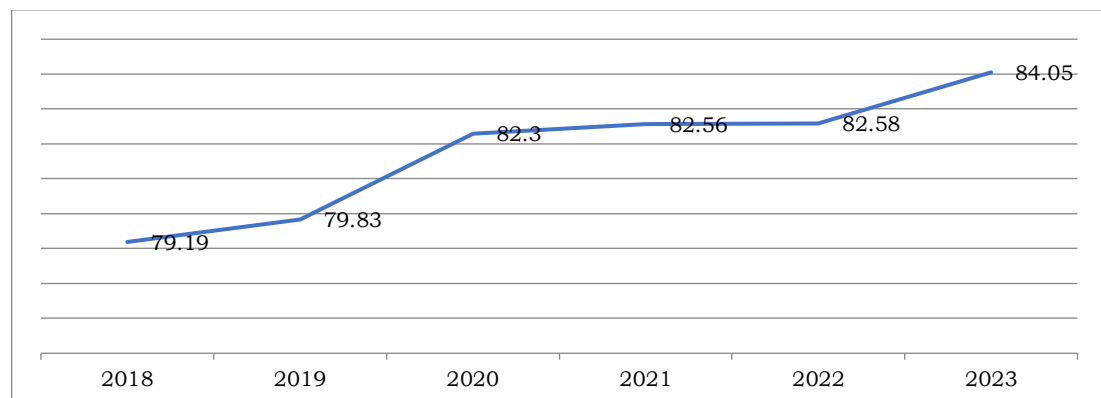
500.337.653.044,- pada tahun 2021 dan meningkat lagi menjadi Rp. 729.675.573.562,- pada tahun 2022 dan terus meningkat menjadi Rp. 837.473.768.941,-. Berikut ini disajikan perkembangan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 sebagai berikut:



Gambar Perkembangan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

K. Aspek Pelayanan Umum

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan data 6 tahun terakhir dari tahun 2018-2023 IKM Banjarnegara terbilang mengalami peningkatan, capaian ini sangat baik, mengingat indeks kepuasan masyarakat ini adalah penilaian langsung masyarakat kepada pemerintah daerah secara umum atas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Meski demikian, pelayanan publik juga tetap harus ditingkatkan setiap tahunnya, karena orientasi pelayanan publik juga akan berkembang setiap tahunnya agar pemerintah daerah semakin memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan harapan masyarakat.



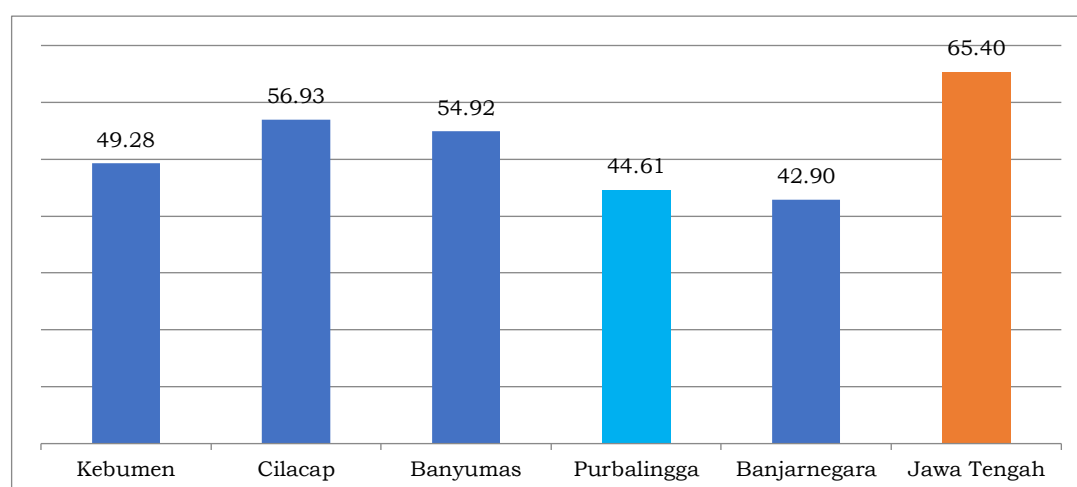
Gambar Capaian IKM Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023

Indeks inovasi Daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Penghitungan indeks inovasi daerah pada tahun 2019 dan 2020 dengan tahun 2021, 2022 dan 2023 memiliki perbedaan dalam cara penghitungannya, namun kecenderungan capaiannya memiliki peningkatan dari kurang inovatif menjadi inovatif, ini menunjukkan terdapat perbaikan dari hasil inovasi dari tahun sebelumnya. Hal ini sangat perlu untuk dipertahankan atau bahkan ditingkatkan pada tahun yang akan mendatang.

Tabel Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

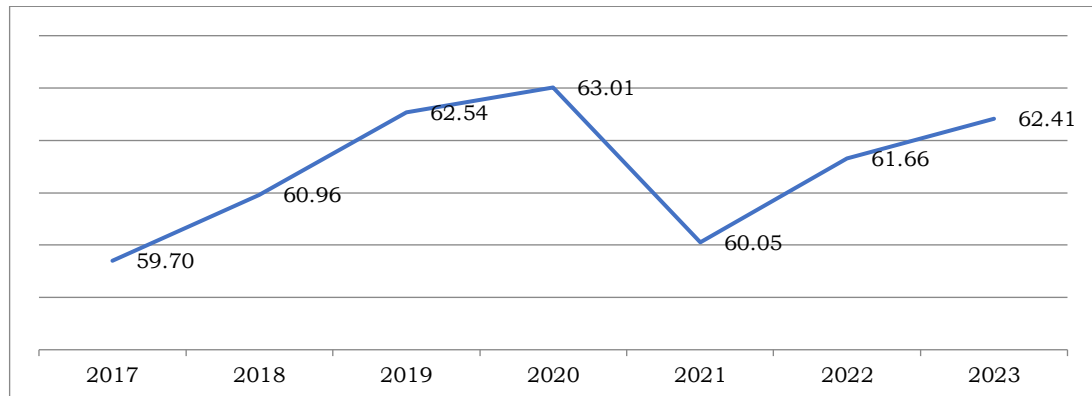
Tahun	Indeks	Keterangan
2019	150	Kurang Inovatif
2020	539	Inovatif
2021	41,91	Inovatif
2022	41,77	Inovatif
2023	42,90	Inovatif

Indeks Inovasi Kabupaten Banjarnegara jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya memiliki capaian indeks paling rendah. Meski sudah memiliki status inovatif, capaian tersebut perlu ditingkatkan atau minimal dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang.



Grafik Posisi Relatif Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2023

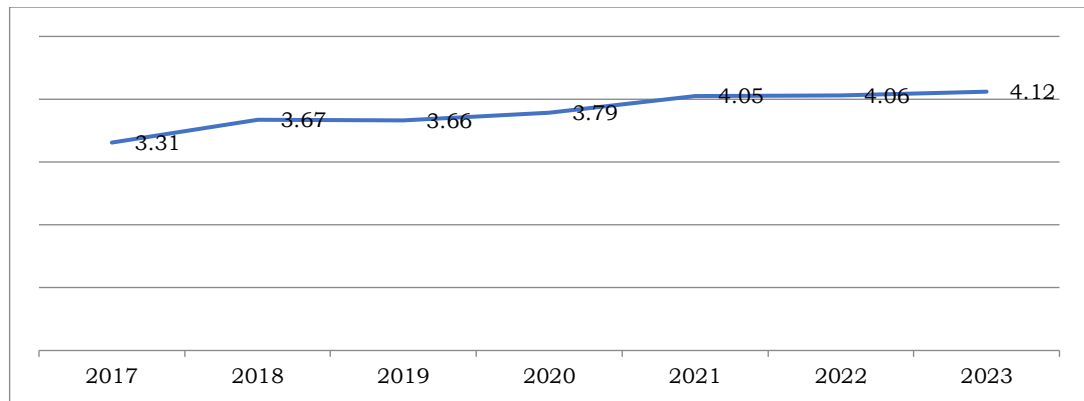
Indeks Reformasi Birokrasi adalah Indeks yang menggambarkan tingkat upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjarnegara secara umum meningkat dari tahun 2017. Dari 59,7 pada tahun 2017 meningkat menjadi 62,41 pada tahun 2023 dan berada pada kategori B.



Gambar Indeks Reformasi Birokrasi

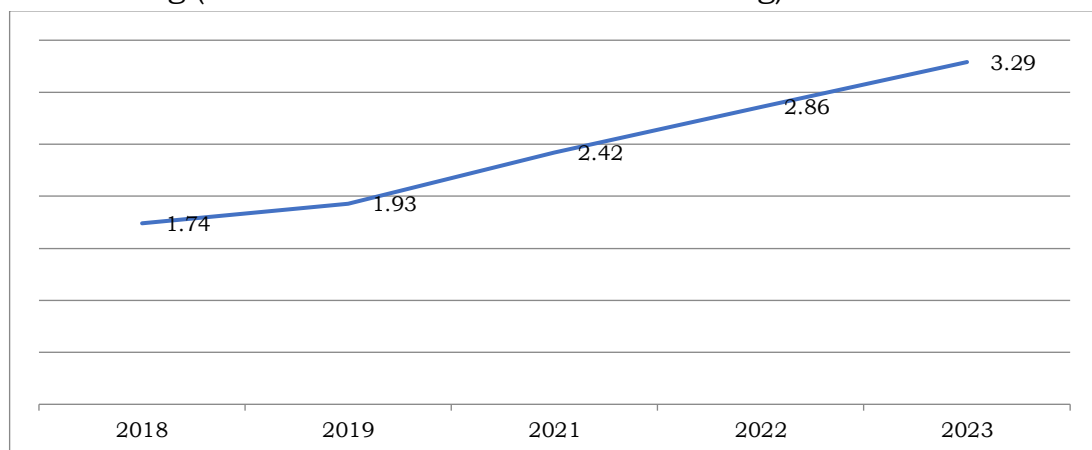
Indeks pelayanan publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme sdm, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, inovasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu oleh evaluator dari kemenpan RB berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku dengan hasil PEKPPP dikategorikan F (Gagal) Range Nilai 0 - 1,00, E (Sangat Buruk) Range Nilai 1,01 - 1,50, D (Buruk) Range Nilai 1,51 - 2,00, C - (Cukup Dengan Catatan) Range Nilai 2,01 - 2,50, C (Cukup) Range Nilai 2,551 - 3,00, B - (Baik Dengan Catatan) Range Nilai 3,01 - 3,50, B (Baik) Range Nilai (3,01 - 3,50), A - (Sangat Baik) Range Nilai 4,014 - 4, 50, A (Pelayanan Prima) Range Nilai 4,51 - 5,00.

Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Banjarnegara secara konsisten mengalami peningkatan dalam kurun masa tujuh tahun terakhir yaitu 3,31 pada 2017 dan 4,12 pada tahun 2023 sebagaimana bisa dilihat pada gambar. Sesuai kriteria, maka pelayanan publik Kabupaten Banjarnegara meningkat dari kategori baik (B) pada 2017 menjadi sangat baik pada 2023 (A-).



Gambar Indeks Pelayanan Publik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Penggunaan SPBE. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Indeks SPBE Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir polanya mengalami kenaikan, kondisi ini cukup baik secara pencapaian karena trendnya selalu mengalami kenaikan, jika didefinisikan secara kualitatif capaian tersebut termasuk dalam kondisi baik (2,6-3,5), namun capaian ini masih bisa ditingkatkan pada tahun mendatang (secara khusus 20 tahun mendatang).



Gambar Indeks SPBE Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018-2023

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Nilai IDM yang semakin tinggi menunjukkan kondisi desa yang semakin baik dari segi sosial, ekonomi, dan ekologi.

Tabel Indeks Desa Membangun Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017-2024

TAHUN	MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	SANGAT TERTINGGAL
2017	1	21	163	79	2
2018	2	22	176	64	2
2019	2	26	204	34	0
2020	2	33	209	22	0
2021	2	44	207	13	0
2022	2	64	199	1	0
2023	6	73	187	0	0
2024	13	87	166	0	0

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan salah satu indikator dari 26 (dua puluh enam) indikator keberhasilan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada level Meso yaitu “birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Tabel 2.53 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2022-2023

TAHUN	NILAI	KATEGORI
2022	51,55	CC (CUKUP)
2023	54,47	CC (CUKUP)

L. Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, Rata-rata capaian kinerja periode tahun 2006-2011 adalah 91 yakni dengan predikat kinerja sangat tinggi. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, rata-rata capaian kinerja periode tahun 2011-2016 adalah 86,49 yakni dengan predikat kinerja tinggi. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, rata-rata capaian kinerja periode tahun 2017-2022 adalah 85,2 yakni dengan predikat kinerja tinggi. Sehingga rata-rata capaian kinerja RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 sampai dengan kondisi evaluasi akhir tahun 2022 adalah 87,51 yakni dengan predikat kinerja tinggi. Dari hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat tercapainya target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 secara umum sudah berhasil ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yakni sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat,

cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat yang ditandai dengan:

- meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG),
- meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak,
- meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan,
- meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha,
- meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin,
- mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat,
- meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta
- meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.

b. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan:

- meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia,
 - meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (Sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian
-

sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu,

- meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas,
- meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,
- meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah,
- meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang,
- meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah,
- meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam,
- menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin,
- meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundangundangan yang berlaku,
- meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender,
- meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara,
- meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan

masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

c. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab yang ditandai dengan:

- meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik,
- meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),
- meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat,
- meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri,
- Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah,
- menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta
- meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

d. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan:

- meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru,
- meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh,
- meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah

perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan

- meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

Tabel berikut ini menggambarkan capaian kinerja indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2005-2025 (menggunakan capaian tahun 2023), yang terdiri dari 8 indikator kinerja makro.

Tabel Capaian Indikator Makro Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2005-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Capaian awal periode perencanaan (2005)	Capaian tahun berjalan (2023)	+/- (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,3	69,14	2,73
2	Angka Kemiskinan	%	27,35	14,90	-45,52
3	Angka Pengangguran	%	6,39*	6,26	-2,03
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,95	4,98	26,07
5	Pendapatan per Kapita (ADHB)	Rp (juta)	4,11	25,96	531,63
6	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	Indeks	0,26	0,376	44,61
7	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Ribu)	2.519,36	17.173	581,74
8	PDRB per Kapita (ADHB)	Rp (Ribu)	4.115,77	27.190	560,75

Rekomendasi tindaklanjut untuk penyusunan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 agar mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja dengan predikat kinerja tinggi agar kedepan dapat menjadi lebih baik dengan predikat sangat tinggi. Secara detail beberapa rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara dari kategori sedang menjadi kategori sangat tinggi dengan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan motivasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan.
- Menurunkan Persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Banjarnegara di bawah 10 persen dengan peningkatan pendapatan perkapita dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.

- c. Mengurangi Angka Pengangguran Kabupaten Banjarnegara dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- d. Menjaga Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara terus dalam tren positif melalui peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan investasi dan menumbuhkan ekspor dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- e. Mengurangi Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) antar penduduk Kabupaten Banjarnegara dengan pemerataan pembangunan.
- f. Meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten Banjarnegara dengan meningkatkan produktivitas daerah dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta memanfaatkan bonus demografi.

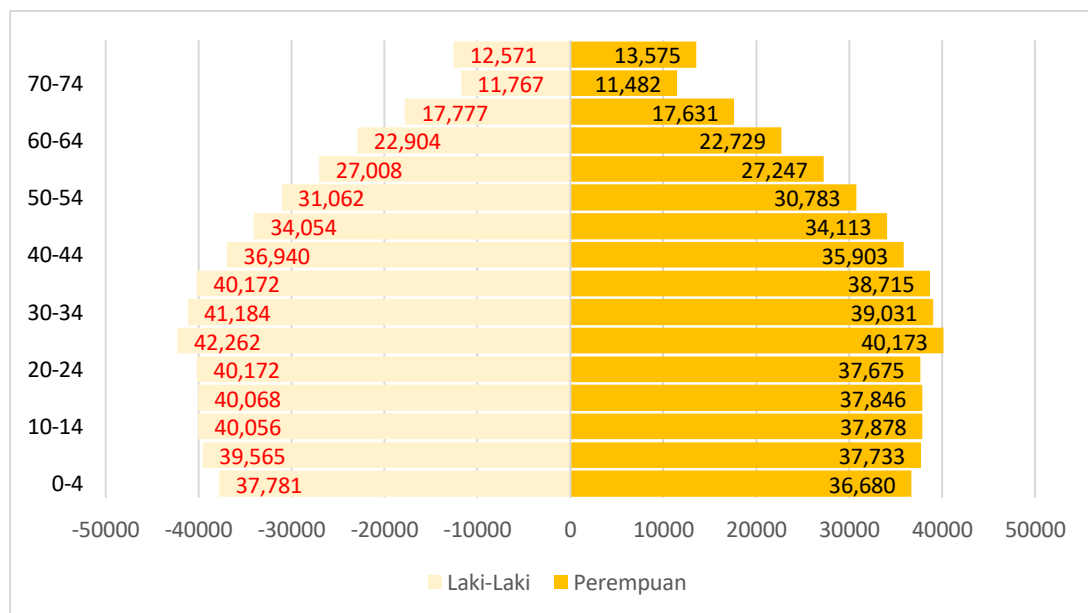
M. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 sebanyak 1.014.537 jiwa. Dilihat dari struktur umur penduduk yang jumlahnya paling banyak adalah usia 25-29 tahun sebanyak 82.435 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk paling banyak sebanyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 515.343 jiwa dan 499.194 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,24 yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 103 penduduk laki-laki. Angka ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara sebesar 44,93%. Selengkapnya jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Jumlah Total Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur	2020 (Jiwa)		
	L	P	Jumlah
0-4	37.781	36.680	74.461
5-9	39.565	37.733	77.298
10-14	40.056	37.878	77.934
15-19	40.068	37.846	77.914
20-24	40.172	37.675	77.847
25-29	42.262	40.173	82.435
30-34	41.184	39.031	80.215
35-39	40.172	38.715	78.887
40-44	36.940	35.903	72.843
45-49	34.054	34.113	68.167
50-54	31.062	30.783	61.845
55-59	27.008	27.247	54.255
60-64	22.904	22.729	45.633
65-69	17.777	17.631	35.408
70-74	11.767	11.482	23.249
75+	12.571	13.575	26.146
Jumlah	515.343	499.194	1.014.537

Piramida penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 membentuk sebuah bangunan rumah, dengan jumlah kelompok umur terbanyak pada usia 25-29 tahun. Terlihat ada peningkatan kuantitas penduduk dari usia 0-4 tahun ke kelompok usia di atasnya hingga kelompok usia 25-29 tahun. Jumlah penduduk pada kelompok usia 30-34 tahun dan kelompok usia di atasnya hingga kelompok usia 65-69 tahun terlihat semakin kecil.



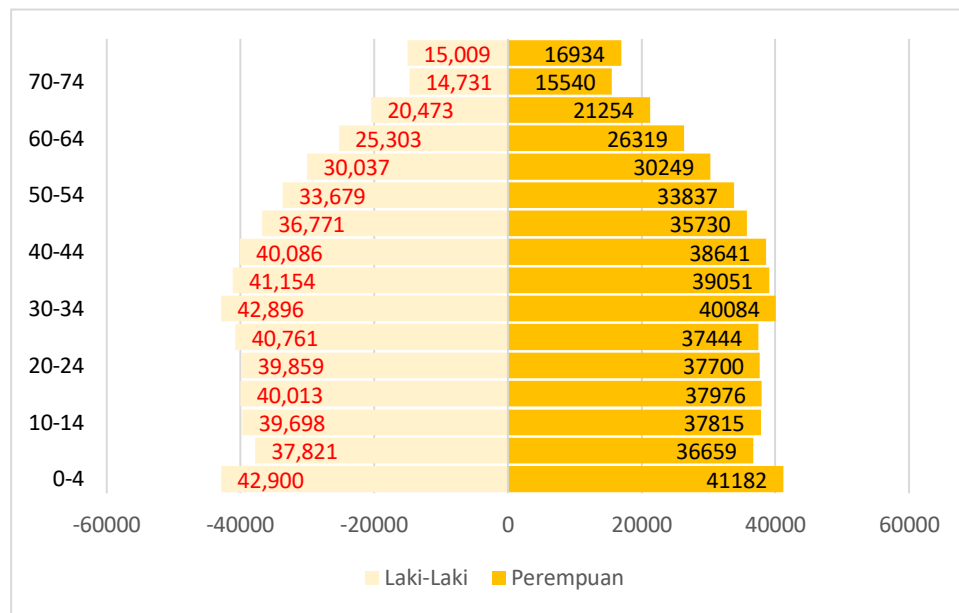
Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020

Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara tahun 2025 sebanyak 1.067.606 jiwa. Dilihat dari struktur umur penduduk yang jumlahnya paling banyak adalah usia 30-34 tahun sebanyak 84.082 jiwa, kemudian usia 30-34 tahun sebanyak 82.980 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk paling banyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 541.191 jiwa dan 526.415 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,81 yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 103 penduduk laki-laki. Angka ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2025 sebesar 46,73%. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Jumlah Total Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025

Kelompok Umur	2025 (Jiwa)		
	L	P	Jumlah
0-4	42.900	41.182	84.082
5-9	37.821	36.659	74.480
10-14	39.698	37.815	77.513
15-19	40.013	37.976	77.989
20-24	39.859	37.700	77.559
25-29	40.761	37.444	78.205
30-34	42.896	40.084	82.980
35-39	41.154	39.051	80.205
40-44	40.086	38.641	78.727
45-49	36.771	35.730	72.501
50-54	33.679	33.837	67.516
55-59	30.037	30.249	60.286
60-64	25.303	26.319	51.622
65-69	20.473	21.254	41.727
70-74	14.731	15.540	30.271
75+	15.009	16.934	31.943
Jumlah	541.191	526.415	1.067.606

Piramida penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2025 membentuk sebuah bangunan rumah dengan kelompok penduduk usia 0-4 tahun memiliki jumlah terbanyak. Terlihat ada penurunan kuantitas penduduk dari usia 0-4 tahun ke kelompok usia 5-9 tahun, kemudian meningkat pada kelompok usia di atasnya hingga kelompok usia 30-34 tahun. Jumlah penduduk pada kelompok usia 30-34 tahun hingga kelompok usia 65-69 tahun terlihat semakin kecil. Sementara itu pada kelompok usia 75 tahun keatas jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk pada kelompok usia 70-74. Piramida penduduk tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.



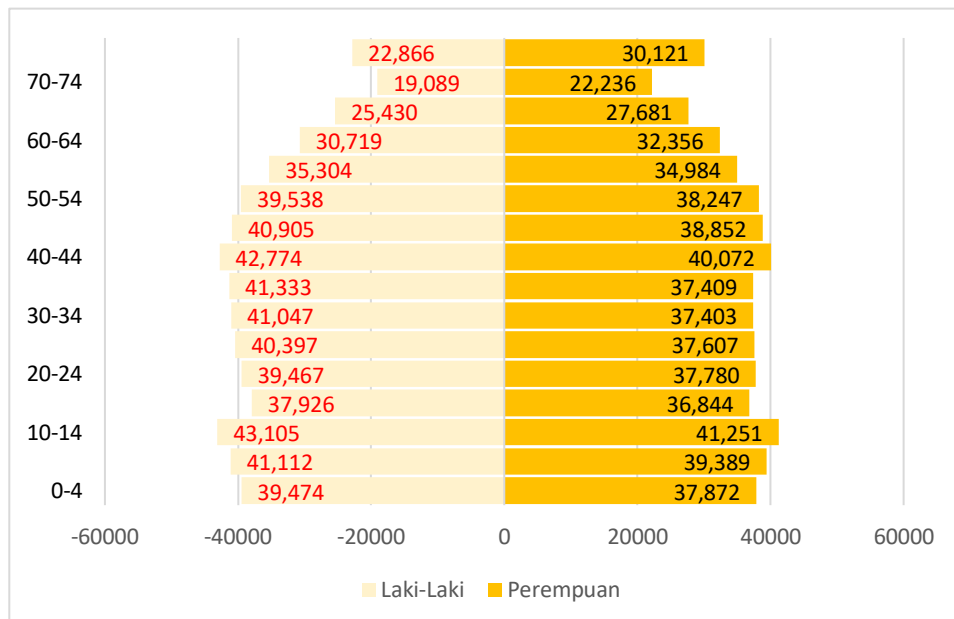
Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025

Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara tahun 2035 sebanyak 1.150.590 jiwa. Dilihat dari struktur umur penduduk yang jumlahnya paling banyak adalah usia 10-14 tahun sebanyak 84.356 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk paling banyak sebanyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 580.486 jiwa dan 570.104 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,82 yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 102 penduduk laki-laki. Angka ketergantungan di Kabupaten Banjarnegara tahun 2035 sebesar 51,20%. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2035 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Jumlah Total Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2035

Kelompok Umur	2035 (Jiwa)		
	L	P	Jumlah
0-4	39.474	37.872	77.346
5-9	41.112	39.389	80.501
10-14	43.105	41.251	84.356
15-19	37.926	36.844	74.770
20-24	39.467	37.780	77.247
25-29	40.397	37.607	78.004
30-34	41.047	37.403	78.450
35-39	41.333	37.409	78.742
40-44	42.774	40.072	82.846
45-49	40.905	38.852	79.757
50-54	39.538	38.247	77.785
55-59	35.304	34.984	70.288
60-64	30.719	32.356	63.075
65-69	25.430	27.681	53.111
70-74	19.089	22.236	41.325
75+	22.866	30.121	52.987
Jumlah	580.486	570.104	1.150.590

Piramida penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2035 mulai membesar pada kelompok usia 0-4 tahun hingga kelompok usia 10-14 tahun, kemudian mengecil pada kelompok usia 15-19 tahun, dan kembali membesar hingga usia 40-44 tahun. Pada kelompok usia 45-49 tahun hingga usia 70-74 tahun jumlah penduduk semakin mengecil, kemudian membesar lagi pada kelompok usia 75 tahun keatas. Piramida penduduk tahun 2035 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2035

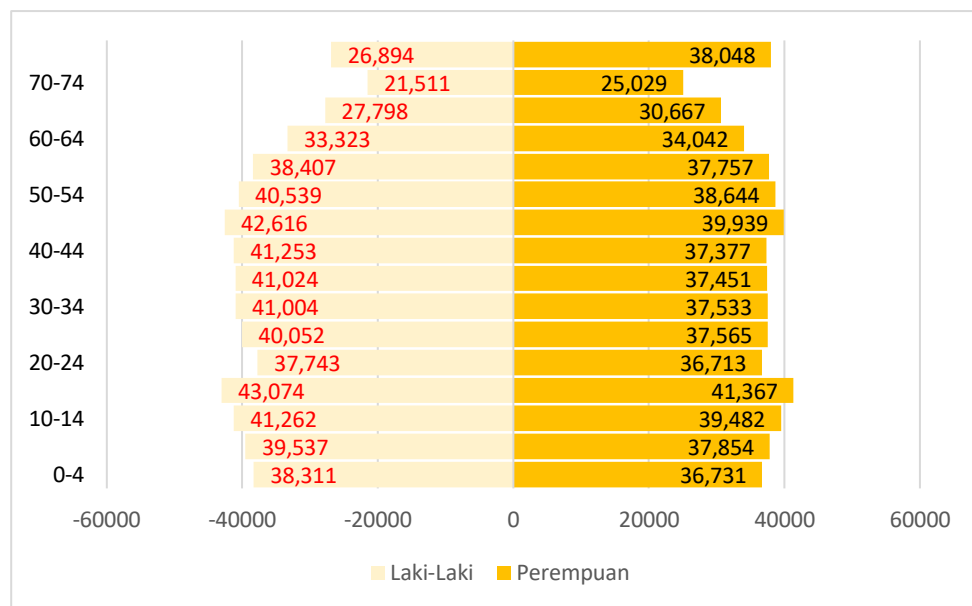
Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara tahun 2040 sebanyak 1.180.547 jiwa. Dilihat dari struktur umur penduduk yang jumlahnya paling banyak adalah usia 15-19 tahun sebanyak 84.441 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk paling banyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 594.348 jiwa dan 586.199 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,39 yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 101 penduduk laki-laki. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2040 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Jumlah Total Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2040

Kelompok Umur	2040 (Jiwa)		
	L	P	Jumlah
0-4	38.311	36.731	75.042
5-9	39.537	37.854	77.391
10-14	41.262	39.482	80.744
15-19	43.074	41.367	84.441
20-24	37.743	36.713	74.456
25-29	40.052	37.565	77.617
30-34	41.004	37.533	78.537
35-39	41.024	37.451	78.475
40-44	41.253	37.377	78.630
45-49	42.616	39.939	82.555
50-54	40.539	38.644	79.183
55-59	38.407	37.757	76.164
60-64	33.323	34.042	67.365
65-69	27.798	30.667	58.465
70-74	21.511	25.029	46.540
75+	26.894	38.048	64.942
Jumlah	594.348	586.199	1.180.547

Piramida penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2040 membentuk sebuah bangunan rumah, dengan jumlah kelompok umur terbanyak pada usia 15-19 tahun. Terlihat ada peningkatan kuantitas penduduk dari usia 0-4 tahun ke kelompok usia 15-19 tahun, kemudian mengecil pada kelompok umur 20-24 tahun, selanjutnya membesar pada kelompok usia diatasnya hingga kelompok usia 45-49 tahun. Jumlah penduduk pada kelompok usia 50-56 tahun hingga kelompok usia 70-75 tahun terlihat semakin kecil. Sementara itu pada kelompok usia 75 tahun keatas jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk pada kelompok usia 70-74 tahun. Pada kelompok usia 75 tahun keatas terlihat jumlah

penduduk usia perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki.
Piramida penduduk tahun 2040 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2040

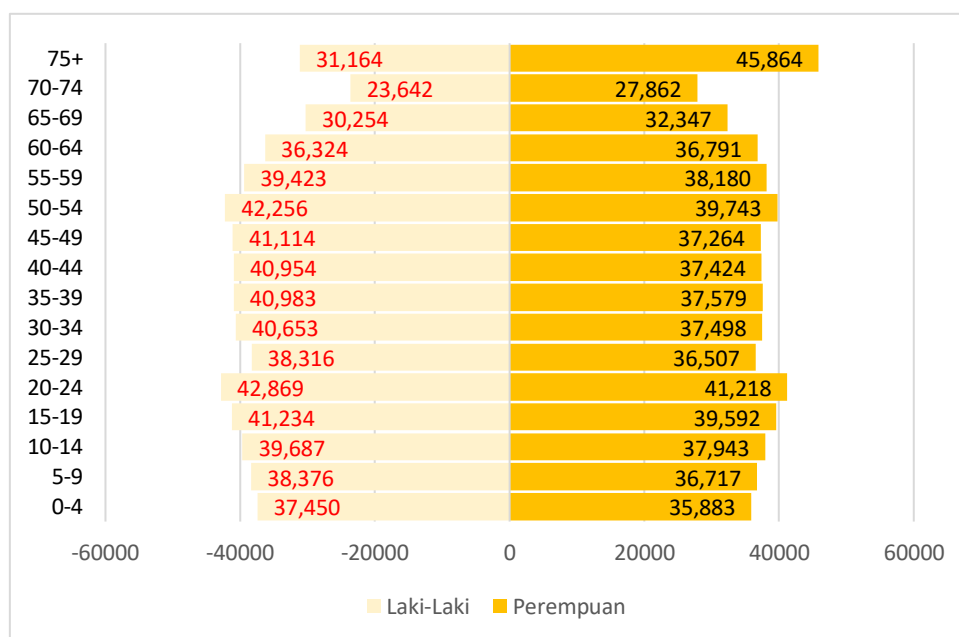
Proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Banjarnegara tahun 2045 sebanyak 1.203.111 jiwa. Dilihat dari struktur umur penduduk yang jumlahnya paling banyak adalah usia 20-24 tahun sebanyak 84.087 jiwa. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah penduduk paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 604.699 jiwa dan 598.412 jiwa perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,05 yang berarti diantara 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 101 penduduk laki-laki. Selengkapnya proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, dan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Jumlah Total Penduduk, Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, dan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2045

Kelompok Umur	2045 (Jiwa)		
	L	P	Jumlah
0-4	37.450	35.883	73.333
5-9	38.376	36.717	75.093
10-14	39.687	37.943	77.630
15-19	41.234	39.592	80.826
20-24	42.869	41.218	84.087
25-29	38.316	36.507	74.823
30-34	40.653	37.498	78.151
35-39	40.983	37.579	78.562
40-44	40.954	37.424	78.378
45-49	41.114	37.264	78.378
50-54	42.256	39.743	81.999
55-59	39.423	38.180	77.603

Kelompok Umur	2045 (Jiwa)		
	L	P	Jumlah
60-64	36.324	36.791	73.115
65-69	30.254	32.347	62.601
70-74	23.642	27.862	51.504
75+	31.164	45.864	77.028
Jumlah	604.699	598.412	1.203.111

Piramida penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2045 jumlah kelompok umur terbanyak pada usia 0-4 tahun. Terlihat ada peningkatan kuantitas penduduk dari kelompok usia 0-4 tahun ke kelompok usia 20-24 tahun, kemudian mengecil pada kelompok usia 25-29 tahun, dan kembali membesar pada kelompok usia 25-29 tahun hingga kelompok usia 50-54 tahun. Jumlah penduduk pada kelompok usia 55-59 tahun hingga kelompok usia 70-74 tahun terlihat semakin kecil. Sementara itu pada kelompok usia 75 tahun keatas jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk pada kelompok usia 70-74 tahun. Pada kelompok usia 75 tahun keatas terlihat jumlah penduduk usia perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Piramida penduduk tahun 2045 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2045

N. Kepadatan penduduk

Kepadatan penduduk Kabupaten Banjarnegara diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2020 sebesar 948 jiwa/km² menjadi 998 jiwa/km² pada tahun 2025, sebanyak 1.040 jiwa/km² pada tahun 2030, menjadi 1.076 jiwa/km² pada tahun 2035, sebanyak 1.104

jiwa/km² pada tahun 2040, dan sebanyak 1.125 jiwa pada tahun 2045. Perhitungan proyeksi kepadatan penduduk berdasarkan proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 hingga tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2025-2045

Uraian	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.014.537	1.067.606	1.113.012	1.150.590	1.180.547	1.203.111
Luas Wilayah (km ²)	1069,7101	1069,7101	1069,7101	1069,7101	1069,7101	1069,7101
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	948	998	1.040	1.076	1.104	1.125

O. Penduduk Usia Produktif

Jumlah penduduk usia produktif menunjukkan peningkatan dari sebanyak 700.041 jiwa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 727.590 jiwa pada tahun 2025, sebanyak 748.629 jiwa pada tahun 2030, sebanyak 760.964 jiwa pada tahun 2035, sebanyak 777.423 jiwa pada tahun 2040 dan 777.423 jiwa pada tahun 2045. Selengkapnya jumlah penduduk usia produktif dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2045

Usia	2020	2025	2030	2035	2040	2045
15-19	77.914	77.989	77.579	74.770	84.441	84.441
20-24	77.847	77.559	77.643	77.247	74.456	74.456
25-29	82.435	78.205	77.915	78.004	77.617	77.617
30-34	80.215	82.980	78.728	78.450	78.537	78.537
35-39	78.887	80.205	82.978	78.742	78.475	78.475
40-44	72.843	78.727	80.060	82.846	78.630	78.630
45-49	68.167	72.501	78.396	79.757	82.555	82.555
50-54	61.845	67.516	71.875	77.785	79.183	79.183
55-59	54.255	60.286	65.937	70.288	76.164	76.164
60-64	45.633	51.622	57.518	63.075	67.365	67.365
Jumlah Penduduk Usia Produktif	700.041	727.590	748.629	760.964	777.423	777.423

P. Anak Usia Sekolah

Jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan dari sebesar 233.146 jiwa pada tahun 2020 menjadi sebanyak 229.982 jiwa pada tahun 2025, sebanyak 236.387

jiwa pada tahun 2030, sebanyak 239.627 jiwa pada tahun 2035, sebanyak 242.576 jiwa pada tahun 2040, dan sebanyak 233.549 jiwa pada tahun 2045, dengan perincian pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2025-2045

Usia	2020	2025	2030	2035	2040	2045
5-9	77.298	74.480	84.107	80.501	77.391	75.093
10-14	77.934	77.513	74.701	84.356	80.744	77.630
15-19	77.914	77.989	77.579	74.770	84.441	80.826
Jumlah Penduduk Usia Sekolah	233.146	229.982	236.387	239.627	242.576	233.549

Q. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar jika dibandingkan dengan usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Proporsi penduduk usia produktif Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020 telah mencapai bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) telah melebihi 60%, yaitu sebesar 69,00% pada tahun 2020, sebesar 68,15% pada tahun 2025, sebesar 67,26% pada tahun 2030, sebesar 66,14% pada tahun 2035, sebesar 65,85% pada tahun 2040 dan sebesar 64,62% pada tahun 2045.

Tabel Proporsi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2045

Uraian	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk Usia Produktif	700.041	727.590	748.629	760.964	777.423	777.423
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.014.537	1.067.606	1.113.012	1.150.590	1.180.547	1.203.111
Proporsi penduduk usia produktif	69,00	68,15	67,26	66,14	65,85	64,62

Bonus demografi memberikan tantangan dan peluang yang perlu dikelola secara baik. Tantangan Bonus Demografi antara lain:

1. Pengangguran: bonus demografi dapat menyebabkan ledakan populasi usia muda. Jika tidak ada lapangan pekerjaan yang cukup untuk menampung pertumbuhan ini, dapat muncul pengangguran pemuda yang tinggi.
2. Tekanan pada Infrastruktur dan layanan publik: pertumbuhan cepat dalam jumlah penduduk usia produktif dapat

menempatkan tekanan besar pada infrastruktur, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan.

3. Tingginya permintaan pendidikan: dengan bonus demografi, ada kebutuhan untuk sistem pendidikan yang efisien dan berkualitas tinggi untuk memastikan bahwa generasi muda memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar kerja.
4. Kesenjangan pendidikan dan keterampilan: jika investasi dalam pendidikan dan pelatihan tidak merata, bonus demografi dapat menyebabkan kesenjangan keterampilan antara generasi muda, yang memiliki akses ke pendidikan berkualitas, dan generasi yang lebih tua.
5. Tantangan kesehatan: pertumbuhan populasi dapat menempatkan tekanan pada sistem kesehatan, terutama jika tidak ada upaya yang cukup untuk membangun dan memelihara infrastruktur kesehatan yang memadai.

Beberapa peluang bonus demografi yang perlu dimanfaatkan dengan baik antara lain sebagai berikut:

1. Dividen demografi: jika ekonomi mampu menyerap jumlah pemuda yang besar ke dalam pasar kerja, bonus demografi dapat memberikan "dividen demografi," yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
2. Inovasi dan kreativitas: populasi yang muda cenderung lebih inovatif dan kreatif. Bonus demografi dapat menjadi dorongan bagi inovasi dan pengembangan teknologi baru.
3. Peningkatan konsumsi: generasi muda yang besar dapat menghasilkan peningkatan konsumsi, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jika pasar konsumen tumbuh.
4. Kekuatan pekerja produktif: bonus demografi dapat memberikan keuntungan dalam hal tenaga kerja produktif yang lebih besar, meningkatkan kapasitas untuk produksi dan pertumbuhan ekonomi.
5. Peningkatan pembangunan sosial: dengan populasi muda yang besar, ada potensi untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, termasuk peningkatan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan.
6. Potensi demografis sebagai pasar konsumen: populasi muda cenderung menjadi pasar konsumen yang signifikan. Bonus demografi dapat meningkatkan permintaan untuk berbagai produk dan jasa.

R. Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 Tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, untuk menentukan luas minimum rata-rata perpetakan tanah didasarkan pada faktor-faktor

kehidupan manusia (kegiatan), faktor alam dan peraturan bangunan. Berdasarkan kegiatan yang terjadi didalam rumah hunian, yaitu; tidur (ruang tidur), masak, makan (dapur), mandi (kamar mandi), duduk (ruang duduk/ruang tamu), kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam 16 - 24 m³ dan per anak-anak per jam 8 - 12 m³ , dengan pergantian udara dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 2,5 m, maka luas lantai per orang bagi dewasa sebesar 9,6 m² dan anak sebesar 4,8 m².

Jadi bila 1 KK terkecil rata-rata terdiri dari 4 orang (ayah + ibu + 2 anak) maka kebutuhan luas lantai minimum dihitung sebagai berikut:

$$\text{Luas lantai utama} = (2 \times 9,6) + (2 \times 4,8) \text{ m}^2 = 28,8 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas lantai pelayanan} = 50\% \times 33,6 \text{ m}^2 = 16,8 \text{ m}^2$$

$$\text{Total Luas Lantai} = 45,6 \text{ m}^2$$

Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan anggota 4 orang dapat dihitung sebagai berikut.

$$\text{L kav minimum (1 kel = 4 orang)} = \frac{100 \times 45,6}{50} = 91,2 \text{ m}^2$$

Rata-rata anggota keluarga di Kabupaten Banjarnegara adalah 4 orang. Dengan mendasarkan pada perhitungan diatas dan proyeksi jumlah penduduk, maka diperoleh perhitungan kebutuhan luas kavling minimum untuk seluruh penduduk sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Kebutuhan Luas Kavling Tahun 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.067.606	1.113.012	1.150.590	1.180.547	1.203.111
Proyeksi Jumlah Keluarga (KK)	266.902	278.253	287.648	295.137	300.778
Kebutuhan luas kavling minimum per keluarga (m ²)	91,2	91,2	91,2	91,2	91,2
Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga	24.341.462	25.376.674	26.233.498	26.916.494	27.430.954

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Total Kebutuhan Rumah (unit)	266.902	278.253	287.648	295.137	300.778

Total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga (m^2) yang belum terpenuhi belum dapat dihitung karena belum tersedia data luas kavling yang sudah terbangun dan dihuni oleh penduduk Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa total kebutuhan luas kavling minimum seluruh keluarga baik yang telah terbangun (dihuni) maupun yang harus disediakan menunjukkan peningkatan dari sebesar 24.341.462 m^2 pada tahun 2025 menjadi 25.376.674 m^2 pada tahun 2030, menjadi 26.233.498 m^2 pada tahun 2035, menjadi 26.916.494 m^2 pada tahun 2040 dan 27.430.954 m^2 pada tahun 2045.

Sedangkan total kebutuhan rumah, dengan mempertimbangkan kebutuhan tiap KK membutuhkan satu rumah, maka diketahui total kebutuhan rumah pada tahun 2025 : 266.902 Unit; 2030 : 278.253 Unit; 2035 : 287.648 Unit; 2040 : 295.137 Unit dan 2045 : 300.778 Unit.

S. Kebutuhan Air

Pemakaian air rata-rata rumah tangga di perkotaan di Indonesia sebesar setiap orang 144 liter per hari. Pemakaian terbesar adalah untuk keperluan mandi sebesar 60 liter per hari perorang atau 45 persen dari total pemakaian air. Dengan mendasarkan pada kebutuhan pemakaian air per rumah tangga tersebut maka kebutuhan air seluruh penduduk sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Kebutuhan Air Tahun 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	45
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.067.606	1.113.012	1.150.590	1.180.547	1.203.111
Kebutuhan pemakaian air rata-rata per orang (liter per hari)	120	120	120	120	120
Total Kebutuhan pemakaian air seluruh penduduk (liter per hari)	128.112.720	133.561.440	138.070.800	141.665.640	144.373.320

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kebutuhan air di Kabupaten Banjarnegara diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebanyak 128.112.720 liter per hari pada tahun 2025 menjadi 133.561.440 liter per hari pada tahun 2030, menjadi 138.070.800 liter per hari pada tahun 2035, menjadi 141.665.640 liter per hari pada tahun 2040 dan 144.373.320 liter per hari pada tahun 2045.

T. Kebutuhan Energi/Listrik

Kebutuhan listrik ditentukan oleh konsumsi listrik per kapita. Konsumsi listrik per kapita adalah total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk. Konsumsi listrik perkapita di Indonesia berdasarkan data PLN dalam Banjarnegara dalam Angka tahun 2022 diketahui total konsumsi listrik di Kabupaten Banjarnegara sebesar 279.723.000 Kwh. Jika dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2022 diperoleh konsumsi listrik perkapita sebesar 269,30 kwh per kapita. Angka tersebut meningkat sebesar 1,90% dari tahun 2021 sebesar 264,21 kwh per tahun. Mengacu pada pertumbuhan konsumsi listrik perkapita per tahun tersebut, maka diperoleh kebutuhan listrik sebagai berikut.

Tabel Proyeksi Kebutuhan Listrik Tahun 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.067.606	1.113.012	1.150.590	1.180.547	1.203.111
Kebutuhan listrik per orang (kwh per kapita)	279,56	307,14	337,45	370,75	407,34
Total Kebutuhan listrik seluruh penduduk (kwh per kapita)	298.459.933	341.850.506	388.266.596	437.687.800	490.075.235

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seiring dengan peningkatan konsumsi listrik maka kebutuhan listrik di Kabupaten Banjarnegara diproyeksikan mengalami peningkatan dari sebanyak 298.459.933 kwh pada tahun 2025 menjadi 341.850.506

kwh pada tahun 2030, menjadi 388.266.596 kwh pada tahun 2035, menjadi 437.687.800 kwh pada tahun 2040 dan 490.075.235 kwh pada tahun 2045. Kebutuhan konsumsi listrik ini menjadi dasar dalam penghitungan kebutuhan pembangunan pembangkit listrik untuk menyediakan listrik sesuai dengan kebutuhan.

U. Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume produksi sampah per orang per hari di Indonesia sebesar 0,68 kg/orang/hari. Berdasarkan volume produksi sampah per orang per hari tersebut dapat dihitung volume sampah seluruh penduduk setiap harinya, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel Proyeksi Produksi Sampah Tahun 2025-2045

Uraian	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	1.067.606	1.113.012	1.150.590	1.180.547	1.203.111
Produksi sampah per orang (kg/orang/hari)	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Produksi sampah seluruh penduduk per hari (kg/hari)	725.972	756.848	782.401	802.772	818.115

Volume sampah tersebut menjadi dasar dalam pengelolaan sampah, terutama dalam proses pengangkutan sampah yang membutuhkan sarana dan prasarana seperti tong sampah di setiap rumah tangga; Gerobak sampah dimensi 2 m³ dan Bak sampah kecil dimensi 6 m³ di tingkat RW (2.500 jiwa); Gerobak sampah dimensi 2 m³ dan Bak sampah besar dimensi 6 m³ sebagai Tempat Penampungan Sementara di tingkat desa/kelurahan (30.000 jiwa); Mobil sampah dan Bak sampah besar dimensi 25 m³ sebagai Tempat Penampungan Sementara di tingkat kecamatan (120.000 jiwa); Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sarana berupa Tempat daur ulang sampah, dan Bak sampah akhir di tingkat kabupaten (> 480.000 jiwa). Penyediaan sarana dan prasarana tentunya disesuaikan dengan kapasitas pengangkutan sampah dari rumah tangga ke TPS hingga ke TPA.

V. Kebutuhan Infrastruktur Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal maupun yang formal, dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk

dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan:

- berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan;
- optimasi daya tampung dengan satu shift;
- efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu;
- pemakaian sarana dan prasarana pendukung;
- keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat Pendidikan anak usia dini (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU). Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran masing-masing sekolah Berdasarkan SNI 03-1733-2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel Standar Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum
Sekolah Berdasarkan SNI 03-1733-2004**

No	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk Pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min (m ²)	Luas Lahan Min (m ²)		Radius Pencapaian (m ²)	Lokasi Penyelesaian	
1	Taman Kanak-kanak	1250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28	500	Ditengah kelompok warga. Tidak menyebrang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan	2 rombongan prabelajar @60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2	Sekolah Dasar	1600	633	2000	1,25	1000		Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2,3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, misal SD,SMP, SMA dalam satu komplek
3	SLTP	4800	2282	9000	1,88	1000	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan	
4	SMA	4800	3835	12500	2,6	3000		

Standar sarana dan prasarana masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel Standar Luas Ruang Minimum dan Luas Lahan Minimum
Sekolah Berdasarkan SNI 03-1733-2004**

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar (rombongan)	Peserta Didik (Siswa)	Luas Ruang Minimum (m ²)	Luas Lahan Minimum (m ²)
SD/MI	Tipe A	12	480	1000	3000
	Tipe B	9	360	633	2000
	Tipe C	6	240	251	1000
SLTP/MTs	Tipe A	27	1080	3077	9000
	Tipe B	18	720	2282	9000
	Tipe C	9	360	1502	6000
SMA	Tipe A	27	1080	5233	1 lantai: 15.000
					2 lantai: 9.500
					3 lantai:

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar (rombongan)	Peserta Didik (Siswa)	Luas Ruang Minimum (m ²)	Luas Lahan Minimum (m ²)
					7.000
	Tipe B	18	720	3835	1 lantai: 12.500
					2 lantai: 8.000
					3 lantai: 5.000
	Tipe C	9	360	2692	10000

Proyeksi penduduk yang tersedia kelompok umur yang disajikan tidak sesuai dengan kelompok usia sekolah, sehingga tidak dapat diproyeksikan jumlah rombongan belajar dan kebutuhan sekolah masing-masing jenjang Pendidikan.

W. Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah:

1. Rumah sakit, merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
2. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
3. Puskesmas pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil.

Kebutuhan rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Banjarnegara perlu ditingkatkan, khususnya di wilayah Kabupaten Banjarnegara bagian utara. Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO). Menurut WHO, suatu wilayah idealnya memiliki satu tempat tidur Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan mendasarkan

pada standar tersebut dapat dihitung kebutuhan tempat tidur Rumah Sakit di Banjarnegara sebagai berikut:

Tabel Kebutuhan Tempat Tidur Rumah Sakit						
Uraian`	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk RS	Jiwa	1.067.606	1.113.012	1.150.590	1.180.547	1.203.111
Jumlah penduduk untuk 1 tempat tidur RS berdasarkan Standar WHO		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jumlah Kebutuhan Tempat Tidur RS		1.068	1.113	1.151	1.181	1.203
Posyandu Standar		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Jumlah Kebutuhan Posyandu		854	890	920	944	962
Klinik bersalin Standar		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Klinik bersalin		36	37	38	39	40
Puskesmas Pembantu Standar		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas Pembantu		36	37	38	39	40
Puskesmas Standar		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Jumlah Kebutuhan Puskesmas		9	9	10	10	10
Tempat Praktik Dokter Standar		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jumlah Kebutuhan Praktik Dokter		214	223	230	236	241
Apotik Standar		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Jumlah Kebutuhan Apotik		36	37	38	39	40

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kebutuhan total tempat tidur rumah sakit di Kabupaten Banjarnegara terus mengalami peningkatan dari sebanyak 1.068 unit pada tahun 2025 menjadi 1.113 unit pada tahun 2030, menjadi 1.151 unit pada tahun 2035, menjadi 1.181 unit pada tahun 2040 dan menjadi 1.203 unit pada tahun 2045.

X. Kebijakan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW Kabupaten Banjarnegara

Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya serta mitigasi bencana dalam sistem wilayah terpadu dan berkelanjutan” yang mana merupakan upaya untuk mewujudkan pengembangan wilayah pembangunan dengan mempertimbangkan potensi daerah serta memperhatikan kelestarian alamnya. Terdapat 6 (enam) kunci dalam tujuan penataan ruang tersebut, yaitu:

- a. *Pengembangan pertanian*, sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting di Kabupaten Banjarnegara, pengembangan sektor ini harus dioptimalkan untuk menjaga/mendukung ketersediaan pangan serta meningkatkan kesejahteraan penduduk.
- b. *Pengembangan pariwisata*, potensi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara sangat beragam dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai ikon daerah.
- c. *Pengembangan sektor unggulan lainnya*, merupakan sektor unggulan lain yang menjadi basis kegiatan ekonomi kabupaten Banjarnegara meliputi perikanan; sektor pertambangan; perdagangan besar; transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa-jasa (jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya).
- d. *Mitigasi bencana*, merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- e. *Sistem wilayah terpadu*, pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui keterpaduan kawasan perdesaan dan perkotaan.
- f. *Pembangunan berkelanjutan*, karakter wilayah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri atas kawasan bagian Utara yang sebagian merupakan kawasan rawan bencana, kawasan bagian tengah dengan topografi yang relatif datar dan merupakan kawasan untuk ketahanan pangan serta kawasan selatan dengan topografi berbukit yang juga rawan bencana. Dengan karakteristik yang bervariasi untuk setiap kawasan maka

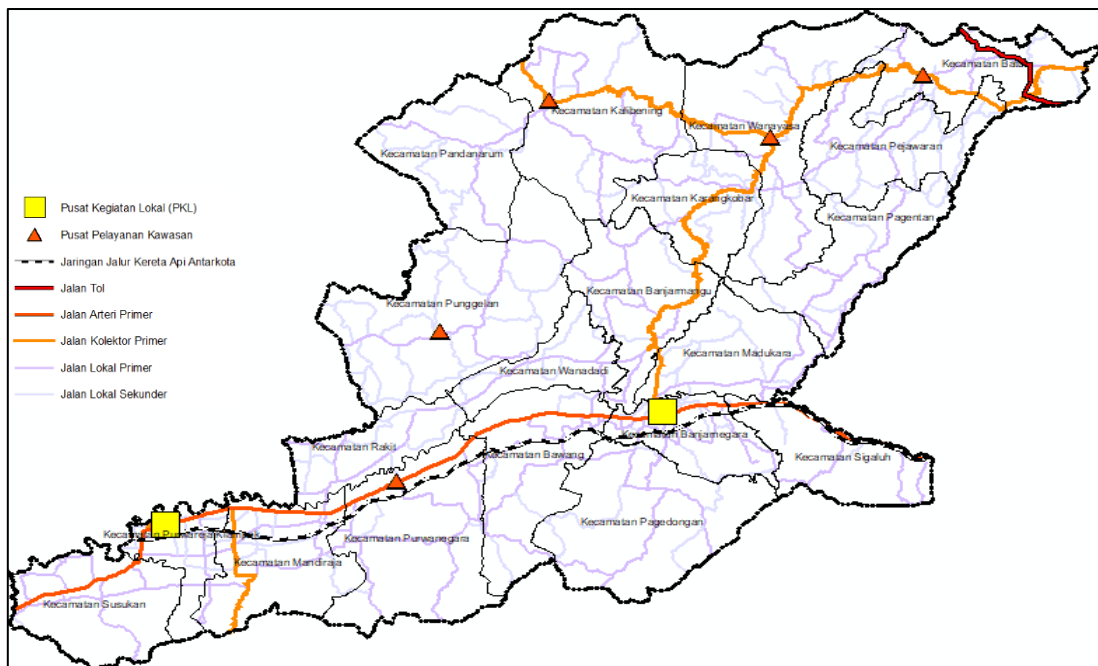
dibutuhkan strategi pengembangan kawasan yang tepat supaya mendukung pembangunan berkelanjutan di tiap-tiap kawasan.

Y. Pengembangan Sistem Perkotaan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043, dapat dilihat pada sistem perkotaan dan pengembangan kawasan budi daya. Sistem perkotaan terdiri atas struktur perkotaan dan sistem wilayah di mana struktur perkotaan terbentuk berdasarkan pola geografis wilayah dan pola jaringan aksesibilitas, sedangkan sistem wilayah berupa pembagian wilayah pengembangan.

Struktur perkotaan di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan, adapun PKL di Kabupaten Banjarnegara meliputi Perkotaan Banjarnegara dan Perkotaan Klampok. Kedua wilayah tersebut berperan sebagai pemacu pertumbuhan bagi Kabupaten Banjarnegara untuk meminimalkan kesenjangan antarwilayah. Fungsi pelayanan utama pada Perkotaan Banjarnegara dan Perkotaan Klampok yaitu di sektor: pemerintahan dan pelayanan umum, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, dan permukiman perkotaan. Delineasi Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan Kawasan Perkotaan Klampok didasarkan aglomerasi kawasan perkotaan melalui pemanfaatan lahan terbangun serta kelengkapan fasilitas pendukungnya.

Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan Kawasan Perkotaan Klampok yang berperan sebagai PKL tersebut didukung oleh 5 (lima) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yakni Kawasan Perkotaan Batur, Kawasan Perkotaan Kalibening, Kawasan Perkotaan Purwanegara, Kawasan Perkotaan Punggelan, dan Kawasan Perkotaan Wanayasa. Pusat Pelayanan Kawasan merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. Penentuan kawasan yang berfungsi sebagai PPK didasarkan atas: (1) merupakan ibukota kecamatan; (2) proyeksi jumlah penduduk; (3) jenis dan skala fasilitas pelayanan; dan (4) jumlah dan kualitas sarana dan prasarana. Penentuan lokasi tersebut bertujuan untuk pemerataan wilayah di Kabupaten Banjarnegara dalam pembangunan maupun pengembangan di segala sektor tatanan kehidupan masyarakat.

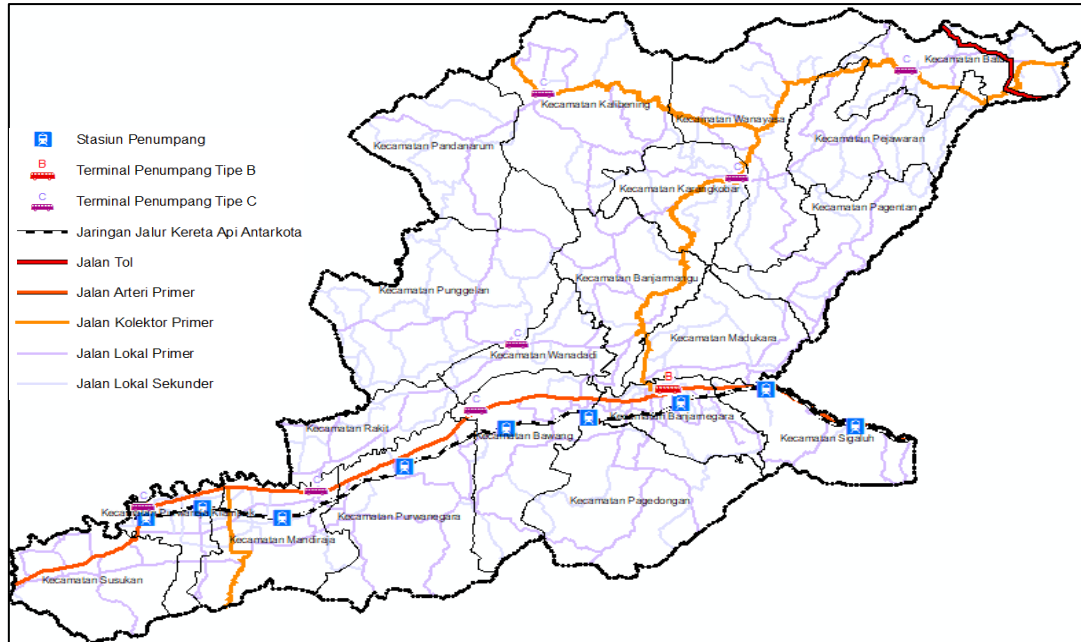


Gambar Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Kabupaten Banjarnegara

Untuk sistem perwilayahan, Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Wonosobo-Banjarnegara (Wonobanjar). Fungsi dan peran Kabupaten Banjarnegara dalam konstelasi regional didukung sistem jaringan jalan berupa jalan nasional (Jalan Arteri Primer), jalan provinsi (Jalan Kolektor Primer), dan jalan kabupaten (Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder) yang menghubungkan wilayah Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten/kota di sekitarnya, yaitu PKW Kawasan Perkotaan Wonosobo, PKL Kawasan Perkotaan Banyumas, dan PKL Kawasan Perkotaan KAJEN. Selain itu Kabupaten Banjarnegara termasuk ke dalam kawasan andalan yaitu kawasan Jawa Tengah Selatan dan Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Kawasan Andalan tersebut merupakan pengembangan kawasan melalui kegiatan ekonomi yang dijadikan sebagai motor penggerak, seperti kegiatan ekonomi dari sektor pariwisata dan potensi unggulan lainnya yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian wilayah itu sendiri dan wilayah di sekitarnya.

Dilihat dari jaringan prasarana yang mendukung sistem perkotaan di Kabupaten Banjarnegara, kondisi jaringan transportasi menunjukkan kondisi jalan yang cukup baik, namun terdapat ruas jalan provinsi yang memiliki kontur bergelombang (di wilayah bukit dan pegunungan). Selain itu pengembangan transportasi darat di Kabupaten Banjarnegara juga didukung oleh terminal penumpang tipe B yaitu Terminal Induk Banjarnegara di Kecamatan Banjarnegara serta rencana reaktivasi dan peningkatan (revitalisasi)

jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo beserta rencana pembangunan 9 stasiun kereta api yang berada di Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Purwareja Klampok, dan Kecamatan Sigaluh.



Gambar Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Z. Pengembangan Kawasan Budi Daya

Berdasarkan tujuan penataan ruangnya, Kabupaten Banjarnegara diarahkan pada perwujudan ruang berbasis pertanian, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya seperti perikanan; sektor pertambangan; perdagangan besar; transportasi dan pergudangan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa-jasa (jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya) yang terpadu dan berkelanjutan. Secara kewilayahan, kawasan budi daya yang ada di Kabupaten Banjarnegara baik kawasan pertanian, permukiman, peruntukan industri dan pariwisata mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan tingkat regional khususnya yang berada di PKL Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan PKL Kawasan Perkotaan Klampok.

Kawasan pertanian di Kabupaten Banjarnegara baik lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan dapat dikembangkan melalui potensi komoditas pertanian yang bervariasi. Hasil komoditas seperti padi, kentang, kol/kubis, wortel, salak, pisang, dan pepaya mensuplai adanya interaksi ekonomi baik di dalam wilayah maupun antar wilayah kabupaten sebagai penerima hasil pertanian dan/atau tujuan perdagangan. Secara spasial,

kawasan pertanian tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Adapun Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Banjarnegara tersebar di 8 (delapan) kecamatan yaitu Kecamatan Susukan, Kecamatan Purwareja Klampok, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Bawang, dan Kecamatan Sigaluh dengan masing-masing memiliki luasan yang berbeda serta total luasan kurang lebih 402 Hektare. Selain potensi pertanian dan industri, di Kabupaten Banjarnegara juga memiliki beberapa kawasan wisata yang dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi yang dapat dikunjungi karena memiliki keindahan alam dan panorama, kebudayaan yang diminati oleh wisatawan, serta bangunan peninggalan budaya yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Potensi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara meliputi pariwisata alam, pariwisata buatan, pariwisata budaya, dan pariwisata minat khusus yang secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

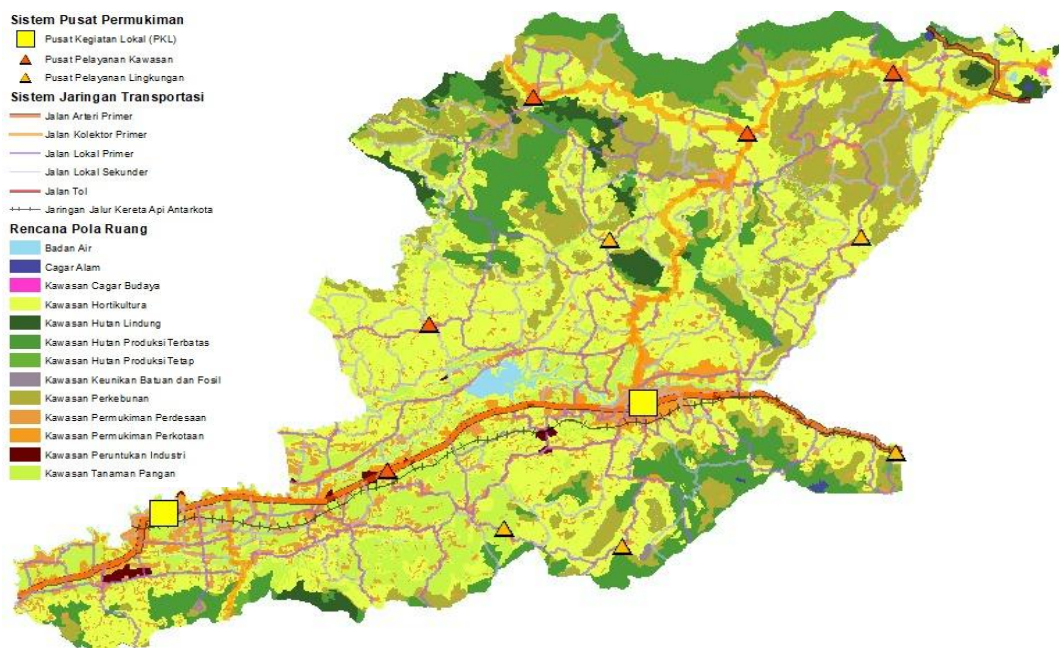
- a. Pariwisata alam terdiri dari: agro durian dan salak singomerto di Kecamatan Sigaluh, agro kentang di Kecamatan Batur, agro carica di Kecamatan Batur, air hangat kaliseti di Kecamatan Kalibening, air terjun situmpuk di Kecamatan Pejawaran, ambal seribu satu bukit pawinihan di Kecamatan Banjarmangu, angkruk ranis di Kecamatan Punggelan, agrowisata glempang di Kecamatan Mandiraja, batu tumpang di Kecamatan Bawang, bukit ares pawinihan (buaran) di Kecamatan Banjarmangu, bukit asmara situk (BAS) di Kecamatan Banjarmangu, bukit mandala di Kecamatan Kalibening, curug genting di Kecamatan Pejawaran, curug mrawu di Kecamatan Pejawaran, curug panaraban di Kecamatan Pejawaran, curuh pitu di Kecamatan Sigaluh, curug pletuk di Kecamatan Pagedongan, curug sikopel di Kecamatan Pagentan, curug sinom indah di Kecamatan Kalibening, curug sirawe di Kecamatan Batur, curug watir di Kecamatan Pandanarum, domba batur di Kecamatan Batur, goa lawet di Kecamatan Batur, gunung lumbung di Kecamatan Pagentan, karang gemantung di Kecamatan Pagedongan, kawah candradimuka di Kecamatan Batur, kawah sikidang di Kecamatan Batur, kawah sileri di Kecamatan Batur, kawah sinila di Kecamatan Batur, pegunungan gunung sewu clapar di Kecamatan Madukara, pegunungan jalatunda di Kecamatan Mandiraja, pemandian air panas di Kecamatan Susukan dan Kecamatan Wanayasa, pemandian kalianget di Kecamatan Kalibening, sumber air panas bitingan di Kecamatan Batur, sumur jalatunda di Kecamatan Batur, taman bunga di Kecamatan Batur, taman wisata pulas garden di Kecamatan
-

Banjarmangu, tampomas di Kecamatan Bawang, telaga merdada di Kecamatan Batur, telaga sewiwi di Kecamatan Batur, tlogo dringo di Kecamatan Batur, waduk mrica di Kecamatan Wanadadi, dan wsaiata alam kendil di Kecamatan Pandanarum.

- b. Pariwisata buatan terdiri dari: balai budaya di Kecamatan Banjarnegara, kolam renang paweden/anglirmendung di Kecamatan Karangobar, pasar ikan di Kecamatan Purwanegara, pasa lodra jaya di Kecamatan Bawang, pemandian air panas d'qiano di Kecamatan Batur, serayu park di Kecamatan Banjarnegara, surya yudha di Kecamatan Madukara, taman kota semampir di kecamatan banjarnegara, wisata mancing di Kecamatan Purwanegara, dan wisata serulingmas di Kecamatan Banjarnegara.
- c. Pariwisata budaya terdiri dari: bendungan banjarcahyana rejasa di Kecamatan Madukara, candi arjuna di Kecamatan Batur, candi bima di Kecamatan Batur, candi dwarawati di Kecamatan Batur, candi gatotkaca di Kecamatan Batur, desa budaya di Kecamatan Batur, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Susukan, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Pejawaran, dan Kecamatan Wanayasa; kampung bambu di Kecamatan Mandiraja, kampung dawet ayu rejasa di Kecamatan Madukara, kawasan kerajinan grabah di Kecamatan Purwareja Klampok, kuliner kota di Kecamatan Banjarnegara, makam dr. sulistyio di Kecamatan Purwanegara, makam sunan gripit di Kecamatan Banjarmangu, masjid kuno sunan giri langen di Kecamatan Susukan, museum kailasa dieng di Kecamatan Batur, pesarean sunan giri langen di Kecamatan Susukan, petilasan indrakila di Kecamatan Madukara, dan wisata pembuatan batik di Kecamatan Susukan.
- d. Pariwisata minat khusus terdiri dari: Arung jeram sungai serayu di Kecamatan Sigaluh, batik kayu di Kecamatan Susukan, bukit perkemahan di Kecamatan Pagedongan, gunung lawe di Kecamatan Banjarmangu, jelajah kota pusaka di Kecamatan Purwareja Klampok, mancing mania di Kecamatan Bawang, *off road* desa singomerto di Kecamatan Batur, *out bound* desa kalilunjar di Kecamatan Pejawaran, *out bound* pikas di Kecamatan Madukara, paket membatik desa gumelem di Kecamatan Susukan, paket membuat gerabah di Kecamatan Purwareja Klampok, pendakian gunung pangonan di Kecamatan Batur, pendakian gunung perahu di Kecamatan Batur, pendakian gunung petarangan di Kecamatan Batur, pendakian gunung sipandu di Kecamatan Batur, *rock climbing* di Kecamatan Pagedongan, serayu *adventure* di Kecamatan Sigaluh, wisata

edukasi panas bumi/ geologi di Kecamatan Batur, dan wisata tubing di Kecamatan Bawang.

Lokasi destinasi pariwisata yang tersebar di wilayah Kabupaten Banjarnegara tersebut berpotensi untuk dikembangkan ke skala yang lebih luas bahkan hingga jangkauan mancanegara yakni salah satunya adalah Kawasan Wisata Dieng. Secara konstelasi kewilayahan yang termuat dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027, Dieng berada pada Daerah Pariwisata Provinsi (DPP) Borobudur-Dieng dan Sekitarnya. Hal tersebut dapat meningkatkan pengembangan wisata Dieng baik dari segi jumlah wisatawan, infrastruktur pendukung wisata, maupun kerjasama stakeholder yang terlibat.



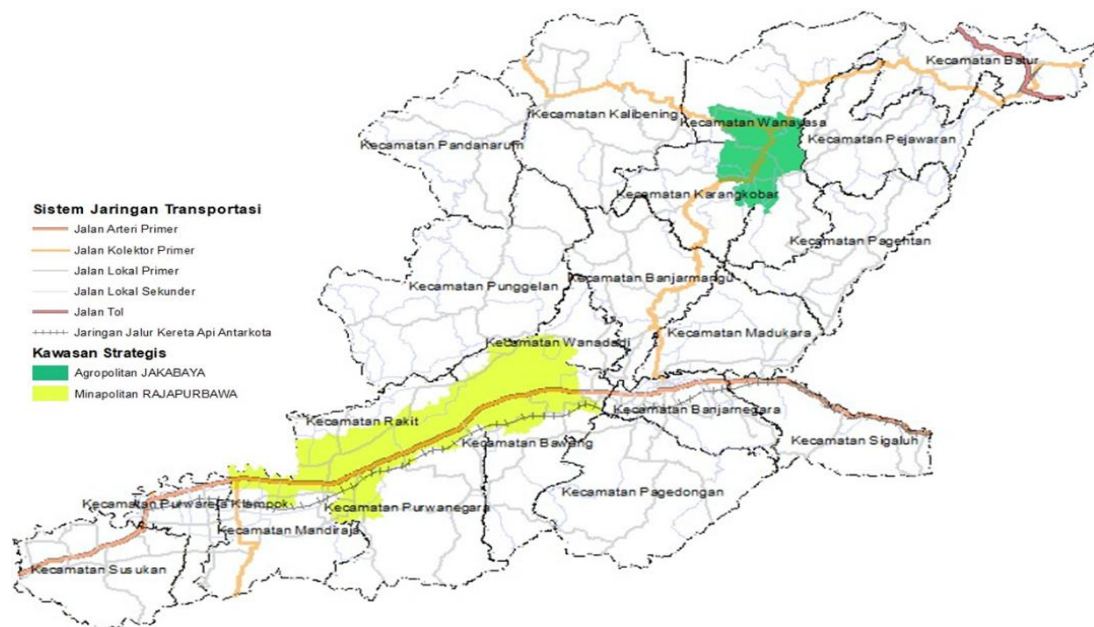
Gambar Pola Ruang Kabupaten Banjarnegara

Dalam RTRW Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2043, terdapat rencana pengembangan kawasan strategis kabupaten yang berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis tersebut mencakup 2 (dua) kawasan yaitu kawasan sentra produksi agropolitan jakabaya dan kawasan sentra produksi perikanan rajapurbawa. Kawasan strategis tersebut didukung dari karakteristik fisik dan potensi wilayah yang terkait dengan aktivitas agropolitan dan aktivitas minapolitan yang secara spesifik dapat meningkatkan pertumbuhan wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Kawasan sentra produksi agropolitan jakabaya merupakan kawasan yang aktivitas utamanya berupa pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu serta terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan di dalamnya. Pusat kegiatan inilah yang nantinya akan menjadi faktor utama pengembangan pada kawasan agropolitan melalui ketersediaan sarana prasarannya. Kawasan sentra produksi agropolitan jakabaya meliputi beberapa kecamatan; yaitu Kecamatan Batur, Kecamatan Karangkobar, Kecamatan Pejawaran, dan Kecamatan Wanayasa. Adapun arah pengembangan kawasan strategis jakabaya mencakup beberapa sektor; yakni pengembangan sektor pertanian, energi, dan pariwisata.

Selain kawasan strategis jakabaya, kawasan strategis di Kabupaten Banjarnegara lainnya adalah kawasan sentra produksi perikanan rajapurbawa yang merupakan kawasan dengan aktivitas utamanya berupa perikanan darat (air tawar) dan pengelolaan sumber daya alam tertentu serta terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan di dalamnya. Seperti halnya kawasan agropolitan, kawasan perikanan/minapolitan pun memiliki pusat kegiatan yang berfungsi sebagai faktor utama pengembangan kawasan melalui ketersediaan sarana prasarannya. Kawasan sentra produksi perikanan rajapurbawa meliputi beberapa kecamatan; yaitu Kecamatan Bawang, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit, dan Kecamatan Wanadadi. Adapun arah pengembangan kawasan strategis rajapurbawa mencakup beberapa sektor; yakni pengembangan sektor permukiman, perdagangan dan jasa, industri, perikanan, pertanian, energi, dan pariwisata.

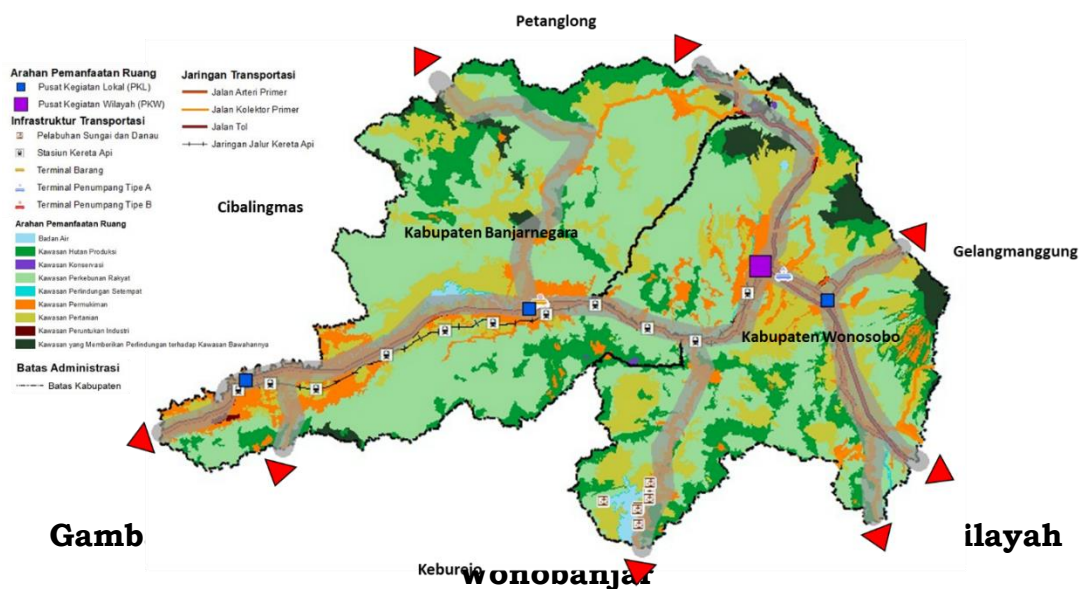


Gambar Peta Kawasan Strategis Kabupaten Banjarnegara

Dalam lingkup nasional sebagaimana yang tercantum dalam PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, bahwa Kabupaten Banjarnegara termasuk ke dalam Kawasan Andalan yaitu kawasan Jawa Tengah Selatan dan Kawasan Borobudur dan sekitarnya. Keberadaan Banjarnegara dengan potensi alam salah satunya berupa kawasan dataran tinggi Dieng secara tidak langsung memberikan kontribusi untuk perkembangan kawasan dan wilayah di sekitarnya. Dengan menawarkan panorama alam yang sangat indah, destinasi wisata seperti dataran tinggi Dieng dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata skala domestik maupun mancanegara. Selain itu wilayah Sungai Serayu – Bogowonto yang melewati Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam wilayah sungai strategis nasional. Wilayah Sungai Serayu – Bogowonto menjadi urusan strategis nasional karena sumber daya air yang sangat potensial sehingga dapat dikembangkan untuk kegiatan wisata berupa arung jeram dan kegiatan pertambangan mineral bukan logam. Kabupaten Banjarnegara juga memiliki beberapa cagar alam yakni di antaranya Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, Cagar Alam Pringamba I dan II, dan Cagar Alam Geologi Karangsambung yang termasuk ke dalam kawasan lindung nasional.

Selain berkontribusi dalam pengembangan wilayah di lingkup nasional, Kabupaten Banjarnegara juga memiliki peran dalam pengembangan pada lingkup kepulauan Jawa-Bali sebagaimana yang tercantum dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2012 yakni Kabupaten Banjarnegara termasuk ke dalam Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Buntu – Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Secang sebagai salah satu poros pendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali. Dari sektor energi kelistrikan keberadaan Waduk Mrica yang terletak di Kecamatan Bawang menjadi strategis sebagai kepentingan di lingkup Jawa-Bali karena mampu mengelola beberapa sub unit yang ada di Jawa Tengah dengan total kapasitas terpasang sebesar 310 MW. Tidak hanya mendukung perekonomian dari sektor wisata alam, Kawasan Dataran Tinggi Dieng juga memiliki potensi sumber daya mineral berupa panas bumi yang saat ini dikelola oleh PT. Geodipa Energi. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Geodipa memiliki total potensi energi panas bumi di sekitar Dieng sebesar ± 400 MW yang dapat mendukung penyediaan listrik khususnya di lingkup pulau Jawa dan Bali.



Posisi Kabupaten Banjarnegara terhadap wilayah sekitarnya termasuk regionalisasi WP Wonobanjar menghubungkan antar pusat kegiatan yang dilalui rencana sistem jaringan transportasi yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, jaringan kereta api, stasiun kereta api, dan terminal penumpang. Jika dilihat konstelasi kewilayahan yang lebih mikro, yakni berdasarkan draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam pembagian Wilayah Pengembangan (WP) Kabupaten Wonosobo – Kabupaten Banjarnegara (Wonobanjar). Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara menjadi pintu masuk jalur tengah dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kota Semarang menuju Purwokerto atau Kabupaten Cilacap serta wilayah penghubung antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Wilayah Pengembangan Wonobanjar memiliki rencana arah pengembangan yang meliputi:

- Pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek – Wonosobo – Banjarnegara – Klampok;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu;
- Pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi erupsi gunung api dan gerakan tanah;
- Meningkatkan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
- Pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan dalam rangka mendorong pengembangan bagian selatan wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengendalikan alih fungsi lahan sawah; dan

- g. Peningkatan akses dan kualitas destinasi wisata KSPN Dieng dan *Geopark* Dieng.

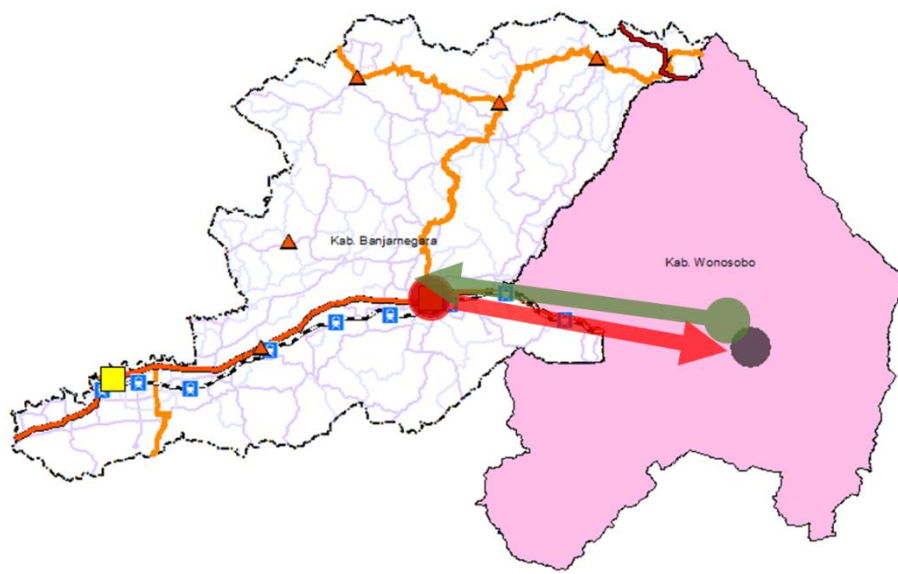
Hasil kebijakan pengelompokan kewilayahan strategis di Provinsi Jawa Tengah salah satunya yakni Kawasan Wonobanjar yang terdiri dari Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB nya, yang mana kedua wilayah tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun memiliki nilai PDRB yang berbeda yakni sebagai berikut:

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Kabupaten	2019	2020	2021	2022	2023
Wonosobo	13.793,04	13.566,18	14.064,76	14.770,50	15.405,98
Banjarnegara	15.246,86	15.045,88	15.536,47	16.359,10	17.173,45
Rata-rata PDRB Wonobanjar	14.519,95	14.306,03	14.800,62	15.564,80	16.289,72
Rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah	28.329,04	27.577,92	28.494,89	30.007,95	31.501,81

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata PDRB Wonobanjar relatif masih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu adanya kebijakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah Wonobanjar sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*). Pusat pertumbuhan ekonomi nantinya dapat menggerakkan dan memacu pembangunan guna meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli daerah. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dapat difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi tumbuh disertai dengan fasilitas pendukungnya. Misalnya pengembangan pada daerah dataran tinggi Dieng yang berada di wilayah Wonobanjar baik pengembangan dari sektor pariwisata, energi, maupun pertanian.

Berdasarkan Draft Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, secara keruangan Kabupaten Wonosobo berperan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Posisi Kabupaten Wonosobo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara memiliki pengaruh interaksi keruangan satu sama lain. Beberapa kegiatan yang berkaitan dari kedua wilayah tersebut yang salah satunya berupa rantai produksi-distribusi hasil pertanian dihubungkan oleh keberadaan jalan arteri primer (jalan nasional).



Gambar Peta Interaksi Keruangan Kabupaten Banjarnegara terhadap Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Banjarnegara memiliki beragam potensi untuk dikembangkan dalam rangka pembangunan wilayah melalui pendekatan pusat pertumbuhan. Potensi tersebut meliputi potensi sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata yang tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Hasil analisis terhadap pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Banjarnegara, diperoleh 7 (tujuh) kecamatan yang berperan sebagai pusat pertumbuhan beserta kecamatan hinterlandnya; yaitu Perkotaan Banjarnegara, Perkotaan Klampok, Perkotaan Batur, Perkotaan Kalibening, Perkotaan Purwanegara, Perkotaan Punggelan, dan Perkotaan Wanayasa. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis skalogram, analisis keruangan (gravitasi), analisis rank size rule, dan analisis indeks sentralitas. Pengelompokan atau pembagian wilayah dalam suatu kawasan pusat kegiatan tersebut bertujuan agar pembangunan disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah dan saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan. Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Purwareja Klampok adalah kecamatan yang berada pada hirarki paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Selain itu berdasarkan draft revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah kecamatan tersebut berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) beserta kecamatan hinterlandnya. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan yang dilengkapi oleh fasilitas umum dan didukung dari kondisi fisik lingkungannya. Ketersediaan sarana dan prasarana di Kawasan Perkotaan Banjarnegara dan Kawasan Perkotaan Klampok menjadi dasar penting dijadikannya kawasan tersebut sebagai Pusat Kegiatan Lokal; seperti rumah sakit sebagai sarana kesehatan, politeknik banjarnegara sebagai sarana pendidikan, pasar induk banjarnegara sebagai sarana perdagangan dan jasa, dan sarana lainnya.

Posisi hierarki di bawahnya seperti Kecamatan Batur, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Punggelan, dan Kecamatan Wanayasa beserta kecamatan hinterlandnya berperan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang artinya kawasan tersebut berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan. Kawasan yang berperan sebagai PPK juga banyak berkembang usaha dan aktivitas perekonomian masyarakat, seperti perdagangan jasa, industri, pertambangan, dan wisata berdasarkan atas potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Melihat pengembangan pusat pertumbuhan tersebut diharapkan akan memberikan pengaruh bagi pertumbuhan daerah secara komprehensif. Peran pemerintah daerah untuk memberdayakan sektor potensial sebagai penggerak perekonomian daerah sangat diperlukan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Perumusan permasalahan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara diawali dengan identifikasi permasalahan berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan. Rumusan permasalahan pembangunan jangka panjang daerah dan penjelasan masing-masing permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan daerah yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatnya tingkat kerawanan bencana. Dengan proyeksi jumlah penduduk Banjarnegara yang mencapai 1.203.111 jiwa pada tahun 2045 (naik 13,37%) dari jumlah penduduk tahun 2023 dengan kepadatan mencapai 1.125 jiwa per km², maka berpotensi akan menurunkan daya tampung dan daya dukung lingkungan, khususnya dalam penyediaan pangan dan air minum. Pertumbuhan penduduk akan mendorong adanya konversi lahan pangan ke non pangan, peningkatan produksi sampah, pengurangan daerah tangkapan air, dan pencemaran lingkungan.

Potensi kondisi lingkungan akibat pertumbuhan dan penambahan aktivitas penduduk tersebut akan menambah beban pada lingkungan daerah yang secara geografis merupakan daerah rawan bencana. Dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang cenderung menurun, maka menunjukkan semakin menurunnya kualitas air, udara dan tutupan lahan. Menurunnya vegetasi lahan, dapat meningkatkan tingkat kerawanan bencana, baik longsor, banjir, maupun kekeringan. Selain itu masih tingginya sedimentasi di Kawasan dataran tinggi dieng dan kerusakan akibat aktivitas galian C dapat mengancam keanekaragaman hayati. Dengan Indeks risiko bencana Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 sebesar 121,40 pada kategori sedang, meningkat dari tahun 2022 sebesar 107,61.

Selain pada permasalahan lingkungan, pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan peningkatan usia harapan hidup dapat menyebabkan permasalahan "*Aging Population*", dimana struktur demografi penduduk didominasi oleh usia tua. Kondisi tersebut secara langsung menjadi tekanan bagi penduduk di usia produktif seperti biaya hidup dan kesehatan dan bagi pemerintah menjadi permasalahan dalam penyediaan fasilitas pelayanan bagi lansia.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat meliputi:

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat

Sampai dengan tahun 2023 masih ditemui beberapa permasalahan kesehatan seperti prevalensi stunting, angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta prevalensi balita gizi kurang yang masih tinggi. Hal-hal tersebut mempengaruhi usia harapan hidup masyarakat di Kabupaten Banjarnegara yang posisi relatifnya berada pada peringkat 25 di Provinsi Jawa Tengah. Linear dengan hal tersebut, dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat juga masih rendah. Rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan penduduk yang berusia 25 tahun ke atas secara rata-rata baru menempuh pendidikan hingga SMP kelas VII. Posisi relatif rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara berada pada peringkat 33 di Provinsi Jawa Tengah. Dari sisi pemberdayaan perempuan, masih terjadi ketimpangan gender dengan indeks ketimpangan sebesar 0,236 dan indeks pemberdayaan gender baru mencapai 74,30.

Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut, menyebabkan masyarakat tidak cukup dapat berkompetisi dalam lapangan kerja dan lapangan berusaha, sehingga tingkat pengangguran terbuka masih tinggi. Minimnya akses terhadap pendapatan dapat menjadi penyebab kemiskinan daerah menjadi sulit diturunkan. Kondisi tersebut dapat menjadi *constraint* pada target pencapaian RPJPN yaitu pada tahun 2045 pendapatan per kapita masyarakat setara dengan negara maju karena masyarakat belum memiliki akses yang luas terhadap peningkatan pendapatan. Kesenjangan pendapatan juga masih relatif tinggi dan cenderung meningkat jika dilihat dari capaian indeks Gini.

2. Budi pekerti dan nilai-nilai budaya yang belum menjadi karakter pendorong kemajuan daerah

Budi pekerti dan nilai-nilai budaya belum menjadi karakter masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, sehingga belum berkembang dan menjadi suatu pendorong kinerja pembangunan daerah, baik kemajuan perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat.

C. Aspek Daya Saing

Terkait aspek daya saing daerah, permasalahan di daerah meliputi:

1. Masih rendahnya nilai investasi sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Perekonomian daerah belum didukung investasi yang memadai. Pada tahun 2023, nilai ekonomi Banjarnegara mencapai Rp. 27,00 triliun yang sebagian besar digerakkan oleh konsumsi rumah tangga sebesar 77,53%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 21,63% dan konsumsi pemerintah sebesar 7,19%. Peningkatan pasar perlu

ditopang oleh investasi (PMTB) sebagai komponen penting bagi peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

2. Masih rendahnya kontribusi dan daya ungkit sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian

Kabupaten Banjarnegara memiliki banyak kawasan wisata seperti kawasan wisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan wisata buatan. Meski begitu, pengelolaan dan daya ungkit pada sektor lain, seperti UMKM belum optimal. Selain itu, untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor ekstraktif, pengembangan industri perlu ditingkatkan sehingga lebih memiliki kontribusi pada struktur perekonomian daerah. Untuk sektor tersier, Trade balance (neraca perdagangan) Kabupaten Banjarnegara semakin baik, yang berarti bahwa besaran ekspor semakin tinggi dan mendekati besaran impor, dari sebesar -13,80% pada tahun 2018 menjadi sebesar -8,87% pada tahun 2023. Kinerja sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menurun dari sebesar 14,72% pada tahun 2014 menjadi sebesar 14,64% pada tahun 2023.

3. Pengembangan potensi di sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan masih kurang optimal

Potensi kawasan pengembangan tanaman pangan kurang lebih seluas 19.079 hektar, sedangkan kawasan hortikultura kurang lebih 56.573 hektar tersebar di seluruh kecamatan, meliputi Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangobar, Madukara, Mandiraja, Pegedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, dan Wanayasa. Komoditas perkebunan rakyat yang dapat dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi: purwaceng; carica; aren; cengkeh; gelagah arjuna; kakao; kapuk randu; kapulaga; kayu manis; kelapa dalam; kelapa deres; kelapa hibrida; kemukus; kina; kopi arabika; kopi robusta; lada; melati gambir; pala; panili; nilam; teh; dan karet. Kawasan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan ternak besar, ternak kecil dan unggas terletak di Kecamatan Mandiraja; Purwanegara; Wanadadi; Banjarmangu; Banjarnegara; Madukara; Rakit; Punggelan; Pagentan; Pejawaran; dan Wanayasa. Sementara itu Kawasan yang dapat dikembangkan untuk pengembangan aneka ternak berada di seluruh Kecamatan. Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Banjarnegara berupa perikanan darat yang tersebar di Kecamatan Rakit; Mandiraja. Purwanegara; Bawang; dan Wanadadi.

4. Budaya inovasi yang belum berkembang

Kemajuan daerah dapat dilihat salah satunya dari inovasi. Skor kapabilitas inovasi daerah pada indeks daya saing hanya mendapatkan angka 1,35 dari nilai maksimal 5. Bersama dengan pilar dinamika bisnis, kapabilitas inovasi membentuk komponen ekosistem inovasi dengan nilai rata-rata baru sebesar 2,04. Selain itu, indeks inovasi daerah juga baru mencapai skor 42,90 (kategori inovatif), berada pada peringkat 228 diantara 415 kabupaten lain di Indonesia.

5. Kapasitas serta kualitas infrastruktur masih kurang memadai

Sebagai pendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya, kualitas infrastruktur yang memadai sangat dibutuhkan. Sebagai jalur distribusi barang dan jasa, masih rendahnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik akan menjadi penghambat. Selain kondisi jalan, daerah juga dihadapkan pada jalan dan jembatan yang masih belum memenuhi kriteria luas jalan kabupaten. Kondisi geografis dan bencana longsor menjadi tantangan tersendiri bagi pemenuhan layanan transportasi yang memadai bagi masyarakat. Selain jalan dan jembatan, infratraktur pendukung perekonomian lainnya juga perlu mendapat perhatian. Dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan di masa depan, maka produktivitas komoditas pertanian, khususnya tanaman pangan menjadi sangat penting. Di tengah musim yang tidak stabil karena perubahan iklim serta laju konversi lahan, intensifikasi menjadi penting, salah satunya peningkatan akses lahan terhadap layanan irigasi.

Selain infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, infrastruktur sosial dan budaya juga masih perlu pembenahan. Banyaknya kondisi fisik sekolah dan puskesmas yang masih perlu ditingkatkan perlu penanganan komprehensif. Peningkatan kondisi infrastruktur sosial ini, selain merupakan upaya untuk meningkatkan mutu layanan, juga untuk menjamin keselamatan pengguna layanan. Selain sekolah dan puskesmas, infrastruktur perumahan, air minum dan sanitasi juga masih perlu ditingkatkan.

D. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek pelayanan umum daerah adalah belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Beberapa aspek masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi dalam men-*deliver* pelayanan kepada masyarakat. Beberapa masalah diantaranya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang masih rendah, akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan daerah yang masih perlu ditingkatkan, pengendalian risiko yang belum optimal, integritas yang masih perlu ditingkatkan, penerapan sistem merit, serta penerapan budaya melayani yang belum optimal.

Permasalahan selanjutnya dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1. Potensi ekonomi yang belum termanfaatkan secara optimal untuk	a. Masih rendahnya nilai investasi sehingga belum mampu mendongkrak	Infrastruktur yang masih terbatas dan iklim investasi yang belum mendukung

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
menggerakkan perekonomian daerah	pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	
	b. Masih rendahnya kontribusi dan daya ungkit sektor sekunder dan tersier dalam perekonomian	1) Investasi di bidang jasa pariwisata masih kurang 2) Wisata di luar Dieng dari pekalongan dan Pantura sebagai jalur utama belum berkembang 3) Kurangnya infrastruktur dan fasilitas di destinasi wisata 4) Kurangnya usaha industri dan usaha mikro dan kecil dalam hal pemasaran produk, relatif tertinggal dibandingkan daerah lain 5) Pasar sebagai sarana perdagangan komoditas belum sepenuhnya memadai
	c. Pengembangan potensi di sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan masih kurang optimal	1) Minat generasi muda untuk bertani semakin berkurang sehingga menjadi kendala di masa mendatang 2) Produktivitas pertanian yang masih kurang, dipengaruhi pemanfaatan teknologi pertanian dan digitalisasi sistem informasi pertanian yang masih rendah 3) Pengolahan hasil pertanian yang belum berkembang sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah bagi petani, dipengaruhi turnover atau keluar masuknya karyawan dalam usaha pengolahan pertanian masih tinggi 4) Pemasaran produk hasil pertanian yang belum baik 5) Konsumsi pangan yang belum beragam dan berimbang, konsumsi karbohidrat (beras) masih tinggi
	d. Budaya inovasi yang belum berkembang	Pemberian insentif atau hadiah yang relatif kecil bagi para inovator, sehingga tidak ada

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
		minat untuk menumbuhkan inovasi yang baru
	e. Kapasitas serta kualitas infrastruktur masih kurang memadai	1) Kurangnya aksesibilitas wilayah antara wilayah bagian utara dan bagian selatan 2) Penurunan ijin trayek karena adanya perubahan kebijakan dan pengelolaan jaringan trayek yang belum optimal 3) Banyaknya penggunaan angkutan barang sebagai angkutan penumpang yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan 4) Pelayanan uji kir masih manual dilaksanakan belum berbasis Teknologi informasi 5) Belum optimalnya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan 6) Rendahnya cakupan pemenuhan air bersih terutama pada wilayah pegunungan, terkendala topografi wilayah yang sulit 7) Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni, terkendala pendataan rumah tidak layak huni 8) Belum tertatanya daerah kumuh

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
2. Kualitas sumber daya manusia yang relatif tertinggal sehingga menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi	a. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial masyarakat	1) Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang belum merata antar wilayah 2) Akses terhadap Pendidikan yang belum merata antar wilayah 3) Keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan sosial politik yang masih rendah. 4) Keterbatasan fasilitas ramah perempuan, anak dan penyandang disabilitas 5) Pusat pertumbuhan ekonomi yang belum merata, masih terpusat di wilayah perkotaan 6) Realisasi investasi yang rendah dipengaruhi oleh infrastruktur yang kurang memadai, dan iklim investasi yang belum mendukung 7) Kompetensi calon tenaga kerja yang kurang dan ketidaksesuaian antara <i>supply</i> dan <i>demand</i> tenaga kerja 8) Terbatasnya cakupan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 9) Kurangnya fasilitas untuk melayani penyandang masalah kesejahteraan sosial
	b. Budi pekerti dan nilai-nilai budaya yang belum menjadi karakter pendorong kemajuan daerah	1) Penanaman nilai-nilai budaya dan budi pekerti yang masih kurang 2) Perhatian terhadap kelompok seni dan budaya masih kurang 3) Kegiatan kebudayaan belum terfasilitasi dengan baik 4) Pelestarian situs dan cagar budaya yang masih kurang

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
3. Terjadinya degradasi lingkungan	Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta meningkatnya tingkat kerawanan bencana	1) Kurangnya pemanfaatan limbah pangan dari sisa pangan yang tidak habis dikonsumsi. 2) Adanya vandalisme (perilaku merusak) pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 3) Daya dukung hulu (daerah dieng) peresapan daerah tanah tinggi menurun karena alih fungsi dari daerah resapan ke pertanian 4) Tingginya erosi dan sedimentasi sungai 5) Belum optimalnya pengelolaan dan konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS) 6) Belum optimalnya penanganan sampah 7) Belum semua desa terbentuk Desa Tanggap bencana 8) Masih diperlukan peremajaan sarana dan prasarana kebencanaan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
4. Kualitas Tata kelola pemerintahan dan yang belum optimal.	belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi	1) Keterbatasan infrastruktur kompetensi SDM dan teknologi informasi 2) Kualitas perencanaan, penganggaran, pelaporan dan manajemen kinerja pemerintah daerah yang belum optimal 3) Kurangnya upaya pengendalian risiko dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan 4) Upaya perwujudan transparansi dan pengelolaan anggaran dan pencegahan korupsi yang belum optimal 5) Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih rendah dan sistem manajemen kinerja yang belum optimal 6) Fasilitas pelayanan publik yang belum memadai dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik masih kurang 7) Budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang belum optimal

E. Isu Strategis

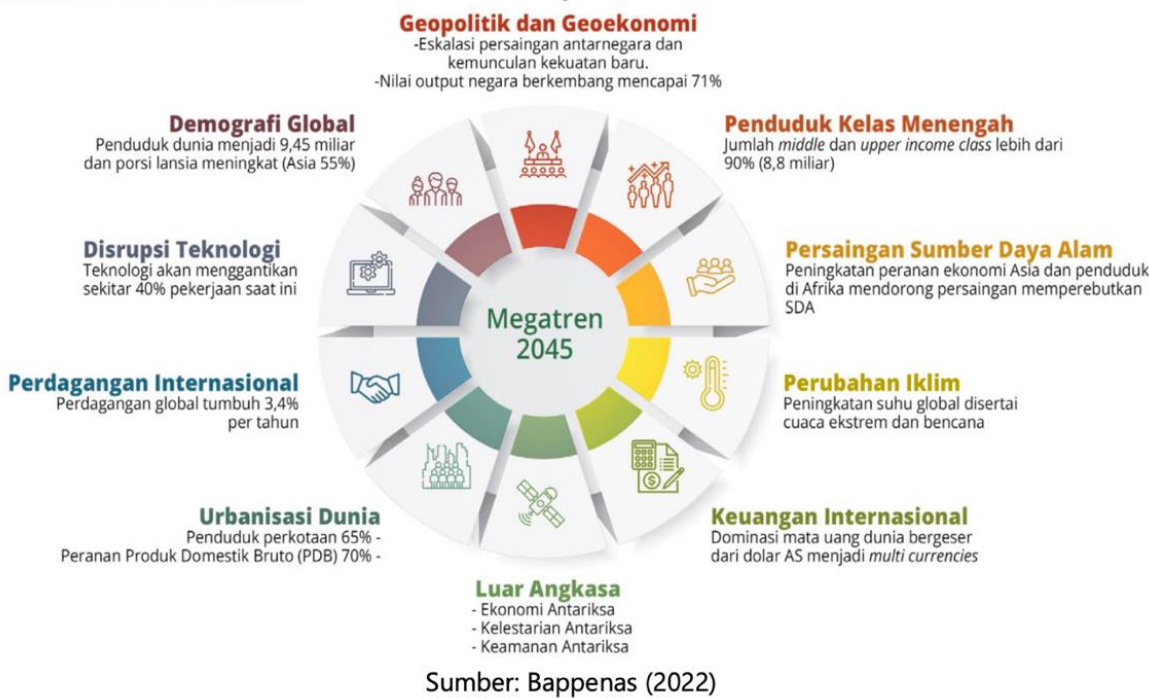
Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis daerah disimpulkan dari: (1) isu strategis lingkungan (Isu global, nasional, dan regional); (2) mengidentifikasi isu strategis lingkungan mencakup ekonomi, teknologi, lingkungan hidup, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, dan budaya sampai tahun 2045; (3) masalah sebagai bagian dari isu strategis daerah; dan (4) potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa kondisi lingkungan strategis yang perlu

diperhatikan dalam rangka perumusan isu strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dikenal dengan 10 kecenderungan besar (*global megatrend*), sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar Megatrend Global 2045

Penjelasan masing-masing kecenderungan besar (*global megatrend*) diuraikan dibawah ini.

a. Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (*life-span*) yang semakin panjang.

Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan

seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Dalam demografi skala mikro, perubahan struktur dan bentuk keluarga, perkembangan teknologi digital, serta penetrasi global memengaruhi kualitas keluarga. Mobilitas penduduk dan pergeseran ideologi berisiko memunculkan struktur dan bentuk keluarga yang berbeda. Semakin maraknya fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunnya angka kelahiran. Sementara itu, perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di negara berkembang. Akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal-hal tersebut menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia dan Afrika yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi stabil, menjadi daya tarik investor di kawasan tersebut. Pada saat bersamaan, beberapa negara berkembang di kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia di masa mendatang.

b. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan.

Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia, telah menarik perhatian banyak pihak. Hal ini kemudian berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di kawasan maupun di luar kawasan.

Indonesia menyikapi kontestasi geopolitik kawasan Indo-Pasifik tersebut dengan mengedepankan ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* untuk memperkuat kerja sama dan meredam friksi di kawasan. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran untuk menciptakan peluang ekonomi baru yang inklusif di kawasan melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara.

Krisis di berbagai sektor memiliki risiko ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, risiko sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Tantangan- tantangan yang bersifat tanpa batas (*borderless*) membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor baik di dalam negeri maupun internasional.

Terkait Geoekonomi, Nilai output dunia negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia, meningkat dari 34 persen pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71 persen dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54 persen dari total nilai output global. Peranan negara maju (G7) akan mengecil dengan kontribusi terhadap nilai output yang menurun dari 32 persen pada tahun 2015 menjadi 20 persen pada tahun 2050. Secara umum, pendapatan per kapita negara-negara maju tetap lebih tinggi dari negara berkembang. Meskipun demikian, 84 negara berkembang pada tahun 2050 diperkirakan akan memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi daripada negara-negara Eropa Selatan pada tahun 2015.

Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Sebagian besar negara berkembang selama 60 puluh tahun terakhir mengandalkan ekspor komoditas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi 54 persen ekspor negara di kawasan Amerika Latin berbasis pada produk komoditas, 81 persen di Afrika, dan 75 persen di negara kawasan Timur Tengah. Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang.

Institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penopang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki sumber daya manusia dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Dengan kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Negara berkembang memiliki struktur demografi yang menguntungkan

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan kerja di negara berkembang. Kawasan Asia akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari tingkat tabungan yang tinggi dan peningkatan produktivitas. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan di negara-negara di kawasan Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

Perekonomian global pada tahun 2050 pada tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibanding tahun 2015. Pada tahun 2015 perekonomian global adalah sebesar USD 74,0 triliun, dengan kontribusi Amerika Serikat sebesar USD 17,9 triliun, Tiongkok sejumlah USD 11,0 triliun, dan India senilai USD 2,1 triliun (IMF, *World Economic Outlook*, Oktober 2016). Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi dari 5 negara terbesar (Tiongkok, India, AS, Jepang, & Indonesia) mencapai kurang lebih 55 persen dari nilai output dunia.

c. Disrupsi Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti *Internet of Things* (IoT), *blockchain*, *Hyper Connection*, *Artificial Intelligence* (AI), *Distributed Ledger Technology* (DLT), *Production Lifecycle Management*, *Robotic Process Automation* (RPA), *Edge Computing*, *Auto Robotic System*, 3D, dan *Future Technologies*. Disrupsi teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan berbagai bentuk disrupsi teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan secara optimal disrupsi teknologi yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.

Pandemi COVID-19 telah mendorong akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor. Selama pandemi, banyak pelaku usaha seperti UMKM dan koperasi mengembangkan digitalisasi usaha untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha. Meskipun demikian, tingkat pemanfaatan teknologi digital dalam operasional usaha masih terbatas dan belum merata karena faktor sumber daya manusia, permodalan, dan infrastruktur penunjang. Faktor penghambat pemanfaatan teknologi dan digital perlu diatasi karena penggunaan teknologi dan digital dapat mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Disrupsi teknologi yang berkembang di masa depan akan memengaruhi sektor manufaktur. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri seperti: nanotechnology; blockchain; robotika cerdas, IoT, AI dan teknologi imersif;

digitalisasi yang mendukung konektivitas; material maju; rekayasa genetik dan bioteknologi; teknologi lanjutan dari *additive manufacturing* (3D printing, rapid prototyping, powder bed system, dan lainnya); inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi; serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Disrupsi teknologi di masa depan juga akan memengaruhi sektor pendidikan. Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis *artificial intelligence* (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Melalui pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan, dan ekonomis.

Disrupsi teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling terdampak dan hanya meninggalkan sedikit pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah gempuran disrupsi. Bahkan, pekerjaan yang membutuhkan aspek kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang juga berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan.

Selain itu, disrupsi teknologi juga berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi. Pekerjaan jarak jauh (*remote working*) menciptakan peluang di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan mendorong perkembangan sektor lain yang mendukung pola *work from anywhere* (WFA). Akan tetapi, di sisi lain hal tersebut akan memukul sektor yang selama ini bertumpu pada pola kerja konvensional, seperti properti perkantoran dan real estate. Pola kerja jarak jauh mengasumsikan terbangunnya kepercayaan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga kualitas hasil pekerjaan terjaga.

Di sisi lain, disrupsi teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Disrupsi teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya. Peralihan menuju era digital dalam konteks tata kelola akan mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi di antara masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah.

Disrupsi teknologi dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi. Pemanfaatan teknologi dapat membantu mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu, dan sistematis serta penataan kelembagaan negara. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan

peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

d. Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia sendiri, dalam empat dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Peningkatan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Berdasarkan data UN, pada tahun 2020 terdapat 23 megacities, yaitu kota dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa di dunia (di mana lebih separuhnya berada di negara *emerging economies*). Jumlah ini meningkat pesat sejak tahun 1970, di mana pada saat itu dunia hanya memiliki dua *megacities*.

Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada banyak kota Asia dan Afrika, sekitar 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyerak ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. Dari sisi ekonomi, terjadi perubahan aktivitas penduduk ke arah dominasi sektor industri, jasa, dan perdagangan. Tren ini mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kompak (*compact*) melalui efisiensi layanan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat memacu inovasi di kawasan perkotaan, khususnya dalam mengatasi masalah yang timbul sehari-hari. Pendekatan teknologi pintar dan pengelolaan informasi berbasis maha data ke depan akan menjadi kunci bagi upaya kawasan perkotaan untuk menjadi yang terdepan. Di sisi lain, dampak pandemi COVID-19, di samping menimbulkan kerugian jiwa dan material, juga menjadi pemicu perkembangan teknologi yang memudahkan proses kolaborasi lintas ruang dan waktu. Tantangan terhadap pengarusutamaan pendekatan hijau juga menjadi peluang bagi penerapan kebijakan yang bukan hanya humanis, melainkan juga ramah lingkungan. Kota yang mampu beradaptasi terhadap transformasi pasca pandemi dan pengarusutamaan pendekatan hijau tersebut akan mampu menarik SDM kompetitif untuk menetap dan berkarya.

e. Perdagangan Internasional

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang mendorong berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian Negara berkembang terutama negara E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam G7. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India dan negara-negara ASEAN. Selain itu, peningkatan pendapatan serta proyeksi peningkatan demografi

penduduk di Kawasan Afrika, Nigeria dan beberapa negara di Afrika Selatan, mendorong perdagangan internasional bergerak ke kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang tinggi.

Kolaborasi produksi bersama internasional (*global production networks/GPN*) dan rantai pasok global (*global value chain/GVC*) semakin menguat dan terdiversifikasi. Skema GPN dan GVC menjadi salah satu pilihan utama bagi industri dalam melakukan produksi. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari GPN dan GVC tidak hanya mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah, tetapi juga meningkatkan penerimaan investasi asing dan perdagangan internasional bagi suatu negara. Sementara itu, Kawasan Asia Timur dan ASEAN akan berkembang sebagai pusat GVC dunia seiring dengan infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM industri yang berkualitas, khususnya dalam memproduksi barang manufaktur berorientasi ekspor.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Perkembangan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi. Selain itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan. Negara yang dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan digital, memanfaatkan hilirisasi sumber daya alam dan mineral untuk memproduksi produk yang lebih kompleks dan berkelanjutan, berpeluang semakin memiliki peran penting dalam rantai nilai perdagangan global.

Kerja sama Kawasan menciptakan hub perdagangan strategis. Kerja sama Kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis, akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi. Dengan demikian, perdagangan internasional akan berpusat di Asia terutama Kawasan Indo-Pasifik.

f. Keuangan Internasional

Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja negara yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren ke depan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.

Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari mata uang fiat suatu negara. CBDC juga

merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset kripto yang berpotensi menimbulkan sumber risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Berkembangnya berbagai inovasi teknologi seperti *Internet of Things* (IoT), *Cloud Computing*, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Machine Learning* telah membawa perubahan yang signifikan pada industri jasa keuangan. Ke depannya puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dengan kemampuan (*skill*) yang baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan pesat perusahaan teknologi finansial banyak mengandung risiko terlebih regulasi yang belum memadai dapat menimbulkan implikasi stabilitas keuangan.

g. Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen terhadap populasi dunia. Setiap tahunnya sekitar 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru (*new life style*). Jenis pekerjaan baru yang diperkirakan berkembang di masa mendatang antara lain, pekerjaan terkait dengan teknologi tinggi, pekerjaan melalui *virtual-metaverse*, serta pekerjaan lain yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis, tetapi di sisi lain berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

h. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA di antaranya air, pangan, dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, di antaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i. Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan Keanekaragaman Hayati (tiga krisis global-*The Triple Planetary Crisis*)

secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat tiga krisis global diperkirakan akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan, seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. *Triple planetary crisis* akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama secara *business-as-usual* (BaU) menuju ke praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global. Beberapa negara maju dan berkembang berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK secara ambisius, seperti Norwegia dengan target net zero emission pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia sendiri mendeklarasikan pada tahun 2060. Pelaksanaan jalur pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang. Stimulus hijau dan paket-paket stimulus lainnya menjadi tren kebijakan global ke depan.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama di dunia. Kelangkaan sumber energi fosil dan isu perubahan iklim mendorong seluruh negara menggunakan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi utama. Teknologi energi terbarukan akan menjadi sangat kompetitif di masa mendatang. Skala keekonomian tenaga surya dan bayu akan semakin menurun dan murah ke depannya. Penggunaan teknologi nuklir pun akan turut memperhatikan aspek keselamatan melalui adopsi teknologi generasi IV yang dinamakan *Innovative Designs* termasuk skala lebih kecil atau *Small Modular Reactor* (SMR). Teknologi *elektrolisis Green Hydrogen* (GH₂) dan *fuel cell* menunjukkan perkembangan yang positif, terutama untuk transportasi berat, seperti kendaraan truk, kereta api, kapal tanker, dan transportasi udara sebagai pengganti avtur, serta pemanfaatan GH₂ sebagai *feedstock* industri petrokimia dan *green ammonia* untuk pupuk.

j. Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ketetapan bahwa antariksa tidak tunduk pada kepemilikan suatu negara tertentu, telah mendorong banyak negara mengembangkan industri antariksa. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Proses menghubungkan bumi dengan luar angkasa kemudian memunculkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*), dan keamanan antariksa (*space security*).

Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi antariksa diperkirakan mencapai US\$469,0 miliar pada tahun 2021 dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US\$1,0 triliun hingga tahun 2040. Nilai pasar ekonomi antariksa bahkan tumbuh sebesar 6,0 persen saat krisis COVID-19. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

2. Isu Strategis Nasional

Dalam RPJPN tahun 2025-2045, isu strategis dan tantangan pembangunan jangka Panjang nasional yang perlu diperhatikan, meliputi sebagai berikut.

Tabel Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
1. Produktivitas Rendah	Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relative tertinggal
2. IPTEKIN dan Riset Lemah	a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai
3. Deindustrialisasi Dini	Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah
4. Pariwisata Di Bawah Potensinya	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata
5. Ekonomi laut belum optimal	Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut
6. Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi
7. Integrasi domestik terbatas	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi
8. Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah. Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.
9. Kemiskinan	Pada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menuju nol persen pada tahun 2045, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
10. Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	a. Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih cukup tinggi b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat diberbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.
11. Pembangunan belum berkelanjutan	a. Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.
12. Tata Kelola pemerintahan belum optimal	a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah. b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D. e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah. f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik. g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global.

Isu Strategis Nasional	Tantangan Pembangunan
	Namun tantangan kedepan adalah perlunya kebijakan <i>fiscal</i> dan moneter yang pro-pertumbuhan. j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang. k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.
13. Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah	a. Ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar
14. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan b. Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis ke-pemiluan-an dan hubungan formal kelembagaan e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan. f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat.

3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Tengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Transisi Demografi menuju penduduk usia tua
- b. SDM yang berdaya saing dan berkarakter (Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender).
- c. Penerapan ekonomi Hijau Yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkulan, dan pengembangan pembiayaan hijau
- d. Hilirisasi, komoditas unggulan dan industry pada karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
- e. Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan
- f. Kemiskinan
- g. Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas)
- h. Dampak perubahan iklim
- i. Tata Kelola pemerintahan yang dinamis
- j. Kondusivitas wilayah

Dalam rangka perumusan isu strategis Kabupaten Banjarnegara dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel Identifikasi Isu Strategis Daerah

Isu Strategis Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Banjarnegara	Faktor Penentu Keberhasilan
Perdagangan Internasional	Produktivitas Rendah	Hilirisasi, komoditas unggulan dan industry pada karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor	Potensi ekonomi yang belum termanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan perekonomian daerah	Peningkatan investasi sebagai penggerak perekonomian daerah
Persaingan Sumber Daya Alam	IPTEKIN dan Riset Lemah			Peningkatan produktivitas dan pengembangan potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, perdagangan, industri pengolahan, dan pertambangan.
Geopolitik dan Geoekonomi	Deindustrialisasi Dini			Peningkatan ketahanan pangan masyarakat
Keuangan Internasional	Pariwisata Di Bawah Potensinya			Pengembangan inovasi dan pemanfaatan riset dan teknologi dalam pengembangan potensi daerah
Pemanfaatan Luar Angkasa	Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil			
	Integrasi domestik terbatas	Kedaulatan pangan dan alih fungsi lahan		
Demografi Global	Kualitas SDM yang makin rendah	SDM yang berdaya saing dan berkarakter (Pembangunan keluarga dan kesetaraan gender).	Kualitas SDM yang relatif tertinggal dipengaruhi kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah	Peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan serta pemerataan fasilitas pendidikan
		Transisi Demografi menuju penduduk usia tua		Peningkatan pendidikan karakter, budi pekerti dan budaya inovasi
				Pemerataan fasilitas dan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
Pendapatan Kelas Menengah	Kemiskinan	Kemiskinan	Kesenjangan sosial (kemiskinan) dan pengangguran yang cukup tinggi	Penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan
				Penguatan sistem perlindungan sosial yang adaptif

Isu Strategis Internasional	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Banjarnegara	Faktor Penentu Keberhasilan
				Peningkatan kesesuaian suplay dan demand tenaga kerja
				Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja
Urbanisasi Dunia	Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa	Ketimpangan antar wilayah (pembangunan pusat pertumbuhan yang mempengaruhi pola migrasi dan mobilitas)	Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai	Peningkatan kapasitas, pemeliharaan dan pemerataan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan
				Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas transportasi
Perubahan Iklim	Pembangunan berkelanjutan belum	Penerapan ekonomi Hijau Yang meliputi transisi energi, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkulan, dan pengembangan pembiayaan hijau	Degradasi lingkungan dan perubahan iklim	Peningkatan antisipasi perubahan iklim
				Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Dampak perubahan iklim		Pemanfaatan lahan dan pola tanam yang sesuai
				Peningkatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana
Disrupsi Teknologi	Tata Kelola pemerintahan belum optimal	Tata Kelola pemerintahan yang dinamis	Kualitas Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah yang belum optimal	Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis digital
	Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah	Kondusivitas wilayah		Pengembangan budaya birokrasi yang berintegritas berorientasi pada layanan yang berkualitas
	Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah			

Penjelasan masing-masing isu strategis daerah Kabupaten Banjarnegara diuraikan sebagai berikut:

1. Potensi ekonomi yang belum termanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan perekonomian daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2023 sebesar 4,98 persen. Pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja yang baik didukung laju inflasi tahun 2018 hingga tahun 2023 pada kondisi yang stabil, tertinggi terjadi tahun 2022 sebesar 6,49%, terendah tahun 2020 sebesar 1,90%. Stabilitas harga perlu terus dijaga agar mampu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi meningkat, PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2022 baru mencapai sebesar 25,97 juta rupiah. Kedepan PDRB per Kapita perlu terus ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat semakin meningkat untuk tercapainya Indonesia emas 2045.

Struktur perekonomian Banjarnegara selama lima tahun terakhir (2018-2023) didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; Jasa Pendidikan; serta Pertambangan dan Penggalan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banjarnegara pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 28,62 persen (angka ini menurun dari 29,56 persen di tahun 2022). Selanjutnya, lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 16,40 persen (naik dari 15,73 persen di tahun 2022) disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,64 persen (turun dari 14,70 persen di tahun 2022). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,86 persen (naik dari 7,58 persen di tahun 2022), lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 6,07 persen (turun dari 6,14 persen di tahun 2022) dan disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 5,10 persen (turun dari 5,29 persen di tahun 2022).

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan karena memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan dan kesejahteraan suatu wilayah. Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal. Ini membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pengembangan potensi ekonomi daerah tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal tetapi juga

berkontribusi pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Kualitas SDM yang relatif tertinggal dipengaruhi kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat yang masih rendah

Kualitas pembangunan manusia terlihat dari IPM Kabupaten Banjarnegara walaupun meningkat dari 66,54 pada tahun 2018 menjadi 69,16 pada tahun 2023 namun masih di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan IPM nasional sebesar 74,39 pada tahun 2023. Posisi relatif IPM Kabupaten Banjarnegara masih belum beranjak dari peringkat 33 di Provinsi Jawa Tengah.

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam pembangunan, sehingga perlu dipastikan dari sisi kualitas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kualitas sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu daerah maupun kesejahteraan masyarakat. Kualitas SDM yang tinggi dapat meningkatkan daya saing di pasar global. Sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan yang relevan dapat membuat suatu daerah menjadi lebih produktif dan inovatif. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pendorong utama kemajuan teknologi dan inovasi. SDM yang kreatif dan berpengetahuan dapat menciptakan solusi baru, teknologi canggih, dan memajukan berbagai sektor. Dibidang ekonomi, kualitas SDM yang baik berdampak langsung pada produktivitas ekonomi. Sumber daya manusia yang terlatih dan terampil dapat bekerja lebih efisien, meningkatkan output, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Kualitas SDM juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia yang terdidik memiliki peluang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup.

3. Kesenjangan sosial (kemiskinan) dan pengangguran yang cukup tinggi

Selama kurun waktu 2018-2023 angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara cenderung mengalami trend penurunan dari 15,46% tahun 2018 menjadi 14,90% pada tahun 2023. Jumlah penduduk miskin juga cenderung mengalami penurunan dari sebanyak 141,7 ribu jiwa tahun 2018, menjadi sebanyak 138,99 ribu jiwa pada tahun 2023. Namun demikian, posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 masih berada pada peringkat 30 Kab/Kota se-Jawa Tengah dan di atas

persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% maupun nasional sebesar 9,36%.

Pengurangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan campur tangan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait. Pengurangan kemiskinan sangat penting mengingat kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi. Pengurangan kemiskinan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, air bersih, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas dan mendorong peningkatan literasi. Pengurangan kemiskinan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi individu dan komunitas yang terkena dampak. Hal ini dapat mencakup peluang pekerjaan yang lebih baik, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Kemiskinan juga terkait dengan tingkat kejahatan yang tinggi. Dengan mengurangi tingkat kemiskinan, masyarakat dapat mencapai tingkat keamanan yang lebih baik karena individu cenderung lebih terlibat dalam kegiatan ekonomi daripada kegiatan ilegal.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjarnegara kurun waktu dari 2018-2023 cenderung meningkat dari angka 4,00% pada tahun 2018 menjadi 6,26 pada tahun 2023, memerlukan upaya penyediaan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja. Upaya pengurangan pengangguran kedepan perlu terus ditingkatkan, sehingga mampu berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan pengangguran perlu dilakukan dengan melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kapasitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai

Kondisi infrastruktur perkotaan dan penunjang perekonomian terlihat dari kondisi jalan, drainase, irigasi, dan sarana perhubungan. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun cenderung meningkat dari sebesar 70,10% pada tahun 2018 menjadi 72,17% pada tahun 2023. Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) di Kabupaten Banjarnegara baru tercapai sebesar 3,34%. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat

dari sebesar 66,25% pada tahun 2019 meningkat menjadi 76,07% pada tahun 2023.

Kondisi infrastruktur pelayanan dasar terlihat dari akses terhadap air bersih dan sanitasi. Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 baru mencapai sebesar 96,76%. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai pada tahun 2023 baru mencapai 76,86%. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Banjarnegara baru mencapai 88% pada tahun 2023.

Pemerataan infrastruktur wilayah perlu ditingkatkan mengingat akan berdampak terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pemerataan infrastruktur membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah yang maju dan yang kurang berkembang. Hal ini akan membantu memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dan sosial didistribusikan secara merata. Infrastruktur yang merata meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, memudahkan perpindahan orang dan barang. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Pemerataan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah kurang berkembang dengan membuka peluang bisnis baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam bidang sosial, infrastruktur yang merata memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun demikian pembangunan infrastruktur harus terencana dengan baik, sehingga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

5. Degradasi lingkungan dan perubahan iklim

Kualitas lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara masih rendah, terlihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2023 baru mencapai 61,52, turun bila dibandingkan tahun 2022 sebesar 64,08. Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada kesehatan manusia. Lingkungan hidup yang sehat mendukung keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sehat mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produksi pangan yang mencukupi. Ekosistem yang alami berperan dalam melindungi dari bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan badai. Pelestarian lingkungan juga membantu menjaga

keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Dengan semakin menipisnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global karena emisi gas rumah kaca maka perlu dilakukan kebijakan yang dapat menjamin kebutuhan masyarakat di masa depan, khususnya ketersediaan air dan pangan. Kebijakan di bidang lingkungan hidup ini penting bukan hanya terkait kelestarian lingkungan di masa depan namun juga merupakan bagian dari aksi pengurangan kejadian bencana di daerah.

6. Kualitas Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah yang belum optimal

Reformasi birokrasi merupakan serangkaian langkah dan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah menciptakan sistem yang lebih responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Pencapaian Indeks reformasi birokrasi Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 baru mencapai kategori B, sehingga ke depan perlu ditingkatkan.

Reformasi birokrasi bukanlah proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi menjadi landasan untuk pencapaian tujuan pembangunan. Birokrasi yang efisien dan dapat dipercaya dapat meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Reformasi birokrasi diharapkan mampu mengarah pada pencapaian kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

A. Visi

Rumusan Visi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi RPJPD memiliki beberapa kriteria, yaitu: (1) menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*); (2) menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang; (3) menjelaskan/ mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan “kompetitif” yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan (4) menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Visi daerah dalam RPJPD disimpulkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan berbagai proyeksi yang disusun secara logis sampai Tahun 2045.

Perumusan visi daerah dalam rancangan awal RPJPD Kabupaten Banjarnegara dilakukan melalui tahapan penjaringan aspirasi masyarakat melalui *google form*, *focus Group Discussion (FGD)*, dan pembahasan dengan perangkat daerah, dengan memperhatikan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045. Hasil proses tersebut adalah terumuskannya pernyataan visi, yaitu “Banjarnegara yang Berdaya saing, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan”.

Setelah melalui tahapan Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dilakukan penyesuaian salah satu pokok visi dari “Berdaya Saing” menjadi “Maju” karena frase “Berdaya Saing” merupakan salah satu dimensi dari adanya kemajuan. Sehingga, perumusan visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara menjadi sebagai berikut.

Tabel Perumusan Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045

No	Masalah Utama	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1	Potensi ekonomi yang belum termanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan perekonomian daerah	Maju	Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan
2	Kemiskinan yang cukup tinggi dan kesenjangan antara wilayah utara dan selatan	Adil	
3	Kualitas sumber daya manusia yang relatif tertinggal	Sejahtera	
4	Degradasi lingkungan dan perubahan iklim	Berkelanjutan	

4.1.2 Penjelasan Visi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi. Perumusan penjelasan visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perumusan Penjelasan Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2025-2045

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Maju	Maju dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti menjadi lebih baik; berkembang; dan telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi. Maju dalam visi Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 dimaknai sebagai kemampuan daerah untuk mengembangkan kemampuan sosial ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Maju ditunjukkan dengan tingginya daya saing, meningkatnya modernitas, terciptanya lingkungan yang inovatif, masyarakat yang mandiri dan tangguh, serta adanya kemampuan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat, baik secara fisik maupun rohani. Maju ditandai dengan peningkatan PDRB per kapita masyarakat Banjarnegara.

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
	Adil	Adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah atau berpihak pada yang benar dan berpegang pada kebenaran. Adil dalam visi Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 dimaknai sebagai sebuah kondisi pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keadilan ditandai dengan adanya distribusi pendapatan yang merata ditunjukkan dengan angka rasio gini yang moderat.
	Sejahtera	Sejahtera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kondisi aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sementara itu kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera. Sejahtera dalam visi Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian kesejahteraan sosial yang dapat diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan ditandai dengan menurunnya jumlah masyarakat miskin dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan persentase angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia.
	Berkelanjutan	Berkelanjutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti berlangsung terus-menerus; berkesinambungan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		Berkelanjutan dalam visi Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 dimaknai sebagai kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dan menurunkan risiko bencana. Berkelanjutan ditandai dengan Penurunan Emisi GRK

Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 dengan Visi RPJPN dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan Visi RPJPN Tahun 2025-2045

Visi RPJPN	Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara
1	2
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan
a. Maju, meliputi substansi: - Berdaya - Modern - Inovatif - Tangguh - Adil	a. Maju, meliputi substansi: - Berdaya saing - Modern - Inovatif - Mandiri - Tangguh - Aman
b. Berkelanjutan, meliputi substansi: - Keberlanjutan sumber daya alam - Kualitas lingkungan hidup - Tata kelola yang baik	b. Berkelanjutan, meliputi substansi: - Kualitas lingkungan hidup - Minimalisasi dampak pembangunan - Risiko bencana

Keterkaitan Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Visi RPJPD Provinsi Jawa Tengah	Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara
1	2
Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan
a. Maju, meliputi substansi: Daya saing	a. Maju, meliputi substansi: Berdaya saing

▪ Modern ▪ Inovatif ▪ Mandiri ▪ Tangguh ▪ Aman	▪ Modern ▪ Inovatif ▪ Mandiri ▪ Tangguh ▪ Aman
b. Berkelanjutan, meliputi substansi: ▪ Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup ▪ Risiko bencana	b. Berkelanjutan, meliputi substansi: ▪ Kualitas lingkungan hidup ▪ Minimalisasi dampak pembangunan ▪ Risiko bencana

Sasaran Utama Visi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045

Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Sasaran Utama Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2025-2045

Pokok-Pokok Visi	Sasaran Utama Visi	Indikator Sasaran Utama Visi	Baseline 2025	Target			
				I (2025-2029)	II (2030-2034)	III (2035-2039)	IV (2040-2045)
Maju	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp juta)	27,71-27,90	53,82-59,73	79,93-91,55	106,04-123,38	132,15-155,20
Adil	Distribusi pendapatan yang berkeadilan	2. Indeks gini	0,36	0,36-0,37	0,36-0,37	0,35-0,36	0,35-0,36
Sejahtera	Pengentasan kemiskinan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	12,46-13,64	9,35-10,39	6,23-7,14	3,12-3,89	0,00-0,64
	Sumber daya manusia yang berdaya saing	4. Indeks Pembangunan Manusia	70,49	74,40	78,53	82,66	86,79
Berkelanjutan	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	5. Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	454,03	840,52	1.227,02	1.613,51	2.000

Keselarasan sasaran visi dan indikator antara RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan RPJPN adalah sebagai berikut:

Tabel Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN		RPJPD Kabupaten Banjarnegara	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	2	3	4	5
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)
		Kontribusi PDB Maritim (%)	-	-
		Kontribusi PDB Manufaktur (%)	-	-

No	RPJPN		RPJPD Kabupaten Banjarnegara	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Rasio Gini (Indeks)	Distribusi pendapatan yang berkeadilan	Rasio Gini (Angka)
			Pengentasan Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)
		Kontribusi PDRB KTI (%)		
3	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	<i>Global Power Index</i> (Peringkat)	-	-
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	<i>Human Capita Index</i> (Indeks)	Sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)

Keselarasan sasaran visi dan indikator antara RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penyelarasan Sasaran Visi dan Indikator RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Banjarnegara	
	Sasaran Visi	Indikator	Sasaran Visi	Indikator
1	2	3	4	5
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) (Angka)	-	-
		Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	-	-
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	Pengentasan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)
		Rasio Gini (Angka)	Distribusi pendapatan yang merata	Rasio Gini (Angka)
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-	-
3	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi (Angka)	-	-
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia (Angka)	Sumber daya manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)
5	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Perumusan misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perumusan Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2025-2045

Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi
Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Potensi ekonomi yang belum termanfaatkan secara optimal untuk menggerakkan perekonomian daerah	Misi 1 Transformasi Ekonomi
	Kualitas sumber daya manusia yang relatif tertinggal sehingga menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi	Misi 2 Transformasi Sosial
	Terjadinya degradasi lingkungan	Misi 3 Ketahanan Ekologi
	Kualitas Tata kelola pemerintahan yang belum optimal	Misi 4 Transformasi Tata Kelola

Penjelasan masing-masing misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Penjelasan Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2025-2045

Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Misi 1 Transformasi Ekonomi	Tingginya kontribusi sektor ekstraktif pada perekonomian daerah perlu ditransformasikan ke sektor lainnya seperti, industri, perdagangan dan pariwisata untuk meningkatkan nilai tambah. Perekonomian daerah mesti didorong secara terus-

Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
		menerus untuk menggerakkan faktor produksi guna mengakselerasi sektor-sektor yang memiliki produktivitas rendah ke sektor-sektor yang lebih tinggi produktivitasnya. Untuk itu diperlukan sentuhan inovasi dan teknologi untuk menghasilkan produk-produk kreatif yang kompetitif di pasaran. Diharapkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 20 tahun ke depan mampu mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 5% secara konsisten setiap tahunnya. Kinerja perekonomian yang dicapai juga diharapkan dapat inklusif yaitu mampu memperluas kesempatan dan kemakmuran ekonomi, serta memberi akses yang luas pada seluruh lapisan masyarakat.
	Misi 2 Transformasi Sosial	Dengan meningkatnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya <i>internet of Things</i> , telah membawa masyarakat ke dalam model komunikasi dan interaksi sosial yang baru. Keadaan tersebut menjadi kekuatan dan peluang untuk meletakkan dasar-dasar untuk membentuk masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, kreatif, berdaya saing, dan berakhlak mulia serta tidak kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat Banjarnegara. Untuk itu diperlukan peningkatan akses layanan dasar yang berkualitas dan jaminan perlindungan sosial yang memadai. Selain itu, diperlukan penguatan modal sosial masyarakat yang bersendikan kearifan lokal.
	Misi 3 Ketahanan Ekologi	Dengan semakin mendekatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka potensi meningkatnya risiko bencana semakin besar. Selain itu, pertumbuhan penduduk akan memberikan tekanan

Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
		tersendiri pada lingkungan, khususnya pemenuhan kebutuhan air bersih dan komoditas pangan. Oleh karena itu, pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan, ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, penataan ruang, tanggap terhadap perubahan iklim, serta tangguh terhadap bencana. Hal ini akan dilakukan antara lain melalui konservasi lingkungan, pertanian yang berkelanjutan dan pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
	Misi 4 Transformasi Tata Kelola	Transformasi tata kelola ditandai dengan reformasi administrasi yang terjadi pada lingkup organisasi pemerintah daerah, transparansi yang terjalin antara pemerintah, swasta, dan masyarakat serta profesionalisme aparatur dalam pemberian pelayanan publik. Model birokrasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berhasil mencapai tujuan pembangunan, dan memiliki kemampuan dan keunggulan untuk memenangi kompetensi di segala bidang. Hal ini dilakukan antara lain dengan peningkatan kapasitas, kapabilitas dan integritas aparatur.

Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 selain sebagai upaya pencapaian visi daerah juga merupakan bagian dari upaya dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan misi dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Kabupaten Banjarnegara
1	2	3	4
1	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial	Transformasi Sosial

No	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Kabupaten Banjarnegara
2	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Transformasi Ekonomi
3	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
4	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola
5	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	
6	Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	
7	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Ekologi
8	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana Prasarana Berkualitas dan Ramah Lingkungan	

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

A. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Dengan kata lain arah kebijakan adalah prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Banjarnegara tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2025-2029 (Tahap I)

Pembangunan tahun 2025-2029 mengarah pada Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Kokoh, dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan penguatan riset dan inovasi
- b. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan Pendidikan untuk menunjang program wajib belajar, termasuk pendidikan usia dini dan Pendidikan non formal/kesetaraan
- c. Penataan ruang untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
- d. Penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur, penataan regulasi daerah, peningkatan kualitas ASN, dan digitalisasi pelayanan publik.

2. Tahun 2030-2034 (Tahap II)

Pembangunan tahun 2030-2034 mengarah pada Akselerasi Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Penguatan produktivitas sektor ekonomi potensial dan pengentasan kemiskinan
- b. Percepatan pembangunan SDM berkualitas
- c. Peningkatan kapasitas infrastruktur sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- d. Pengembangan kolaborasi kelembagaan, kualitas ASN, penguatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan

3. Tahun 2035-2039 (Tahap III)

Pembangunan tahun 2035-2039 mengarah pada Pemantapan Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah, dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:

- a. Penguatan hilirisasi industri dan kerja sama perdagangan
- b. Penguatan mutu dan daya saing SDM dan penciptaan insan kreatif

- c. Pemerataan pembangunan infrastruktur berkualitas dan kelestarian lingkungan hidup
 - d. Penguatan kelembagaan yang adaptif, percepatan kinerja dan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas
4. Tahun 2040-2045 (Tahap IV)
- Pembangunan tahun 2040-2045 mengarah pada Perwujudan Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan, dengan arah kebijakan meliputi sebagai berikut:
- a. Perwujudan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif
 - b. Perwujudan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dan kreatif
 - c. Perwujudan pembangunan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
 - d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing.

Jika disajikan dalam tabel, keterkaitan antara visi, misi, dan arah kebijakan dalam setiap tahapan adalah sebagai berikut:

Tabel Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Kokoh	Akselerasi Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan	Pemantapan Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Perwujudan Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan
Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Transformasi Ekonomi	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan penguatan riset dan inovasi	Penguatan produktivitas sektor ekonomi potensial dan pengentasan kemiskinan	Penguatan hilirisasi industri dan kerja sama perdagangan	Perwujudan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif
	Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan Pendidikan untuk menunjang program wajib belajar, termasuk pendidikan usia dini dan Pendidikan non formal/ kesetaraan	Percepatan pembangunan SDM berkualitas	Penguatan mutu dan daya saing SDM dan penciptaan insan kreatif	Perwujudan masyarakat yang berkualitas, berdaya saing dan kreatif
	Ketahanan Ekologi	Penataan ruang untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan	Peningkatan kapasitas infrastruktur sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pemerataan pembangunan infrastruktur berkualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Perwujudan pembangunan infrastruktur berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
	Transformasi Tata Kelola	Penataan kelembagaan	Pengembangan kolaborasi	Penguatan kelembagaan	Perwujudan tata kelola

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Kokoh	Akselerasi Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan	Pemantapan Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah	Perwujudan Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan
		yang tepat fungsi dan tepat ukur, penataan regulasi daerah, peningkatan kualitas ASN, dan digitalisasi pelayanan publik	kelembagaan, kualitas ASN, penguatan transformasi digital dalam penyelenggara n pemerintahan	yang adaptif, percepatan kinerja dan tata Kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing

Tema RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 telah disesuaikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah. Gambaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Penyelarasan Periode dan Tema RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Periode	Tema		
	RPJPN	RPJPD Provinsi Jawa Tengah	RPJPD Kabupaten Banjarnegara
1	2	3	4
2025-2029	Penguatan Fondasi Transformasi	Penguatan Landasan Transformasi	Penguatan Landasan Pembangunan Daerah yang Kokoh
2030-2034	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Akselerasi Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan
2035-2039	Ekspansi Global	Pemantapan Transformasi	Pemantapan Pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah
2040-2045	Mewujudkan Indonesia Emas	Perwujudan Visi	Perwujudan Banjarnegara yang Maju, Adil, Sejahtera dan Berkelanjutan

B. Sasaran Pokok

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan.

Sasaran pokok yang akan dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045 dapat diuraikan sebagai berikut:

Misi 1 Transformasi Ekonomi, dengan sasaran pokok terwujudnya kinerja perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing. Arah pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Produktivitas ekonomi
- b. Keuangan inklusif
- c. Ekonomi inklusif
- d. Ekosistem ekonomi

Misi 2 Transformasi Sosial, dengan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Arah pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan berkualitas
- b. Kesehatan berkualitas
- c. Perlindungan sosial
- d. Lingkungan dan karakter sosial

Misi 3 Ketahanan Ekologi, dengan sasaran pokok terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan menurunnya risiko bencana. Arah pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Lingkungan hidup yang berkualitas
- b. Ketahanan pangan

Misi 4 Transformasi Tata Kelola, dengan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kompeten, dan dinamis. Arah pembangunan adalah tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.

Keterkaitan arah kebijakan dan sasaran RPJPD tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Transformasi Ekonomi	Terwujudnya kinerja perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing	Produktivitas ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	17,04	18,35	19,66	20,97	22,28
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,20	3,10	4,00	4,89	5,79
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	700	3.000	5.300	7.600	10.000
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	5,38	9,19	12,99	16,80	20,60
			Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten/Kota (juta Rupiah)	27,71-27,90	53,82-59,73	79,93-91,55	106,04-123,38	132,15-155,20
			Persentase Desa Mandiri (%)	1,5	5,54	9,59	13,63	17,67
			<i>Return on Asset</i> (RoA) BUMD (%)	22,51	23,06	23,61	24,15	24,70
		Keuangan inklusif	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	1,69	1,47	1,23	1,02	0,83
			Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB (%)	1,67	1,39	1,11	0,88	0,67
		Ekonomi inklusif	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,41	5,16	5,90	6,65	7,39
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,10-5,72	5,46-5,10	4,82-4,48	4,18-3,86	3,54-3,24
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,78	64,10	67,41	70,73	74,04
			Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	18,88-19,08	19,88-20,58	20,88-22,08	21,88-23,58	22,88-25,08
		Ekosistem ekonomi	Pembentukan Modal Tetap	22,51	23,06	23,61	24,15	24,70

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Bruto (% PDRB) (%)					
			Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	85,34	87,76	90,17	92,59	95
			Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota (%)	40	51,25	62,50	73,75	85
			Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	76,07	79,55	83,04	86,52	90
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,56	0,56	0,55	0,55	0,54
			Disparitas harga	±10	±10	±10	±10	±10
			Kapabilitas Inovasi	1,35	2,01	2,68	3,34	4
Transformasi Sosial	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Pendidikan berkualitas	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):					
			1). Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	64,40	68,37	72,35	76,32	80,29
			2). Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	63,31	70,80	78,30	85,79	93,28
			3). Numerasi SD/Sederajat (%)	50,64	59,75	68,85	77,96	87,06
			4). Numerasi SMP/Sederajat (%)	38,66	50,59	62,51	74,44	86,36
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,46	7,88	8,30	8,72	9,14
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,07	12,62	13,18	13,73	14,28
			Proporsi Penduduk Berusia 15	5,05	5,59	6,12	6,65	7,19

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)					
			Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	84,37	87,49	90,60	93,72	96,83
			Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	0,04	0,60	1,15	1,71	2,26
		Kesehatan berkualitas	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,75	76,28	77,81	79,34	80,87
			Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	14	11	9	6	3
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,87	17,55	16,23	14,91	13,59
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	90	92,50	95	97,50	100
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	91,25	92,50	93,75	95
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	34,69	51,02	67,35	83,67	100
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	0	16,25	32,50	48,75	65
			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	12	30	55	80	100
		Perlindungan sosial	Tingkat Kemiskinan (%)	12,46-13,64	9,35-10,39	6,23-7,14	3,12-3,89	0,00-0,64
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,51	98,76	99,01	99,25	99,50
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	82,2	86,15	90,10	94,05	98
		Lingkungan dan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,29 - 0,27	0,26-0,22	0,24-0,17	0,21-0,11	0,18 - 0,06

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan karakter sosial	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet (%)	62,69	72,02	81,35	90,67	100
			Jumlah Kejadian Konflik SARA (kali)	0	0	0	0	0
			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	62,85-64,7	66,59-68,55	70,34-72,41	74,08-76,26	77,82-80,11
			Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengurusutamakan kebudayaan (%)	65	70	75	80	85
			Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	18,64	22,45	26,27	30,08	33,89
			Jumlah pengunjung tempat bersejarah (orang)	435.000	440.000	445.000	450.000	455.000
			Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	18,55	20,65	22,76	24,86	26,96
Ketahanan Ekologi	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan menurunnya risiko bencana	Lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,90	76,15	76,40	76,55	76,78
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	0,03	22,52	45,02	67,51	90
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	102,80 - 102,27	94,78-93,36	86,75-84,46	78,73-75,55	70,70 - 66,64
			Penurunan Emisi GRK kumulatif * (TonCO2eq)	118.188,19	2.326.311,91	4.652.623,81	6.978.935,72	9.423.435,81
		Ketahanan pangan	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	10,87	8,88	6,89	4,90	2,91
			Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,86	82	83,15	84,29	85,43
Transformasi	Terwujudnya tata	Tata kelola	Indeks Reformasi Birokrasi	63,40	67,55	71,70	75,85	80

Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Tata Kelola	kelola pemerintahan yang Berintegritas, Kompeten, dan Dinamis	pemerintahan yang berintegritas, adaptif, Akuntabel dan kolaboratif	Indeks Reformasi Hukum	38,35	48,76	59,18	69,59	80
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,29	3,66	4,02	4,39	4,75
			Indeks Pelayanan Publik	4,20	4,40	4,60	4,80	5,00
			Indeks Integritas Nasional	75,9	76,15	76,4	76,6	76,78

*) *Estimasi target penurunan Emisi GRK Kumulatif dari periode Tahun 2025-2045 di wilayah Kabupaten Banjarnegara (9.423.435,81 TonCO2e) yang ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak non pemerintah*

Sebagai bagian dari kontribusi Kabupaten Banjarnegara pada pencapaian sasaran pokok Provinsi Jawa Tengah maka disusun keselarasan sasaran pokok sebagai berikut:

Tabel Penyelarasan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Banjarnegara dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah		RPJPD Kabupaten Banjarnegara	
	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif	CJ01. Kesehatan Untuk Semua	Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Kesehatan Berkualitas
		CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif		Pendidikan Berkualitas
		CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Perlindungan Sosial
				Lingkungan dan karakter sosial
2	Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Terwujudnya kinerja perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing	Produktivitas Ekonomi
				Keuangan inklusif
		C105. Penerapan Ekonomi Hijau		
		CJ06. Transformasi Digital		Ekosistem ekonomi
		CI07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
		C108. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Ekonomi Inklusif
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	C109. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Berintegritas, Kompeten, dan	Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

			Dinamis	
4	Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	C110. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	-	-
		CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		
		C112. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah		
5	Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	-	-
		C114. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif		
6	Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan menurunnya risiko bencana	Lingkungan hidup yang berkualitas
		CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Ketahanan pangan
		CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		

Penjelasan arah kebijakan pada masing – masing sasaran pokok adalah sebagai berikut:

Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya kinerja perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing, diwujudkan melalui empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi :

a. Produktivitas ekonomi

Peningkatan kinerja perekonomian daerah salah satunya dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah yang memberikan nilai tambah produksi dan rantai nilai yang mampu bersaing di pasar global maupun nasional.

Peningkatan produktivitas salah satunya dengan mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengandigitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau.

b. Keuangan inklusif

Peningkatan kinerja perekonomian daerah juga dilakukan dengan meningkatkan kapasitas permodalan yang lebih luas khususnya bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah.

c. Ekonomi inklusif

Kinerja perekonomian daerah dilakukan untuk meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan dengan memanfaatkan seluruh potensi daerah termasuk optimalisasi peran perempuan dalam perekonomian.

Perwujudan perekonomian daerah yang inklusif, diarahkan menerapkan prinsip ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

d. Ekosistem ekonomi

Peningkatan kinerja perekonomian didukung dengan ekosistem yang baik untuk tumbuhnya investasi dan meningkatnya aktivitas perekonomian. Ekosistem ekonomi ditopang oleh infrastruktur yang memadai, kapabilitas inovasi dan stabilitas harga.

Sasaran Pokok 2 : Terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, diwujudkan melalui empat arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi :

a. Pendidikan berkualitas

Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera.

Pendidikan berkualitas diarahkan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi serta meningkatkan rata – rata jenjang pendidikan masyarakat secara umum.

b. Kesehatan berkualitas

Pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk menjamin tersedianya akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkeadilan. Pelayanan kesehatan dilaksanakan

meningkatkan kualitas hidup, menurunkan angka kesakitan dan mortalitas ibu melahirkan serta penciptaan lingkungan yang bersih dan sehat.

c. Perlindungan sosial

Perlindungan sosial diperuntukkan sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial diarahkan pada penurunan angka kemiskinan dan perluasan penyediaan jaminan sosial

d. Lingkungan dan karakter sosial

Lingkungan dan karakter sosial dijalankan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul berwawasan kedepan namun tetap mempertahankan nilai budaya serta kearifan lokal. Pembangunan dan lingkungan sosial dan karakter sosial diarahkan untuk meningkatkan toleransi, memperluas akses informasi, meningkatkan pemahaman akan budaya dan meningkatkan pembangunan keluarga.

Sasaran Pokok 3 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan menurunnya risiko bencana, diwujudkan melalui dua arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi :

a. Lingkungan hidup yang berkualitas

Kebijakan dalam upaya terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan cakupan pengelolaan sampah dan menurunkan resiko bencana.

b. Ketahanan pangan

Kebijakan dalam lingkup ini adalah dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam penyediaan pangan.

Sasaran Pokok 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, kompeten dan dinamis, diwujudkan melalui arah pembangunan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, akuntabel dan kolaboratif.

C. Arah Kebijakan Pengembangan antar wilayah

Sebagai bagian dari wilayah pengembangan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo masuk dalam Wilayah Pengembangan Wonobanjar.

Wilayah Pengembangan Wonobanjar diarahkan pengembangannya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu serta sebagai Kawasan penyangga di sekitarnya. Dalam rangka mendorong pengembangan KSPN Dieng dan Geopark Dieng perlu dilakukan peningkatan akses kawasan serta kualitas destinasi wisata dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah. Pengembangan pusat permukiman dan perekonomian diarahkan melalui pengembangan koridor Kawasan perkotaan Kertek-Wonosobo-Banjarnegara-Klampok dengan memperhatikan fungsi antarkawasan serta upaya mitigasi bencana alam seperti erupsi gunung api dan gerakan tanah. Peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan terus dilakukan pada wilayah ini karena berfungsi sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya serta mengembangkan sektor industri hasil pertanian, kehutanan di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara bagian selatan serta pengadaan listrik dan gas dari energi terbarukan antara lain air, panas bumi dan gas rawa.

Rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah pengembangan yang meliputi:

1. Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegara sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). meliputi: Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Madukara, dan Kecamatan Sigaluh dengan arah

- pengembangan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Klampok sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi: Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Susukan dengan arah pengembangan sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
 3. Wilayah Pengembangan III dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Batur, meliputi Kecamatan Batur. Kecamatan Batur sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya sebagai kawasan agropolitan dan pariwisata yang berkelanjutan.
 4. Wilayah Pengembangan IV dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Kalibening, meliputi Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Pandanarum dengan arah pengembangan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan dengan skala kecamatan.
 5. Wilayah Pengembangan V dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Purwanegara sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi Kecamatan Bawang, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Rakit, dan Kecamatan Wanadadi. Wilayah Pengembangan V diarahkan sebagai Kawasan Sentra Produksi Perikanan Rajapurbawa sebagai kawasan minapolitan dan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan arahan pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, industri, perikanan, pertanian, energi, dan pariwisata.
 6. Wilayah Pengembangan VI dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Punggelan, sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi Kecamatan Punggelan, dengan arah pengembangan sebagai pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan dengan skala kecamatan.
 7. Wilayah Pengembangan VII dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Wanayasa sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), meliputi Kecamatan Karangobar dan Kecamatan Wanayasa. Diarahkan sebagai Kawasan Sentra Produksi Agropolitan Jakabaya sebagai kawasan agropolitan dan pariwisata yang berkelanjutan. Dengan arahan pengembangan pertanian, energi dan pariwisata.

Dalam upaya mendukung pusat-pusat pengembangan wilayah dan pemerataan pelayanan yang tidak terjangkau dan terlalu jauh dari Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dengan tetap mempertimbangkan aksesibilitas dan kondisi geografis

wilayah di Kabupaten Banjarnegara seperti tersebut diatas juga terdapat beberapa Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu:

- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Beji di Kecamatan Banjarmangu;
- b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebutuhjurang di Kecamatan Pagedongan;
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebondalem di Kecamatan Bawang;
- d. Pusat Pelayanan Lingkungan Pagentan di Kecamatan Pagentan;
dan
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan Tunggoro di Kecamatan Sigaluh.

BAB VI PENUTUP

Sebuah dokumen perencanaan sebegus apapun tidak akan bermanfaat jika tidak dilaksanakan secara konsisten dan diikuti dengan penyediaan dana yang memadai, oleh karena itu diperlukan penegasan agar dokumen dimaksud dapat berfungsi optimal dalam pedoman atau kaidah pelaksanaan dan gambaran mengenai pendanaan pembangunan daerah.

A. Kaidah Pelaksanaan

Dalam kaidah pelaksanaan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, mekanisme perubahan dan komunikasi publik.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

a. Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Provinsi

Jika digambarkan sejak dari atas, dari RPJPN, memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan nasional, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran di tingkat daerah.

Konsistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pusat dan provinsi adalah sebagai berikut:

- 1) Periodisasi RPJPD mengikuti periodisasi RPJPN yaitu tahun 2025-2045.
- 2) Substansi visi dan delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas dalam RPJPN dan visi dan misi RPJPD provinsi menjadi bagian dari muatan utama RPJPD.
- 3) Penentuan arah kebijakan, sasaran pokok dan indikator pembangunan RPJPD mengacu pada Arah (tujuan) Pembangunan dan indikator dalam RPJPN, serta arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Dokumen RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 5) Penyusunan tujuan, sasaran, indikator, arah kebijakan dan program RPJMD mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok dan indikator kinerja RPJPD, dan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan memperhatikan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.
- 6) Penyusunan tujuan, sasaran, indikator dan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, indikator dan program RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RPJMN, sasaran dan indikator strategis/program pada Rencana Strategis K/L (Renstra K/L), serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- 7) Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD mengacu pada strategi dan arah kebijakan tahunan yang tercantum dalam RPJMD, sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada rencana kerja pemerintah, serta prioritas dan sasaran RKPD Provinsi.
- 8) Penyusunan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Perangkat Daerah mengacu pada tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Perangkat daerah dan prioritas, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD.
- 9) Dokumen RPJPD, dokumen RPJMD, dan dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/*Master Plan/Grand Design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan.

b. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPN dan dokumen perencanaan turunannya (termasuk RPJPD) menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

1. Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
2. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
3. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
4. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan daerah, dalam dokumen perencanaan pembangunan dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

c. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, dan hibah, untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

2. Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga di-integrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian.

- a. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup:
- 1) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
 - 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan

- 4) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup:
 - a) penjabaran perencanaan RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah;
 - b) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan;
 - c) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
 - d) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
- b. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup:
 - 1) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan;
 - 2) pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
 - 3) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan
 - 4) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif.

Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dimaksud meliputi unsur pemerintah/pemerintah daerah, non pemerintah, seperti dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu:

- a. struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional;
- b. penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta
- c. keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar KL/ dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

B. Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka panjang memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber- sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

1. Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*).
2. Perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya.
3. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial.
4. Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan lain pada suatu kawasan (*asset value capture*) yang ada dapat digunakan secara optimal.

Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup penajaman identifikasi.

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

MUHAMAD MASROFI